

# #MegatRuh INDONESIA

Refleksi 25 Tahun Reformasi



Andang Subaharianto

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018.

“Buku yang ditulis sahabat saya ini sangat menarik. Berisi pernik-pernik perjalanan historis bangsa ini, yang penuh dinamika sampai 80 tahun NKRI berdiri. Dituliskan secara apik dengan judul dan bahasa yg khas penulis kolom. Kalau boleh saya menambahkan pertanyaan kritis, apakah bangsa ini telah salah kelola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena negara yang kaya raya sumber daya alam mengapa rakyatnya belum sejahtera. Saya khawatir para pendiri kecewa, karena sebenarnya telah mewariskan cara bernegara yg sangat ideal sebagaimana amanat yang tertttulis dalam pembukaan UUD 1945.”

**Dr. J. Haryatmoko, S.J.**, Pastor, Ahli Filsafat, Penulis dan Pengajar di Sejumlah Perguruan Tinggi, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

“Buku ini merekam kegelisahan intelektual penulis terhadap perjalanan demokrasi Indonesia yang kerap mengingkari janji reformasi: sistem politik mudah disiasati, etika publik dilenturkan, dan kekuasaan sering menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Namun, refleksi-refleksi dalam kumpulan artikel ini tidak berhenti pada pesimisme. Dengan argumentasi yang tajam dan reflektif, penulis justru mengajak pembaca merawat akal sehat publik, meneguhkan keberanian moral, dan menjaga kesetiaan pada nilai-nilai demokrasi. Buku ini menjadi pengingat penting bahwa harapan bagi masa

depan Indonesia tetap harus diperjuangkan secara kritis dan bertanggung jawab.”

**Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D.**, Kepala Pascasarjana Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Penulis Buku *Merahnya Ajaran Bung Karno: Narasi Pembebasan ala Indonesia* (2023).

“Karya Andang Subahianto, #MegatRuh Indonesia, memberikan wawasan-wawasan penting, bagaimana gerak maju untuk mendekati diri pada janji-janji kemerdekaan melalui jalan demokrasi terhambat oleh corak dan logika kekuasaan yang eksis dalam belenggu oligarki yang memasungnya. Benturan kekuatan progresif dan reaktif ini saat ini sampai pada tahap proses pembusukan demokrasi. Meskipun jalan demokrasi dan janji kemerdekaan begitu gelap, namun hendaknya harapan tetap dinyalakan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Buku ini berangkat dari perpaduan yang seimbang antara kritisisme dalam nalar dan optimisme dalam kehendak tentang republik kita.”

**Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng.**, Ahli Teknologi Pangan, Rektor Universitas Jember.

“Buku karya Andang Subahianto ini menghadirkan refleksi yang jernih dan bernas tentang perjalanan demokrasi Indonesia setelah seperempat abad Reformasi. Melalui esai-esai yang sebelumnya terbit di *Kompas.com* dan *Kompas.id*, penulis mengajak pembaca menimbang kembali relasi antara politik, kebudayaan,

kekuasaan, dan etika publik dalam kehidupan berbangsa. Di tengah dinamika demokrasi yang terus bergerak, buku ini menjadi ruang perenungan yang penting— tidak hanya untuk memahami perjalanan yang telah kita tempuh, tetapi juga untuk membaca arah masa depan Indonesia. Kehadirannya memperkaya khazanah literasi publik sekaligus menghidupkan tradisi refleksi kritis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi kita.”

**Prof. Agus Trihartono, Ph.D**, Guru Besar Diplomasi Universitas Jember, Rektor Universitas Islam Cardoba, Banyuwangi.

“Buku ini seperti cermin di tengah perjalanan Reformasi: memantulkan harapan, kegagalan, dan kegelisahan yang belum selesai. Ia mengingatkan kita bukan hanya pada janji-janji Reformasi, tetapi juga pada jarak sunyi antara cita-cita dan kenyataan. Dengan refleksi tajam dan kejernihan intelektual, penulis mengajak kita berhenti sejenak dari riuh politik untuk bertanya: ke mana arah demokrasi kita berjalan? Di tengah kabut oligarki dan letihnya etika publik, buku ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyalakan harapan bahwa masa depan Indonesia tetap layak diperjuangkan, dengan akal sehat, keberanian moral, dan kesetiaan pada cita-cita kemerdekaan.”

**Prof. Drs. Nawiyanto, Ph.D**, Guru Besar Ilmu Sejarah, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

"Buku ini mencerminkan kepekaan intelektual dalam membaca wajah politik dan kebudayaan Indonesia dengan nalar kritis. Dari refleksi atas demokrasi yang sering ingkar janji, hingga analisis mendalam tentang mentalitas bangsa dan jeratan oligarki, setiap bab menghadirkan perspektif segar, yang tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga menggugah pikiran dan harapan akan Indonesia yang lebih baik. Penulis tidak hanya mengurai fakta, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan makna di balik peristiwa, tokoh, dan simbol yang membentuk wajah kontemporer Indonesia yang seringkali penuh paradoks dan absurditas. Membaca buku ini ibarat menyalakan obor di tengah gelap, menerangi jalan menuju kesadaran baru demi mewujudkan mimpi Indonesia berkilau emas."

# #MegatRuh INDONESIA

Refleksi 25 Tahun Reformasi

Andang Subahianto

**April 2026**



# #MegatRuh INDONESIA

Refleksi 25 Tahun Reformasi

**Penulis:**

Andang Subaharianto

**Desain Cover :**

Bambang Aris Kartika

**Layouter :**

Risky Fahriza

**ISBN:** 978-623-477-328-6

**Cetakan Pertama :** April 2026

**Penerbit:**

UPA Penerbitan Universitas Jember

**Redaksi:**

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 00319

*e-mail:* [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

**Distributor Tunggal:**

UNEJ Press



Jl. Kalimantan 37  
Jember 68121  
Telp. 0331-330224, Voip. 0319  
e-mail: [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

***Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, maupun microfilm.***

## Catatan Pembuka:

### Reformasi Ingkar Janji

**E**ra Reformasi menandai babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Sejak 1998 babak baru itu dimulai. Ditandai pengunduran diri Presiden Soeharto yang memimpin pemerintahan Indonesia sejak 1966.

Disebut babak baru, karena pemerintahan pasca-Reformasi dijalankan dengan gagasan-gagasan dan tata pemerintahan yang baru, yang berbeda dengan pemerintahan Soeharto. Praktik pemerintahan Soeharto, yang juga populer dengan sebutan Orde Baru, dikritik telah gagal mengantarkan rakyat Indonesia menjumpai janji proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang secara normatif ditulis pada Pembukaan UUD 1945.

Melalui praktik otoritarianisme, Soeharto dipandang hanya memperkaya diri dan keluarga serta kroni-kroninya. Tiga hal disimpulkan terkait dengan rezim Orde Baru: korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang populer dengan singkatan KKN.

Tiga hal itu dianggap lawan bersama bangsa Indonesia. KKN dianggap sebagai sebab keterpurukan bangsa Indonesia kala itu. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang segera bangkit dan pulih dari terpaan krisis ekonomi global saat itu, Indonesia tertatih-tatih bahkan merobohkan rezim pemerintahan.

Tentu saja pengalaman pahit itu menjadi pembelajaran penting bagi bangsa Indonesia, sekaligus

tekat untuk membentuk tata pemerintahan baru yang menjanjikan masa depan Indonesia mendekati janji kemerdekaan. Karena itu, dilakukan sejumlah pembaruan kelembagaan politik dalam kerangka demokratisasi, sekaligus diharapkan terbentuk kultur politik demokrasi.

Sebagai misal, pada tahun 2004, untuk pertama kalinya, Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden-wakil presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada masa sebelumnya, pemilu hanya dilakukan untuk memilih DPR dan DPRD. Kepala daerah pun lalu dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah.

Namun, apakah perubahan kelembagaan politik yang dipraktikkan selama seperempat abad itu menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan mendekatkan bangsa Indonesia pada janji kemerdekaan? Ternyata kita gagap untuk menjawab "ya". Meski Reformasi telah berkerja 25 tahun, kita nyaris tak memiliki prasyarat yang memadai bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat, yang memastikan janji kemerdekaan terlunasi.

Perangkat keras demokrasi memang berhasil diubah, seperti kebebasan mendirikan partai politik, pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemilihan presiden dan kepala daerah langsung, tapi perangkat lunaknya masih berjiwa tiran, feodal, elitis. Demokrasi yang kita

praktikkan bukan memuliakan "demos" (rakyat), tapi justru membunuhnya, bak cerita Malin Kundang. Sejumlah perubahan kelembagaan demokrasi tak membuat rakyat berdaya secara politik.

Kita melihat korupsi semakin gila-gilaan, kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan sosial yang lebar, literasi politik yang dangkal, tradisi kritis yang lemah, etika yang luruh, biaya politik yang mahal, masyarakat sipil yang lemah, dan oligarki yang masih digdaya.

Buku ini mendiskusikan pernik-pernik isu menjelang Indonesia berusia 80 tahun, dan 25 tahun praktik Reformasi. Terdiri atas kumpulan tulisan saya yang terbit di *Kompas.com* dan *Kompas.id* pada tahun 2024 hingga 2025. Tidak semua artikel yang terbit pada tahun 2024 dan 2025 itu terpilih untuk diterbitkan ulang dalam buku kumpulan tulisan ini (artikel yang bertema Pemilihan Umum 2024 telah diterbitkan dengan judul *Jalan Terjal Etika Politik, Catatan Pilu Pemilu 2024*, Unej Press, 2024).

Saya memilih dan mempertimbangkan isi tulisan berdasarkan tema. Masing-masing tema berisi sejumlah artikel, sehingga tersusun 3 bagian di dalam buku. Bagian 1 "Politik, Kekuasaan dan Demokrasi"; Bagian 2 "Kebudayaan dan Mentalitas"; dan Bagian 3 "Korporatokrasi, Oligarki dan Korupsi".

Di setiap bagian ditaruh "artikel jangkar", artikel yang dipilih sebagai artikel utama, dan diletakkan sebagai artikel pertama di bagian tersebut. Di setiap artikel juga ada ilustrasi. Semua ilustrasi diambil utuh dari ilustrasi artikel yang diterbitkan *Kompas.com* dan *Kompas.id* yang menyertai artikel tersebut. Lalu, di akhir

artikel dicantumkan sumber artikel berupa link artikel di *Kompas.com* dan *Kompas.id*.

Buku kumpulan artikel ini diberi judul **#MegatRuh Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi**. Judul ini diambil dari salah satu judul artikel dan menjadi artikel utama pada Bagian I, sekaligus mewakili isi seluruh tulisan.

Tidak ada rumus bahwa usia bangsa dan pengalaman bernegara menjamin kualitas hidup seluruh rakyatnya. Karena itu, bangsa Indonesia tak boleh lelah dan menyerah, apapun sejarah yang pernah dilaluinya, masa depan yang terang benderang harus terus diperjuangkan dan dimenangkan.

Atas penerbitan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Pertama-tama tentu kepada *Kompas.com* dan *Kompas.id* yang telah menerbitkan artikel-artikel saya. Saya berbahagia sekali, melalui *Kompas.com* dan *Kompas.id*, gagasan-gagasan saya bisa sampai ke publik.

Siapa tahu, kalau pun tidak menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar; kalau pun tidak menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang; dan kalau pun tidak keduanya, cukuplah sebagai doa kebaikan untuk Indonesia, sebagaimana nasehat WS Rendra dalam sajak yang ditulisnya sebelum Si Burung Merak itu dipanggil Tuhan, "Hidup itu Seperti Uap".

Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada Penerbit Universitas Jember, yang bersedia memfasilitasi penerbitan ulang artikel-artikel tersebut dalam bentuk

buku kumpulan tulisan. Saya yakin kemanfaatannya semakin banyak, termasuk untuk kepentingan akademik, mengingat buku ini tidak diperdagangkan (versi cetak dicetak terbatas, versi buku elektronik bebas diakses).

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menjadi mitra diskusi, juga kepada kawan-kawan yang telah membantu menyelesaikan urusan teknis hingga buku ini terbit. Semoga buku ini bermanfaat.

Jember, 10 Februari 2025

**Andang Subahianto**

## DAFTAR ISI

<b>Catatan Pembuka:</b> .....	8
<b>Reformasi Ingkar Janji</b> .....	8
<b>Bagian 1 Politik, Kekuasaan, dan Demokrasi</b> .....	<b>16</b>
✓ MegatRuh Indonesia.....	17
✓ Memaknai Pernyataan Prabowo Soal Haus Kekuasaan.....	24
✓ Indonesia Gelap dan Kutukan Mpu Gandring....	32
✓ Jangan Sepelekan Pembangkangan Sipil .....	40
✓ Negara Pun Mengajarkan Anarki.....	48
✓ Oposisi Dilenyapkan Sejak di Dalam Pikiran.....	55
✓ Buku, Imajinasi, dan Demonstrasi.....	62
✓ Mengembalikan Supremasi MPR, untuk Apa?...	70
✓ HUT Ke-52 PDI-P dan Kado Butet .....	80
✓ Kegagalan Anies "Nyagub", Dilema PDI-P dan Tantangan Demokratisasi .....	86
✓ Cak Lontong, Dekonstruksi, dan Politik "Riang Gembira".....	95
✓ Pilkada Jakarta: Kemenangan Politik "Riang Gembira" .....	102
✓ Ketika Prabowo Tak Melanjutkan Warisan Jokowi di IKN .....	108
✓ Membaca Selebrasi Prabowo Untuk Jokowi.....	115
✓ Selamat Datang "Politik Pokok Tanpa Tokoh" (Bagian 1) .....	122
✓ Selamat Datang "Politik Pokok Tanpa Tokoh" (Bagian 2 Habis).....	129

## **Bagian 2 Kebudayaan dan Mentalitas..... 135**

- ✓ Cerlang Nusantara dan Tantangan Indonesia.. 136
- ✓ Prabowo, Tradisi Literasi dan Demokrasi ..... 145
- ✓ Badan Kita Bau Kolonial..... 153
- ✓ Bencana Ekologis dan Tradisi Menyanyikan  
"Indonesia Raya" ..... 161
- ✓ Sang Saka Berkibar di IKN dan Robohnya Surau  
Kami ..... 169
- ✓ Jejak Pramoedya dan Masa Depan Literasi  
Indonesia..... 177
- ✓ Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprpto:  
Kejujuran itu Menakutkan..... 185
- ✓ Panggil Aku Toer Saja..... 194
- ✓ Memaknai Permintaan Maaf Jokowi.....200
- ✓ Paus Fransiskus, Bung Karno, dan Penghapusan  
Ketetapan MPRS 33/1967 .....207
- ✓ Pancasila, Indonesia Raya, dan Kampus  
Berdampak.....213
- ✓ Merayakan Imlek: Mengingat Gus Dur dan  
Megawati.....222
- ✓ Sukacita Mudik Terusik: Ada Apa Pasca-Lebaran?  
.....228
- ✓ Hari Anak Nasional, Anak-anak Mandalika, dan  
Keteladanan Mentalitas .....237
- ✓ Dokter Asing dan Penyakit Tak Percaya Diri.....243

## **Bagian 3 Korporatokrasi, Oligarki dan Korupsi .....249**

- ✓ Bung Karno, Korporatokrasi, dan Eko-  
Marhaenisme .....250
- ✓ Kesaktian Pancasila Menurut AI.....258

✓ One Piece dan Paradoks Indonesia.....	265
✓ Menguji Prabowo: Indonesia Mau ke Mana? ...	273
✓ Paham “Ngedan”: Penghalang Ideologis Prabowo .....	279
✓ Dilema Prabowo Membawa Orang “Toxic” .....	290
✓ Noel, Mentalitas Korup, dan Indonesia Sold Out .....	298
✓ Nadiem Terjerembap.....	304
✓ Kode(logi) Korupsi .....	309
✓ MBG Makin Horor.....	315
<b>Catatan Penutup:</b> .....	322
<b>Saatnya Memuliakan Pokok, Bukan Tokoh</b> .....	322
<b>Biodata Penulis</b> .....	329

# **B**agian 1

## **Politik, Kekuasaan, dan Demokrasi**

## MegatRuh Indonesia



Suara dan keinginan masyarakat agar korupsi bisa diberantas tercermin dalam mural yang menghiasi tembok di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (27/8/2023). (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

**D**alam khasanah kebudayaan Jawa, “megatruh” dikenal sebagai komposisi tembang macapat. Biasanya dipakai untuk melukiskan suasana sedih, kesendirian, atau perpisahan, terutama karena peristiwa kematian. “Megatruh” artinya memutus ruh (dari kata “megat” dan “ruh”).

WS Rendra, dramawan dan penyair legendaris Indonesia, pernah menggunakannya sebagai judul pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, 10 November 1997. Persis saat Indonesia di ujung pemerintahan Presiden Soeharto.

Waktu itu Indonesia dalam situasi genting. Krisis ekonomi berujung krisis politik. Dan, persis 21 Mei 1998

Soeharto mengundurkan diri dari jabatan yang telah didudukinya selama 32 tahun. Si Burung Merak – julukan populer Rendra – menyebut suasana dukacita yang mendalam. Bukan suasana perasaan semata, tetapi suasana ruh yang putus dan berada dalam alam kelam.

Pidato WS Rendra itu seperti baru saja diucapkan. Memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia, bukan suasana sukacita penuh optimisme, melainkan justru suasana sedih, prihatin, dukacita yang mendalam: suasana ruh yang terputus. Begitu banyak peristiwa yang membawa kita dalam suasana seperti itu.

## **Absurditas**

Indonesia terjebak dalam absurditas yang tak berkesudahan. Saya hendak merujuk beberapa peristiwa saja.

Korupsi di negeri ini sungguh absurd. Dilakukan secara ugal-ugalan oleh pembesar negeri. Bahkan, pembesar di bidang penegakan hukum, dan di wilayah sakral, seperti korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

Juga aneh, absurd, bagaimana bisa Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara punya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana CSR itu diduga dikorupsi dan melibatkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.

Demikian pula penggarongan kekayaan negeri. Sungguh absurd, karena melibatkan pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kalangan cerdik pandai serta elite lain. Akibatnya pun dahsyat sekali – meminjam

Presiden Prabowo Subianto – paradoks Indonesia: negeri kaya raya tapi sebagian besar rakyatnya miskin.

Juga soal keadilan sosial. Kalangan elite pesta pora kesejahteraan dan kemewahan, sementara rakyat pada umumnya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimum. "Mencari rezeki di tempat gelap saja susah, apalagi di tempat terang," demikian tesisnya. Dan, tesis ini cukup menjelaskan mengapa fenomena "judol" marak di kalangan bawah.

Yang ini sederhana sekali, yakni soal polemik keaslian ijazah Joko Widodo (Jokowi), presiden ke-7 Republik Indonesia. Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai warga negara mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi. Tentu Jokowi dalam kapasitas sebagai pejabat publik, penyelenggara negara. Ternyata, Jokowi tidak memilih jalan sederhana untuk menjawabnya. Ia menempuh jalan melingkar, berbelit-belit, sehingga terkesan ada yang disembunyikan.

Sungguh absurd, urusan yang sangat sederhana, tapi harus menguras sebagian energi anak bangsa. Bahkan, mempertaruhkan kewibawaan institusi kepolisian dan nama baik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kita benar-benar dikepung absurditas. Kemuliaan, keutamaan dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama, filsafat, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal berbenturan dengan kenyataan hidup yang penuh dengan penderitaan, ketidakpastian, keputusasaan.

Suasana sedih, dukacita, menyelimuti bangsa Indonesia. Ternyata, di usia 80 tahun kemerdekaan

Indonesia, anak-anak muda malah menginterupsi pemimpinnya dengan menyatakan “Indonesia Gelap”, “Indonesia Cemas” dan berseru “Kabur Aja Dulu”. Ada pula yang menginterupsi dengan mengibarkan bendera One Piece di sela-sela bendera Merah Putih. Sebuah kritik simbolik dan tak boleh dianggap angin lalu.

## **Daulat rakyat**

Si Burung Merak pada Pidato Kebudayaan 1997 mengkritik keras pemimpin negeri ini. Menurut Rendra, mereka tak pernah sungguh-sungguh memikirkan dan memperjuangkan daulat rakyat dengan didukung daulat hukum. Sejak dari zaman raja-raja.

Saat Aristoteles, filsuf Yunani (384-322 SM), menerangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, dan tidak membenarkan adanya tirani kekuasaan, pemimpin kita masih hidup dalam kegelapan sejarah.

Sewaktu John Locke, filsuf dan sastrawan Inggris, menulis esai tentang pemerintahan yang ideal, yang menghormati hak warga negara dan berkewajiban melindungi segala milik warga negara, Mataram sedang dipimpin Amangkurat II. Ia memerintah dengan sewenang-wenang, arogan. Ia membunuh ayahnya sendiri demi kekuasaan.

Penguasa yang melecehkan daulat rakyat, menurut Rendra, akhirnya juga melecehkan daulatnya sendiri. Sebab, daulat rakyat lah yang mendukung daulat penguasa. Sebagaimana daulat rakyat Inggris yang memungkinkan daulat raja Inggris bergema di seluruh dunia.

Di negeri ini, penguasa tak pernah memikirkan hak-hak rakyat, apalagi mengakui. Hukum bagi rakyat adalah sabda raja. Sebagaimana hukum alam, yang kuat adalah yang menang, tatanan masyarakat leluhur kita pun berlandaskan hukum alam.

Yang kuat adalah yang benar. Yang terkuat tentu saja raja. Jadi, sabda raja menjadi sumber kebenaran, sumber hukum. Raja berganti-ganti, tapi daulat rakyat tak pernah dipikirkan, apalagi diperjuangkan.

Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pada hakekatnya adalah imajinasi yang menjadi kenyataan. Saat Indonesia dipercekapkan pada Kongres Pemuda 1928, statusnya benar-benar imajinasi. Ia hasil rekaan para pemuda terpelajar melalui kekuatan intelektual, akal sehat.

Melalui kekuatan intelektual, kaum terpelajar menemukan titik krusial tatanan masyarakat warisan leluhur yang bercumbu dengan sistem kolonialisme. Tatanan leluhur yang mengabaikan daulat rakyat dimanfaatkan penguasa kolonial untuk mengokohkan penjajahan.

Karena itu, Indonesia dikonstruksikan oleh kaum terpelajar sebagai negara modern dengan memuliakan daulat rakyat. Dan, sebagai negara modern, pemuliaan daulat rakyat dikukuhkan secara tertulis dalam wujud konstitusi (UUD 1945).

Namun, kekuatan intelektual yang membidani Indonesia, pelan tapi pasti, mengalami kemunduran peran. Indonesia yang semula diasuh oleh kekuatan akal

pelan-pelan bergeser diasuh kembali oleh kekuatan otot.

Perbedaan dianggap ancaman. Bukan diselesaikan melalui percakapan yang didasarkan pada kekuatan pikiran, melainkan melalui paksaan, tekanan, intimidasi, kriminalisasi. Indonesia kembali pada daulat penguasa: siapa yang berkuasa, dialah yang benar dan menang.

Pidato WS Rendra pada 10 November 1997 bagaikan “anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Soeharto memang tumbang, tapi pemerintahan reformasi tak berdaya juga mengembalikan ruh daulat rakyat yang terputus.

Suasana menyedihkan, dukacita, sebagaimana dirasakan WS Rendra dalam pidato yang berjudul “Megatruh”, juga bisa kita rasakan menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Bukan hanya banyak peristiwa absurd, tapi juga pemimpin absurd.

Mereka adalah pemimpin yang kehilangan keautentikannya, karena tak mengenali sejarah bangsanya. Mereka, para pemimpin absurd, memutus ruh kepemimpinan Indonesia yang memuliakan daulat rakyat dan menggantikannya dengan daulat penguasa.

Ucapan dan tindakannya suka menyakiti dan merendahkan rakyat. Terkesan tak dibimbing akal sehat, pikiran waras. Contoh yang masih hangat terjadi di Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo yang baru saja menjabat akhirnya dituntut mundur oleh rakyatnya, karena kebijakan dan tutur katanya yang arogan, menyakiti dan merendahkan rakyat.

Suasana “megatruh” itu bukan cuma menyedihkan, tapi juga menggelisahkan, mencemaskan. Kita sulit membayangkan Indonesia akan sampai pada sebutan “Indonesia Emas” pada 2045, tatkala para pemimpin memutus ruh daulat rakyat dalam praktik kepemimpinannya. Sebaliknya, bayangan disintegrasi tampak lebih terang.

Saya teringat pernyataan mengehokan yang disampaikan Prabowo pada 2018, menjelang kompetisi Pemilihan Presiden 2019. Ia menyampaikan prediksi bahwa Indonesia bakal bubar pada 2030. Waktu itu Prabowo dianggap “ngacau”, menyampaikan prediksi dengan merujuk novel *Ghost Fleet* karya Peter Warren Singer dan August Cole.

Benar, *Ghost Fleet* adalah karya fiksi, hanya imajinasi. Namun, bukankah Indonesia pada 1928 juga fiksi? Dan, karya imajinatif kaum muda itu akhirnya menjadi kenyataan pada 17 Agustus 1945.

Tentu saja kita tidak mau, prediksi Prabowo itu terbukti. Kita tak mau, novel *Ghost Fleet* yang imajinatif itu menjadi kenyataan, akibat ulah pemimpin yang memutus ruh daulat rakyat yang ditiupkan para pendiri bangsa. Kita juga tak mau, kelak Presiden Prabowo disalahkan, karena prediksinya terbukti.

Namun, sejarah selalu berisi teka-teki. Dari pergumulan antara yang faktual dan imajinatif, antara yang nyata dan yang diinginkan. Dan, sejarah ternyata memiliki maunya sendiri.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/08100041/-megatruh-indonesia>

## Memaknai Pernyataan Prabowo Soal Haus Kekuasaan



Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah) menyapa tamu undangan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (ANTARA

FOTO/Aditya Pradana Putra)

**P**residen terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan menarik. Ia mengatakan bahwa pihak yang terlalu haus kekuasaan, yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, berpotensi mengganggu dan merugikan bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat berpidato pada penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Sabtu malam, 24 Agustus 2024.

Tak ada yang membantah kebenaran isi pernyataan. Yang menarik, pernyataan itu disampaikan oleh seseorang yang tak lama lagi akan memegang kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia.

Maka, buat saya, pernyataan Prabowo itu hipotesis untuk dirinya. Apakah Prabowo kelak tak akan haus kekuasaan dan menggunakan segala cara untuk melanggengkannya? Apakah kelak kekuasaan tak dibeli dan diatur-aturlah untuk kepentingan di luar kepentingan rakyat?

Sejarahlah yang tahu pasti jawabannya. Bisa jadi, pernyataan Prabowo itu sekadar pengetahuan teoritis yang indah dipidatikan, bisa pula pengetahuan praksis yang kelak menuntun tindakannya sebagai pemimpin tertinggi bangsa Indonesia.

Hipotesis itu akan menguji Prabowo. Namun, sesungguhnya juga berisi harapan. Rakyat tentu saja menginginkan presiden yang tak haus kekuasaan. Rakyat mendambakan presiden yang mengelola kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional dan beradab untuk kepentingan rakyat.

Hipotesis yang sekaligus harapan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sangat butuh pengawalan dari masyarakat sipil pada umumnya.

## **Skeptisisme**

Kita mesti terus mengawal pembuktian hipotesis itu dengan skeptisisme (skeptis-kritis). Sejarah mengajarkan, retorika politik yang merdu didengar tak selalu berakhir menyenangkan.

Dulu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai kekuasaannya dengan retorika menawan, yang membuat sebagian besar masyarakat bertepuk tangan dengan penuh optimisme. Jokowi menawarkan revolusi mental, dan itu cocok sekali dengan tampilannya yang bersahaja, baik dirinya maupun keluarganya.

Kini, menjelang masa akhir kekuasaannya, kita merasa dikelabui. Retorika dan tampilan Jokowi beserta keluarganya tak lagi mengundang decak kagum, sebaliknya mengecewakan.

Jokowi juga tak bisa lepas tangan dari carut-marut perpolitikan nasional di periode kedua jabatannya. Meski kata-katanya selalu menepis tuduhan cawe-cawe atas carut-marut tersebut.

Terbaru, masih hangat situasinya, rencana DPR mengesahkan hasil revisi UU Pilkada dengan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 22 Agustus 2024. Badan Legislasi (Baleg) DPR tiba-tiba menggebu-gebu untuk merevisi UU Pilkada sehari setelah MK membacakan putusan.

Ada dua substansi putusan MK. *Pertama*, MK memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah 30 tahun untuk gubernur-wakilnya serta 25 tahun untuk bupati-wakilnya dan wali kota-wakilnya.

Titik penghitungan usia minimal dilakukan sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan saat pelantikan seperti putusan Mahkamah Agung, 29 Mei 2024.

Putusan itu tentu saja merugikan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang sudah siap-siap

mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Keinginan berkuasa di tingkat provinsi kandas. Kaesang terkendala umur berdasarkan putusan MK. Padahal, sejumlah partai sudah mendeklarasikan dukungan.

*Kedua*, putusan terkait ambang batas partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon. Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Syarat pencalonan diselaraskan dengan persentase dukungan calon perseorangan di setiap daerah. Bukan lagi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu anggota DPRD.

Putusan tersebut sesungguhnya menguntungkan partai politik, karena memberi peluang partai memunculkan calon kepala daerah tanpa perlu repot-repot mencari koalisi. Namun, aneh, partai politik yang ada di Baleg DPR (kecuali PDI-Perjuangan) malah menolaknya. Ada apa?

Rakyat marah, lalu melawan akal-akalan DPR itu melalui aksi massa di sejumlah titik di seluruh Indonesia. DPR dianggap hendak membegal konstitusi.

Berkat tekanan rakyat dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, DPR mengurungkan pengesahan hasil revisi itu. Pemerintah dan KPU pun akhirnya tunduk pada putusan MK.

Namun, menurut saya, Jokowi tak bisa lepas tangan. Ia punya andil sangat besar terhadap peristiwa politik tersebut. Boleh jadi, pernyataan Prabowo itu pun ditujukan pada situasi politik mutakhir tersebut.

## **Kontroversial**

Belajar dari sejarah, skeptisisme patut ditumbuhkan terus kepada penguasa, tak terkecuali Prabowo Subianto yang sebentar lagi menggantikan Jokowi sebagai presiden. Ketokohan Prabowo tak diragukan, tapi sebagian dijalani secara kontroversial.

Prabowo mengawali karier militernya dengan cemerlang, tapi mengakhirinya dengan tragis. Prabowo diberhentikan dari kedinasan militer (1998), dari jabatan Panglima Kostrad yang baru beberapa bulan disandanginya.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memutuskan Prabowo bersalah. Ia dinilai telah melakukan tindakan ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain.

Prabowo diduga terlibat penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997 sampai 1998. Periode genting secara politik menjelang Presiden Soeharto lengser.

Namun, faktanya Prabowo tidak hilang dari sejarah. Putra begawan ekonomi Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo itu memilih "alih-jalan" perjuangan, dari jalan militer ke jalan politik.

Di jalan politik pun kontroversi Prabowo tak putus-putus. Masa lalunya yang cemerlang dan tragis timbul-tenggelam.

Faktanya, Prabowo pernah dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden (cawapres) saat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Prabowo lalu maju sendiri sebagai calon presiden

(capres) berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selanjutnya, Prabowo menantang kembali Jokowi pada Pilpres 2019. Meski kalah tiga kali berturut-turut (sekali sebagai cawapres dan dua kali sebagai capres), Prabowo tak juga mundur dari gelanggang politik.

Prabowo memilih "alih-strategi". Dari semula melawan Jokowi berubah berkawan dengan Jokowi. Alih-strategi Prabowo sukses. Berkah politis pun dituai. Prabowo berhasil memenangi Pilpres 2024 dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden.

Kini, Prabowo tinggal menunggu pelantikan. Meski jalan yang dilaluinya kontroversial, dikecam banyak kalangan, dan menimbulkan kegaduhan politik yang relatif hebat.

Jalan yang dilalui Prabowo dianggap menabrak aturan dan kepatutan (etika), karena harus ada rekayasa hukum melalui putusan MK. Berkat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Gibran yang semula tidak memenuhi syarat, akhirnya memenuhi syarat.

Publik pun mengecam keras Jokowi. Ia dianggap menodainya sendiri jejak baik – disebut pula "role model" kepemimpinan politik – yang telah ditorehkannya dalam sejarah politik Indonesia. Ada pula yang menyebut Jokowi bagaikan Malin Kundang.

Jokowi juga dianggap menumbuhkan kembali nepotisme dan politik dinasti. Dianggap pula menggunakan kekuasaan untuk kemenangan Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya.

Benar, Prabowo memang tinggal menghitung hari untuk secara sah bertindak sebagai presiden Indonesia. Namun, jejak kontroversinya tak sertamerta hilang begitu saja, sebagaimana sejarah juga tak menghilangkan peran dan ketokohnya.

## **Diuji**

Karena itu, buat saya, Prabowo akan diuji oleh pernyataannya sendiri.

Jejak kontroversi Prabowo dengan sendirinya meragukan bahwa Prabowo tak akan haus kekuasaan. Jejak itu dengan gampang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berpotensi jatuh pada otoritarianisme.

Kepemimpinan Prabowo akan rentan terhadap godaan kesewenang-wenangan, kepemimpinan otoriter, dan antikritik. Rentan pula terhadap penggunaan cara-cara yang tak patut untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun, menurut hemat saya, jejak kontroversi Prabowo berpotensi pula sebaliknya. Jejak kontroversi itu juga potensial membuahkan perubahan besar dari pesimisme menjadi optimisme tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Apakah Prabowo akan lulus ujian itu? Mana yang akan dilaluinya?

Lagi-lagi sejarahlah yang bisa menjawab. Namun, menurut hemat saya, rakyat harus terus mengawal dan mengawasinya agar Prabowo tak menyontek pihak yang disebut haus kekuasaan pada pidato malam itu.

“Perubahan besar membutuhkan perjuangan besar,” demikian Prabowo menuliskan keyakinannya pada buku berjudul *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman* (PT Media Pandu Bangsa, 2022). Wahai Presiden, buktikan! Indonesia menunggu perjuangan besar itu.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/27/06154941/memaknai-pernyataan-prabowo-soal-haus-kekuasaan>

## Indonesia Gelap dan Kutukan Mpu Gandring



*Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 melambat (SHUTTERSTOCK)*

**G**enerasi cicit (buyut) Wage Rudolf (WR) Soepratman tiba-tiba menginterupsi laju Indonesia dengan menyerukan tesis “Indonesia Gelap”. Persis menjelang (tiga tahun lagi) satu abad seruan “Indonesia Raya” oleh kakek-buyut mereka, WR Soepratman dan kawan-kawan.

Sayang sekali, orangtua mereka yang kini sedang berkuasa menanggapi dengan pongah. “Kau yang gelap, bukan Indonesia,” kata seorang petinggi negara. Ada juga yang bilang, “Silakan kabur, kalau perlu jangan kembali.”

Yang lebih mengejutkan dan memprihatinkan, ada umpatan yang sangat tidak pantas: “endhasmu”. Secara antropolinguistik, kata “endhasmu” (bahasa Jawa)

mengekspresikan kejengkelan, kemarahan, sinisme, yang disertai perasaan tak hormat dan cenderung merendahkan, mengejek.

Meskipun secara leksikal memiliki referensi yang sama dengan kata "kepalamu" (bahasa Indonesia), karena aspek antropolinguistik, kata "endhasmu" tak bisa digantikan oleh kata "kepalamu". Kata "endhasmu" memisahkan subjek tutur secara tak hormat.

Tesis "Indonesia Gelap" tak akan terbantahkan dengan kepongahan. Tak akan berubah dengan umpatan. Ia hanya bisa digugurkan dengan bukti-bukti.

Untuk memahami interupsi para cicit WR Soepratman, saya memulai dengan membaca tesis "Indonesia Raya". Ditulis oleh WR Soepratman dalam lirik lagu yang kelak diterima sebagai lagu kebangsaan.

"Indonesia Raya" terdiri atas tiga stanza. Namun, sangat jarang dinyanyikan secara penuh tiga stanza. Hanya stanza pertama yang sering dinyanyikan. Teks lengkap bisa ditanyakan kepada Google.

## **Arus balik**

Tesis "Indonesia Raya" dibangun di atas reruntuhan kejayaan Nusantara masa silam. Pramoedya Ananta Toer menuturkannya dengan sangat menarik di bukunya yang berjudul *Arus Balik*.

Nusantara pernah gilang-gemilang. Tatkala menjadi kesatuan maritim di bawah Majapahit, kerajaan laut terbesar di bumi. "Terbesar pula kapal-kapalnya. Juga bandar-bandarnya," tutur Pram.

Di masa kejayaan Nusantara itulah arus bergerak dari bumi Selatan ke Utara. Kapal-kapalnya, manusianya, peradabannya. Juga cita-citanya. Semua bergerak dari Nusantara di bagian Selatan ke bumi bagian Utara.

Lalu, terjadi arus balik. Utara terus-menerus menyerbu Selatan. Dengan kapal-kapalnya yang lebih besar. Utara lalu menguasai jalur rempah. Menguasai pula urat nadi kehidupan dan hasil buminya. Lalu, menjajah orang-orangnya.

Utara makmur. Nusantara hancur, terpecah-pecah. Pun jiwa, karakter, dan mental orang-orangnya: orang kalah, orang terjajah. "Kapal kita makin lama makin kecil. Seperti kerajaannya. Kapal besar hanya bisa dibuat oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara..." seru Pram melalui Wiranggaleng, tokoh di *Arus Balik*.

WR Soepratman dan kawan-kawan membaca reruntuhan Nusantara dengan kesadaran kritis penuh idealisme anak muda. Masa lalu disadari secara kritis, masa kini (zamannya) dibaca secara kritis pula, lalu masa depan dirumuskan secara visioner dan diikat dengan komitmen. "Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi," kata WR Soepratman.

Sungguh agung. Berisi kesadaran eksistensial sebuah komunitas kebangsaan yang bersatu dan berdaulat dengan jiwa merdeka. Disadari pula tentang potensi objektif-subjektifnya. Juga ditegaskan tentang kejayaan dan kebahagiaan masa depan. Dengan lantang mereka menyebut "Indonesia Raya".

Dengan demikian, tesis "Indonesia Raya" tegas menyerukan rekonstruksi. Bukan hanya kelembagaan dan tata kehidupan sebagai negara modern, tapi yang utama justru kultur dan mentalitas.

Tak ada guna bentuk negara demokrasi modern, tapi jiwanya tetap kolonialis, feodalis. Kata WR Soepratman, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya." Namun, tiba-tiba generasi buyut WR Soepratman menginterupsinya. Mereka berteriak lantang meragukan komitmen dan janji yang selalu diulang-ulang setiap "Indonesia Raya" dikumandangkan. Komitmen dan janji itu tak berjejak di sanubari, terkhusus para pemimpin, para pengambil keputusan negara.

Tak ada Indonesia bersatu, bahagia, dan abadi secara hakiki. Semuanya semu belaka. Bukan "Raya" yang kini dijumpai, melainkan "Gelap". Negeri dan pandunya bukan maju, melainkan terpuruk. Rakyat dan putranya bukan selamat, melainkan sekarat. Teramat banyak peristiwa dan hal lain yang membuat buyut WR Soepratman itu meragukan komitmen dan janji para pemimpin, para petinggi negara. Mereka mencium bau pengkhianatan di sana.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa suatu orde pemerintahan runtuh gara-gara kepongahan pemimpinnya. Korupsi, kolusi, nepotisme sengaja dipelihara, dibiarkan tumbuh subur. Tapi, kemudian mencekiknya. Bak keris Mpu Gandring, ia menghabisi tuannya.

Orde pemerintahan berganti, tapi korupsi, kolusi, nepotisme tak juga berhenti. Mereka malah

merayakannya, memujanya. Korupsi, kolusi, nepotisme dibuatkan dalil pembenarannya. Etika, kepatutan, keadilan sosial, dan sejenisnya diabaikan.

Bila dulu korupsi dikaitkan dengan pendapatan aparat birokrasi yang rendah, kini teori itu sudah usang. Korupsi yang dilakukan dengan menyandera negara (*state capture corruption*) tak mungkin dilakukan oleh pegawai rendahan. Korupsi jenis ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa, pemodal, dan orang-orang berpendidikan tinggi.

Nilainya pun bukan puluhan atau ratusan juta rupiah, melainkan triliunan rupiah. Misalnya, korupsi tata niaga timah yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Kerugian negara pada tata niaga minyak di Pertamina yang lagi heboh diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023, dengan total akumulasi selama lima tahun mendekati Rp 1 kuadriliun (*Kompas.com*, 27/02/2025).

Sehari-hari para buyut WR Soepratman itu menyaksikan fenomena korupsi, kolusi, nepotisme secara telanjang. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tak pernah membanggakan. Penegak hukum pun sering tersandung kasus korupsi.

Bahkan, sebuah organisasi dunia akhirnya menobatkan presiden ke-7 Indonesia sebagai finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Sungguh menampar muka bangsa Indonesia.

Sementara itu, para buyut WR Soepratman itu juga menyaksikan secara terang-benderang kesulitan hidup rakyat kecil. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial menjadi

tontonan sehari-hari. Rakyat kecil hanya ditampilkan secara heroik di podium, di atas kertas. Rakyat kecil belum menjadi pemenang di lapangan.

### **Kritik historis**

Karena itu, saya membaca, tesis “Indonesia Gelap” merefleksikan kritik historis. Ia mengingatkan sekaligus menyerukan penyadaran bersejarah bagi para pemimpin bangsa, para pejabat negara.

Tesis itu menginterupsi dan menerangkan bahwa perjalanan menuju “Raya” yang diimajinasikan para pendiri bangsa sedang menemui halangan berat. Karena halangan berat itulah Indonesia tampak “gelap”.

Halangan berat itu sesungguhnya tak pernah berubah sejak Indonesia berdiri, yakni korupsi, kolusi, nepotisme. Ketiga hal ini bersarang pada jiwa, lalu manifes dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan dan perilaku para penyelenggara negara. Kesewenangan lalu dimaklumi, dicarikan pembenarannya. Sumpah serapah, intimidasi, dan segala bentuk represi dilakukan kepada pihak-pihak yang kritis, yang berpandangan lain.

Contoh paling anyar dialami lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band punk Sukatani. Lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” dinilai mengganggu kepolisian. Lagu tersebut sempat ditarik dari peredaran dan Sukatani meminta maaf.

Pameran perupa Yos Suprpto di Galeri Nasional tiba-tiba dibatalkan pada pertengahan Desember 2024. Para undangan yang sudah hadir dalam pembukaan,

tidak bisa memasuki gedung pameran karena digembok pihak Galeri Nasional.

Ternyata rentetan represi terhadap seniman kritis belum selesai. Lukisan berjudul "Tikus Garuda" karya Rokhyat yang sedang dipamerkan di Badri Gallery Banjarmasin, diturunkan oleh pemilik galerinya sendiri (*Kompas.id*, 24/02/2025).

Sungguh berbahaya, halangan berat itu terbukti melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi-misi bernegara yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945 makin menjauh dari kenyataan.

Presiden Prabowo menyebutnya "paradoks Indonesia". Negeri kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Sayang sekali, Pak Presiden masih sebatas beretorika. Halangan besar yang membuat "paradoks Indonesia", yang membuat sebutan "Raya" tak kunjung nyata, belum ia tundukkan.

Sejarah tak pernah lupa dan selalu memanggil kaum muda terpelajar idealis pada saat yang tepat. Sejarah selalu menugasi para mahasiswa untuk menginterupsi zamannya tatkala kalangan lain hanya diam, atau didiamkan. Sejarah juga menyediakan ruang belajar berbangsa dan bernegara. Tinggal mau belajar sisi gelapnya atau terangnya.

Tumapel mengajarkan kutukan Mpu Gandring. Keris bikinannya dikutuk akan merenggut nyawa Ken Arok sendiri dan turunannya, karena ambisi kekuasaan yang meluap-luap, pongah, dan penuh keculasan. Ken Arok menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

Namun, kekuasaannya berakhir tragis oleh keris yang dipakainya merebut kekuasaan.

Saya mengamini tesis "Indonesia Gelap". Tugas pemerintah meruntuhkan tesis itu dengan bukti-bukti. Sangkal lah dengan logika materiil yang sah. Bukan dengan umpatan.

**Sumber:**

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/28/054257165/indonesia-gelap-dan-kutukan-mpu-gandring>

## Jangan Sepelekan Pembangkangan Sipil



Sejumlah massa melakukan aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

**B**eberapa hari lalu saya menulis gejala krisis keteladanan bernegara para penyelenggara negara di kolom ini (baca: “Sang Saka Berkibar di IKN dan Robohnya Surau Kami”, *Kompas.com*, 19/08/2024).

Kini makin jelas tanda-tanda “robohnya republik kami”. Mari kita baca rangkaian peristiwa sepekan ini.

### **Tanda-tanda makin jelas**

Ada relasi intertekstualitas yang membentuk tanda dan makna di balik rangkaian peristiwa berikut ini.

Senin pagi, 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga menteri di ujung masa jabatannya. Satu di antaranya Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly (PDI-Perjuangan).

Sebelumnya, 10 Agustus 2024, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sungguh aneh, ketua umum partai besar mundur pada saat kepemimpinannya dianggap sukses. Ada apa?

Lanjut Rapimnas, lalu Munas XI Golkar, 20-21 Agustus 2024. Terpilihlah secara aklamasi orang yang dikenal dekat dengan Jokowi, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Bahlil termasuk menteri yang dilantik pada 19 Agustus 2024, menggantikan Arifin Tasrif. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Saat pidato perdana usai terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil menyebut "Raja Jawa". Bahlil meminta para kader Golkar tidak bermain-main dengan "Raja Jawa". "Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," ujar Bahlil (*Kompas.com*, 21/08/2024).

Entah apa yang hendak disampaikan Bahlil, sayang, Bahlil tak menjelaskan siapa sesungguhnya yang dimaksud "Raja Jawa". Namun, membaca konteksnya, bisa diduga "Raja Jawa" yang dimaksud adalah Presiden Jokowi.

Pada hari itu juga, Selasa, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan dua putusan syarat pencalonan kepala daerah. Pertama, MK memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah 30 tahun untuk gubernur-wakilnya serta 25 tahun untuk bupati-wakilnya dan wali kota-wakilnya. MK menyatakan, titik penghitungan usia minimal dilakukan sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan saat pelantikan seperti putusan Mahkamah Agung, 29 Mei 2024.

Putusan itu menutup peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur karena terkendala umur. Padahal, sejumlah partai sudah mendeklarasikan dukungannya.

Putusan kedua, terkait dengan ambang batas partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon. Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada, yakni parpol pemilik kursi DPRD hanya dapat mengajukan calon kepala daerah jika memenuhi syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara sah di pemilu anggota DPRD dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

MK menyatakan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselaraskan dengan persentase dukungan calon perseorangan di setiap daerah. Putusan ini memberi peluang munculnya calon-calon baru, yang sebelumnya terkunci oleh strategi "borong partai". Solusi atas kemungkinan pilkada hanya diikuti satu pasang calon melawan kotak kosong.

Lalu, yang menggemparkan, sehari berikutnya, Rabu, 21 Agustus 2024, tiba-tiba Badan Legislasi (Baleg)

DPR begitu bersemangat menggelar Rapat Panja Revisi UU Pilkada secara kilat. Dalam rapat selama tujuh jam, Baleg DPR (semua fraksi minus PDI-Perjuangan) menyetujui menggunakan putusan MA sebagai dasar penghitungan usia calon kepala daerah dan mengubah Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada menjadi tak sesuai putusan MK.

Baleg DPR pun bersepakat menghidupkan kembali ketentuan ambang batas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Ketentuan yang dibuat MK dikhususkan untuk partai politik yang tak memperoleh kursi DPRD.

Persetujuan Baleg DPR itu membuka kembali peluang Kaesang Pangarep. Juga mengunci kembali pintu munculnya calon-calon baru. Lalu, Kamis, 22 Agustus 2024, digelar sidang paripurna untuk mengesahkan hasil Baleg DPR itu. Namun, sidang ditunda dengan alasan tidak kuorum.

Sementara itu, di sekitar Gedung DPR dan MK serta di sejumlah kota berlangsung aksi massa menolak rencana DPR mengesahkan UU Pilkada hasil revisi yang tak sesuai putusan MK. Unggahan Garuda biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" bertebaran di berbagai platform media sosial. Tak hanya itu, unggahan tersebut juga banyak disertai tagar #KawalPutusanMK dan #Kawaldemokrasi.

KPU pada 27 Agustus 2024 akan memulai pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Di sejumlah daerah kemungkinan hanya akan diikuti satu pasang calon

(melawan kotak kosong), bila aturan tidak diubah sebagaimana putusan MK. Maka, semua harus selesai sebelum 27 Agustus 2024, baik aturan, orang maupun urusan partai pengusung. Sampai 27 Agustus 2024 akan menjadi hari-hari krusial, baik KPU maupun partai politik pascaputusan MK Selasa lalu.

Ternyata pemerintah (melalui Mendagri dan Menkumham) mengamini keputusan Baleg DPR. Tak ada perlawanan, bahkan ikut menyetujui rancangan UU Pilkada yang tak sesuai putusan MK (*Kompas.com*, 22/08/2024).

Sikap pemerintah itu seiring dengan Jokowi. Ia mengisyaratkan bakal menjalankan undang-undang yang telah disepakati bersama DPR. Jokowi mengajak semua pihak menghormati apa pun keputusan yang dibuat oleh masing-masing lembaga (yudikatif dan legislatif). "Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," ujar Jokowi dalam video pernyataan yang diunggah di YouTube resmi Sekretariat Presiden (*Kompas.com*, 22/08/2024).

Kamis petang, KPU menyatakan akan mengikuti putusan MK. Sementara itu, pemerintah akan mengikuti putusan MK bila sampai 27 Agustus tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada (*Kompas.com*, 22/08/2024). Entahlah, apakah benar tak akan ada pengesahan UU Pilkada sebelum 27 Agustus 2024, yang pasti Menkumham yang bertugas mengundang peraturan sudah berganti. Bukan lagi kader PDI-Perjuangan.

Jelas sekali relasi antarperistiwa, apa makna dan arah tujuannya. Yang bukan pakar politik pun bisa membacanya. Ibarat catur, setiap langkah diperhitungkan dan diatur rapi. Yang kira-kira akan menjadi faktor penghambat harus disingkirkan terlebih dulu. Tujuan harus tercapai. Yang tidak mau mendukung dilarang menghambat.

Tentu saja publik marah dan mengecam keras akal-akalan DPR dengan dalih pembuat undang-undang. DPR dinilai mengabaikan prinsip bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, tak bisa dikoreksi oleh lembaga apapun. DPR dianggap hendak membajak konstitusi demi kepentingan tertentu yang bertabrakan dengan hukum dan kepatutan.

Sementara itu, publik melihat putusan MK memberikan angin segar bagi demokrasi. Sekaligus mengembalikan kepercayaan terhadap MK pascaputusan kontroversial yang mengubah syarat calon presiden-wakilnya, yang membuat Gibran Rakabuming Raka melenggang pada Pemilihan Presiden 2024 dan terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Publik sadar, Indonesia dibangun dengan semangat kedaulatan rakyat demi kesejahteraan rakyat. Bukan semangat oligarki, kolusi dan nepotisme yang bertolak belakang dengan apa yang diwariskan para pendiri bangsa.

Hukum dibuat untuk melindungi rakyat dan kepentingan-kepentingannya. Hukum bukan untuk menyandera negara demi kepentingan sendiri, keluarga

dan kroninya. Yang tampak dari para elite politik penjaga negara, tak ada kesadaran transformatif terhadap Pancasila sebagai landasan bernegara, yang satu di antaranya memastikan pemilu (sebagai pilar demokrasi) dilaksanakan untuk kedaulatan rakyat. Demokrasi wajib dijalankan untuk kesejahteraan rakyat.

Yang muncul justru sebaliknya, semangat kolusi untuk menyandera negara demi kepentingan sendiri. Semangat semau-maunya sendiri dalam mengelola kekuasaan, mengotak-atik aturan demi kepentingan sendiri. Tanda-tanda "robohnya republik kami" makin jelas.

## **Pembangkangan sipil**

Saya lalu teringat Hannah Arendt (1970). Ia mengingatkan, tatkala hukum dan konstitusi dilanggar oleh penguasa, rakyat memiliki hak untuk melawan pelanggaran tersebut. Aksi massa sejumlah kalangan pada Kamis kemarin dan membuat sejumlah pihak berubah sikap membuktikan peringatan Arendt.

Namun, jangan sepelekan pembangkangan sipil dalam bentuk perlawanan sehari-hari. James C. Scott (1985) mengingatkan, perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) muncul sebagai reaksi atas represi penguasa yang dilakukan secara terbuka (*everyday forms of repression*).

Bentuk perlawanan sehari-hari itu bersifat individual, terselubung, dan tidak terorganisir. Meski demikian, jangan pernah disepelekan. Tak kelihatan

membangkok, tapi menggerogoti secara pelan dan pasti.

Kekecewaan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan hasil pemilu yang tidak demokratis, terhadap penguasa yang hobinya menggertak dan mengakali hukum untuk kepentingan sendiri, potensial melahirkan perlawanan individual, terselubung, dan bersifat sehari-hari.

Di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya, bisa muncul dalam bentuk tindakan pemborosan sumber daya, pelambatan pelayanan, pengurangan jam kerja efektif, kerja asal-asalan. Bahkan, mencari-cari celah untuk korupsi. Birokrasi bukan makin cekatan dan efisien. Sebaliknya, malah lamban, boros, dan korup. Pemerintah akan berhadapan dengan birokrasi yang susah digerakkan.

Di kalangan rakyat pada umumnya bisa muncul dalam bentuk keengganan membayar pajak, ketidakpedulian terhadap seruan pemerintah. Dari soal kecil hingga besar. Seruan pemerintah dianggap angin lalu, tak punya daya gerak.

Akumulasi perlawanan sehari-hari tentu saja akan berpengaruh terhadap produktivitas nasional. Jangan remehkan perlawanan sehari-hari rakyat. Kelihatannya baik-baik saja, tapi aksi perlawanannya menggerus ketahanan bangsa dan negara.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/23/08213831/jangan-sepelekan-pembangkokan-sipil>

## Negara Pun Mengajarkan Anarki



Ilustrasi kawasan tambang nikel di Sulawesi. Pemerintah Indonesia berambisi menjadi pemain utama industri nikel, khususnya electric vehicle (EV). Namun ternyata masih banyak yang harus dipenuhi, mulai dari regulasi hingga roadmap rantai pasok hulu dan hilir. (Dok. Walhi Sulawesi Tengah)

**T**ak mudah ternyata mengelola negara pascakolonial semacam Indonesia. Antara nilai-nilai substantif dan kepentingan-kepentingan pragmatis bergumul adu kuat. Dan, kita, bangsa Indonesia yang sudah berusia 80 tahun ternyata masih saja terperangkap pada jebakan anarki.

Hal itu tampak sekali dari peristiwa amuk massa beberapa hari lalu. Di beberapa hari akhir Agustus 2025 itu kita diliputi kecemasan tinggi. Bayangan tragedi kemanusiaan 1998 dengan cepat menghampiri benak banyak orang.

Amuk terjadi di sejumlah kota pasca-tragedi Pejompongan yang menewaskan Affan Kurniawan (21 tahun), seorang pengemudi ojol. Ia tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di tengah kerumunan massa pengunjung rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Rekaman amatir tragedi itu menyebar dengan cepat, menembus kanal-kanal media sosial, lalu membuka luka-luka sosial-ekonomi warga masyarakat. Nama Affan Kurniawan dengan cepat menggerakkan warga masyarakat di berbagai kota. Pengemudi ojol itu mampu memobilisasi massa untuk turun ke jalan tanpa komando, tanpa pidato.

Sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum terbakar. Amuk meluas dan menyasar kepemilikan pribadi. Rumah sejumlah pejabat negara diserbu massa. Terjadi penjarahan. Awalnya demokrasi, tapi ujungnya anarki. Unjuk rasa dengan penggerahan massa sah dalam demokrasi. Demonstrasi diberi tempat di negara demokrasi. Justru negara wajib melindungi dan menjamin keamanannya.

Namun, demonstrasi itu diakhiri anarki. Demonstrasi berubah menjadi amuk dengan ikutannya, seperti pembakaran, perusakan, penjarahan. Tentu saja amuk dengan ikutannya bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tragedi 1998 sepertinya tak pernah menjadi pembelajaran bangsa ini. Sejarah hanya dicatat sebagai peristiwa masa lalu, bukan dijadikan cermin untuk

refleksi, untuk belajar bersama mengelola zaman. Padahal, sebagian besar pejabat negeri, pemimpin kita hari ini, melewati peristiwa tragis tahun 1998 itu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa kita terkesan tak mampu belajar dari sejarah?

## **Jebakan pascakolonial**

Kita, negara ini, memasuki jebakan pascakolonial yang rumit. Kita mengenal negara modern melalui praktik negara kolonial. Melalui negara kolonial itu pula kita menerjemahkan dan mewarisi model serta relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, antara penguasa dan rakyat.

Praktik negara kolonial bercumbu dengan feodalisme yang telah mendarah daging. Penguasa kolonial tahu persis bahwa feodalisme yang menjadi karakter penduduk jajahan sangat menguntungkan kepentingannya.

Percumbuan dua hal itulah yang menurunkan semacam “gaya hidup”, membentuk habitus, yang menjebak kita hingga hari ini. Kita memaklumkan dan membiasakan diri dengan cara kerjanya, sekaligus mengistimewakan pejabatnya.

Ternyata tak mudah keluar dari jebakan “gaya hidup” hasil percumbuan antara kolonialisme dan feodalisme. Konstruksi Indonesia sebagai negara-bangsa yang berdasarkan Pancasila hanya jaya di atas kertas, tapi terseok-seok di lapangan.

Bangunan ketatanegaraannya memang menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi

modern. Namun, jiwa, kultur, semangat pengelolanya tetap saja mewarisi gaya lama hasil percumbuan negara kolonial dan feodalisme.

Jebakan pascakolonial inilah yang menghadang setiap rezim pemerintahan Indonesia. Selalu berulang dari penguasa ke penguasa. Negara yang seharusnya mengajarkan demokrasi, ternyata malah mengajarkan anarki.

Negara menjadi instrumen penjarahan. Kekayaan negara yang seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dijarah dan hanya dinikmati oleh kelompok kecil. Bahkan, tak sedikit kekayaan rakyat juga dijarah dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Aturan tak segan-segan direkayasa untuk memfasilitasi penjarahan tersebut.

Akibatnya, sedikit orang bergelimang kemewahan dan kemakmuran, banyak orang dihimpit kemiskinan dan kesengsaraan. Ketidakadilan sosial terjadi di mana-mana. Luka sosial-ekonomi memenuhi tubuh rakyat.

Elite penguasa pesta pora, berjoget ria, sebagaimana ditunjukkan di panggung DPR pertengahan Agustus lalu. Sementara itu, rakyat hidup susah, meski sekadar untuk memenuhi kebutuhan minimum. Bahkan, sebagian di antara mereka terpaksa memilih solusi judol (judi online).

Rakyat yang menentang dicap pengganggu keamanan dan ketertiban, lalu dipolisikan, dikriminalkan. Protes rakyat bukan dibaca sebagai hak rakyat, melainkan sumber keonaran. Bukan ditanggapi sebagai

aspirasi yang harus didengar dan dicari jalan keluarnya, melainkan dipandang musuh dan harus dibungkam.

Pendekatan seperti itu jelas-jelas warisan negara kolonial. Sebagai misal, fenomena perbanditan di zaman kolonial, sebagaimana dicatat Suhartono (1995), bukan dimengerti sebagai protes petani yang berlatar belakang kemiskinan dan ketidakadilan sosial, melainkan dianggap pengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Negara kolonial dan aparturnya selalu mengawasi dengan sangat waspada terhadap setiap gerakan protes rakyat. Suara kritis dianggap mengganggu negara, sehingga urusannya selalu dilimpahkan kepada polisi.

Para pendiri bangsa pada zaman kolonial langganan masuk bui, karena bersuara kritis. Negara dengan segenap nafsu keserakahan dan hak-hak istimewa pejabatnya tak boleh diganggu oleh pikiran kritis.

Karena itu, saya melihat, anarki yang menyertai aksi protes rakyat merupakan relasi sebab-akibat yang justru diajarkan oleh negara. Sering kali negara malah memberi contoh menjarah, bukan melindungi kekayaan rakyatnya.

Saya kira, Presiden Prabowo menyadari betul jebakan pascakolonial tersebut. Prabowo bahkan menulisnya sendiri dan merumuskan jalan keluarnya di buku berjudul *Paradoks Indonesia dan Solusinya* (2022).

Saya kira, karena itu pula, Prabowo selalu berbicara keras soal paradoks Indonesia, terhadap korupsi yang gila-gilaan, kekayaan negara yang hanya dinikmati

sedikit orang. Prabowo mengancam keras apa yang disebutnya “serakahnomics”, yang secara esensial merupakan tindakan anarki yang difasilitasi negara.

## **Tantangan besar**

Bagaimana keluar dari jebakan pascakolonial itu tentu saja menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Tak mungkin bisa dilalui oleh Prabowo sendiri sebagai presiden, tapi juga sangat butuh kepemimpinannya.

Presiden Prabowo dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya harus memastikan bahwa negara akan mengajarkan demokrasi, bukan salin-tempel negara kolonial yang mengajarkan anarki. Tanpa kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh mau keluar dari jebakan pascakolonial, kita akan tertatih-tatih dan gagap menghadapi dinamika global yang semakin menekan. Alih-alih menjadi negara maju, ancaman disintegrasi justru ada di depan mata.

Karena itu, kepemimpinan nasional harus mengambil langkah nyata yang radikal, baik penataan kembali pemerintahan maupun kebijakan-kebijakannya. Langkah radikal itu untuk memastikan bahwa negara tak akan lagi anarkis, sebaliknya memberikan harapan buat rakyat. Politik kenegaraan yang sehat dan kuat selalu diawali dari pengakuan terhadap daulat rakyat. Suara rakyat adalah sumber legitimasi.

Negara dianggap hadir dan tak lagi mengajarkan anarki ketika rakyat merasa aman bekerja, ketika kaum tani dan pedagang kecil mendapat ruang, ketika buruh bisa menyampaikan aspirasi tanpa takut, ketika warga

negara yakin bahwa pemimpinnya peduli dan selalu  
membrosamainya, melindunginya. Bukan  
mengancamnya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/13353421/negara-pun-mengajarkan-anarki>

## Oposisi Dilenyapkan Sejak di Dalam Pikiran



Ilustrasi(KOMPAS/HERYUNANTO)

Saya agak terkejut membaca pemberitaan sejumlah media pada 22 Desember 2025 sore. Diberitakan, diskusi dan bedah buku berjudul *#Reset Indonesia* yang digelar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dibubarkan aparat negara. Camat, lurah, sekdes, babinsa, dan polisi datang meminta acara dihentikan. Dalihnya, tidak ada izin. Dalih klasik.

Bahkan, dilaporkan *Kompas.id* (22/12/2025), beberapa jam setelah pembubaran acara, mobil tim penulis yang masih berada di Madiun menjadi sasaran pelemparan telur. Beberapa orang dengan naik motor mendekati mobil tim penulis lalu melempar telur. Tindakan pelemparan telur dengan sendirinya

menyangkal dalih tanpa izin. Tindakan tersebut bisa dibaca sebagai teror.

Saya agak terkejut, mengingat buku yang ditulis secara kolaboratif oleh empat jurnalis (Farid Gaban, Dandhy Laksoso, Yusuf Priambodo, Benaya Harobu) itu tergolong populer. Sudah didiskusikan di banyak tempat tanpa keributan. Sejak terbit pertama pada September 2025, buku setebal 448 halaman itu juga sudah cetak ulang dua kali pada Oktober 2025. Berarti peminatnya banyak.

Namun, saya tidak terlalu terkejut, mengingat sebagai negara pascakolonial, kita mewarisi pandangan rezim kolonial bahwa oposisi harus lenyap sejak di dalam pikiran. Berpikir kritis dipandang benih oposisi, sehingga harus dilenyapkan. Kehendak penguasa tidak boleh dihalang-halangi, meski di dalam pikiran, apalagi di dalam tindakan. Penguasa kolonial punya teori bahwa membiarkan warga berpikir kritis sama halnya dengan menyerahkan kekuasaan.

Sejarah Indonesia memang mengamini teori tersebut. Nasionalisme yang berujung pada kemerdekaan Indonesia tumbuh dari tradisi berpikir kritis di kelompok kecil rakyat jajahan terpelajar yang gagal dilenyapkan. Tradisi literasi yang diajarkan kolonial bagaikan senjata makan tuan.

Pikiran kritis mereka menyerang balik penguasa kolonial. Tradisi berpikir kritis di kalangan rakyat jajahan bukan sekadar membentuk oposisi. Lebih dari itu, ia membidani pergerakan kebangsaan. Kata-kata baru,

baik dalam bentuk tulisan maupun pidato, menjadi senjata baru rakyat jajahan.

Gubernur Jenderal Idenburg, yang mulai berkuasa di Hindia-Belanda pada 1909, dipaksa berpikir keras. Ia tidak seperti pendahulunya berhadapan dengan perlawanan lokal bersenjata keris, tombak, golok, parang, yang mudah dikalahkan dengan pistol, bedil, meriam.

Idenburg tahu persis bahwa kata-kata, seperti "boikot", "mogok", "kemajuan", "partai", "rapat umum", "ideologi", "bangsa", "merdeka", makin fasih diucapkan oleh rakyat jajahan. Ia juga tahu bahwa kata-kata itu menjadi asupan otak rakyat jajahan, di antaranya melalui surat kabar, buku-buku, dan pidato kaum terpelajar.

Apakah rakyat Hindia-Belanda akan memperoleh kemerdekaan sebagai bangsa dan negara andaikata pikiran kritis yang dipelopori kaum terpelajar tak pernah ada? Susah membayangkannya. Atau, bahkan mustahil, meski Perang Dunia Kedua membuka peluang kemerdekaan bagi rakyat jajahan. Terbukti Belanda masih berusaha menguasai mantan jajahannya, meskipun Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Rupanya ajaran kolonial itu menjelma sebagai habitus (meminjam Bourdieu), lalu menuntun aparat negara hingga kini. Variasinya banyak. Misalnya, melarang pameran lukisan, seperti kasus Yos Suprpto pada Desember 2024; melarang pentas seni, seperti dialami kelompok band Sukatani pada awal 2025;

memidanakan seseorang dengan dalih penghinaan, seperti dialami Rocky Gerung pada 2023.

Juga pembredelan surat kabar dan pemberitaan media massa, penyitaan buku, dan sejenisnya. Sejarah Indonesia penuh hiasan pembungkaman. Dan, di era pascakolonial, pemerintahan Soeharto paling agresif.

Kembali pada buku *#Reset Indonesia*. Apa yang ditakutkan dari buku itu? Jangan-jangan aparat negara belum membacanya? Apa tidak lebih asyik bila aparat itu justru ikut diskusi? Apakah aneh, atau ada larangan bagi aparat negara untuk ikut diskusi yang pembicaraanya dikenal kritis?

Buku setebal 448 halaman itu, menurut saya, sangat menarik. Sangat dibutuhkan oleh aparat negara. Mereka perlu membacanya, bahkan mengikuti diskusi-diskusi yang digelar. Bagaikan motto majalah *Tempo*, buku *#Reset Indonesia* "enak dibaca dan perlu". Kaya informasi dan data. Kaya perspektif pula. Maklum, ditulis oleh jurnalis melalui tiga ekspedisi keliling Indonesia. Data dan informasinya detail, "lapangan banget".

Perspektif yang ditampilkan pun mewakili "liyan" (*the others*), perspektif yang hidup di kalangan masyarakat bawah, tapi sering tak terdengar dari kursi pengambil keputusan. Penulis menggunakan gaya etnografer untuk membaca lapangan.

Bila buku terbitan Koperasi Indonesia Baru itu memuat kritik yang tajam, saya kira, juga maklum. Kritik itu muncul dari temuan-temuan di lapangan, yang berujung pada tafsir yang berbeda dengan perspektif

pemerintah yang cenderung positivistik. Meskipun memuat kritik, diksi penulis relatif santun.

Sebagai misal, soal Indonesia Emas. Tak ada keberatan dengan penancangan Indonesia Emas pada 2045. Namun, penulis buku ini menemukan realitas yang tak sejalan dengan mimpi Indonesia Emas.

Angka kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, masih sangat problematis dikaitkan dengan mimpi Indonesia Emas. Bahkan, ditemukan fakta di pelosok desa, anak-anak mengonsumsi makanan produk kota yang dicurigai berbahaya untuk kesehatan. Membaca realitas semacam itu, menurut penulis buku, yang terjadi bukan “bonus demografi”, melainkan “bencana demografi”.

Judul buku pun tidak menghentak. Tidak dipakai istilah politik, seperti “revolusi” atau “reformasi total (retol)”. Penulis buku memilih istilah teknis yang populer di kalangan generasi digital. Dipilih kata “reset”, bukan “restart”, maknanya mewakili solusi yang ditawarkan atas berbagai masalah yang dihadapi Indonesia.

Di mata saya, buku *#Reset Indonesia* justru akan membantu pemerintah mendekati diri pada realitas Indonesia yang begitu kompleks. Aparat negara tak perlu alergi terhadap kritik yang dilontarkan. Kritik tersebut justru membantunya menyempurnakan pandangan, kebijakan, dan hal-hal yang sebaiknya dikerjakan sebagai pemegang kewenangan. Pemerintah tak perlu merasa kalah andaikata harus mengubah kebijakan berkat masukan publik.

Praktik bernegara yang sehat semestinya membutuhkan oposisi yang sehat pula. Namun, mengapa praktik bernegara kita tanpa oposisi? Saya meragukan jawaban normatif bahwa demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi.

Patut dicurigai, oposisi sengaja dilenyapkan sejak di dalam pikiran. Tradisi berpikir kritis sengaja tidak ditumbuhkan, dihalang-halangi. Oposisi mustahil tumbuh sehat tanpa tradisi berpikir kritis. Dan, tradisi berpikir kritis hanya akan tumbuh (meminjam Habermas) di ruang publik (*public sphere*) yang terbuka.

Membersihkan ruang publik dari pikiran kritis tak ada manfaatnya bagi bangsa ini ke depan. Ruang publik yang steril dari pikiran kritis tak akan membawa bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaan.

Coba renungkan, bagaimana bisa, korupsi semakin ugul-ugalan dengan melibatkan para pembesar negeri? Bukan hanya kalangan eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif.

Bagaimana bisa *underground economy* (ekspor/impor ilegal, *under-invoicing*, narkoba, judi online) menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (Pidato Dies Natalis ke-61 Fakultas Hukum Universitas Jember, 15 November 2025) per tahun mencapai Rp 1.500 – 2.000 trilyun?

Coba pikirkan sungguh-sungguh, bagaimana bisa ada tumpukan uang sebanyak Rp 6,62 triliun? Uang itu terdiri atas Rp 2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Rp 4,28 triliun hasil penyelamatan

keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

Kejaksaan memprediksi, potensi penerimaan negara dari denda administratif atas kegiatan sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun pada 2026. Menurut Presiden Prabowo Subianto, penyimpangan yang terjadi dengan cara menerobos kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya sudah berjalan belasan hingga puluhan tahun (*Kompas.com*, 24/12/2025).

Kerja Satgas PKH bentukan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Pertanyaannya, bagaimana bisa penyimpangan semacam itu berjalan puluhan tahun? Ke mana pemerintah selama itu?

Jelas ada masalah besar pada tata pemerintahan. Secara teoritis, boleh istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem politik kita. Namun, kontrol politik harus kuat dan efektif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Tanpa kontrol yang kuat dan efektif, pemerintah akan cenderung semau-maunya. Akan selalu merasa benar. Padahal, sedang terperosok pada jurang kehancuran.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/26/08005481/oposisi-dilenyapkan-sejak-di-dalam-pikiran?source=kolom>

## Buku, Imajinasi, dan Demonstrasi



Pengunjuk rasa membentangkan poster aspirasi dan memasang kursi kosong saat aksi bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025). Aksi dari sejumlah elemen mahasiswa tersebut untuk menuntut pemerintah dan pihak kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang masih ditahan serta menghentikan tindakan represif dan upaya kriminalisasi terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi rakyat. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

**A**da yang menarik di depan Gedung DPR, Senin, kemarin (06/10/2025). Bersamaan dengan aksi Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan gedung wakil rakyat itu sejumlah peserta aksi juga menggelar lapak baca buku (*Kompas.com*, 06/10/2025).

Tentu saja para mahasiswa itu bukan hendak jualan buku. Ada kritik simbolik seiring dengan aktivitas utama

mereka, yakni aksi atau demonstrasi dalam bentuk RDPW. Meski tak seorang pun anggota DPR hadir, sebagai peristiwa politik dan kebudayaan, aksi BEM UI itu bisa disebut berhasil.

Peristiwa itu diliput media massa, juga viral di media sosial. Dan, tak kalah penting dari sisi kebudayaan, aksi para mahasiswa itu menjadi bagian dialektika kebudayaan. Di mata saya, sebagai kritik simbolik, sangatlah cerdas mereka membuka lapak baca buku bersamaan dengan demonstrasi. Mendasar sekali substansi kritiknya.

Bukan sekadar kritik kepada polisi yang beberapa waktu lalu menyita buku-buku yang diduga berkaitan erat dengan kerusuhan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Beberapa buku yang disita polisi berjudul *Apa itu Anarkisme Komunis?* karya Alexander Berkman; *Strategi Perang Gerilya Che Guevara, Kisah Para Diktator* karya Jules Archer, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* karya Franz Magnis-Suseno, dan *Anarkisme: Apa yang Sesungguhnya Diperjuangkan* karya Emma Goldman.

Pihak kepolisian menyebut buku-buku yang disita itu berisi paham soal anarkisme dan komunisme. Kepolisian akhirnya memang mengembalikan buku-buku milik para tersangka kasus kerusuhan di Jawa Timur itu pada akhir September lalu setelah menyimpulkan tidak ada kaitan antara buku tersebut dan tindak pidana yang disidik (*Kompas.id*, 30/09/2025).

Namun, publik bertanya-tanya, jangan-jangan polisi memang miskin literasi. Pengembalian buku-buku itu

bukan karena penyidik tak menemukan kaitan antara buku tersebut dan tindak pidana yang disidik, melainkan desakan reformasi kepolisian yang berhembus kencang hari-hari ini.

Kita tahu bahwa desakan reformasi kepolisian itu direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menjanjikan hendak membentuk Komite Reformasi Polri. Publik juga tahu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bahkan mendahuluinya dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisi 52 perwira polisi.

Karena itu, masuk akal bila ada tafsir bahwa pengembalian buku-buku itu bagaikan “pemerah bibir” belaka. Publik belum melihat sebagai refleksi reformasi kepolisian, yang sepenuhnya didasari oleh perubahan cara pandang dan perilaku sebagai produk kematangan literasi.

Buat saya, aksi mahasiswa membuka lapak baca buku bersamaan dengan demonstrasi di depan Gedung DPR itu menghujam dasar kebudayaan. Secara khusus mereka mengkritik tradisi politik bernegara modern Indonesia yang menjauh dari pelahirannya.

Tradisi bernegara Indonesia dikritik tak lagi dituntun oleh kematangan intelektual yang disimbolisasi melalui buku. Para elite politik dan penyelenggara negara dinilai tunarungu-tunawicara-tunatindakan, karena miskin imajinasi dan pemikiran akibat miskin literasi.

Padahal, Indonesia adalah negara modern produk literasi yang sangat kuat dari para pendiri. Indonesia bukan pemberian penguasa kolonial. Indonesia dirajut

dengan kekuatan dan kematangan intelektual para pendiri.

Mereka, para pendiri bangsa, adalah generasi yang sukses merayakan literasi dalam situasi yang serba terbatas. Mereka membaca, menulis dan berdebat melalui surat kabar dan karya sastra tentang zamannya dengan penuh gairah. Literasi yang sungguh-sungguh terbukti membuahkan tradisi kritik, keterbukaan pikiran, dan imajinasi yang melampaui zamannya.

Hasilnya sungguh hebat, luar biasa, *out of the box*. Literasi mereka menandai “kebangkitan”, menuntun “pergerakan” rakyat jajahan, fajar kebudayaan masyarakat Nusantara.

Literasi tersebut membuahkan komunitas baru yang menyebut dan disebut “bangsa Indonesia”, mahakarya yang reflektif dan visioner, yang kelak memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk negara dengan segenap piranti ketatanegaraan negara demokrasi modern.

Kita ambil satu aspek dari mahakarya itu, yakni Pancasila, yang disepakati sebagai dasar negara melalui perdebatan yang tajam yang menunjukkan kematangan intelektual. Pancasila mustahil lahir tanpa kematangan intelektual, tanpa literasi yang sungguh-sungguh. Bung Karno menyebut “digali” dari bumi Indonesia.

Tanpa literasi yang kuat dengan tradisi kritik yang juga kuat mustahil pemikiran-pemikiran besar yang berkembang di bumi Indonesia bisa diketahui, baik kekuatan maupun keburukannya. Pancasila berhasil disepakati, baik substansi maupun teksnya, melalui

perdebatan yang tajam, yang hanya dimungkinkan oleh manusia-manusia yang tumbuh di dalam literasi yang baik dan sungguh-sungguh.

Tradisi kritik adalah anak kandung tradisi literasi. Literasi tanpa kritik tak akan menjumpai refleksi, tak akan menemukan sintesis-sintesis yang dibutuhkan bagi pembaruan peradaban.

Tradisi kritik yang tumbuh dari tradisi literasi yang baik dan sungguh-sungguh itulah yang menghilang di negeri ini justru saat bangsa ini harus mengisi kemerdekaan. Kebudayaan dan peradaban bukan bergerak maju, tapi jalan di tempat, bahkan mundur kembali pada zaman kegelapan kolonial.

Penyitaan buku-buku menandai zaman gelap itu. Negeri ini memiliki jejak literasi yang penuh ironi, yang dampaknya masih sangat terasa hingga kini. Saya ambil contoh satu saja, terhadap karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Apakah bawah sadar kita sudah sepenuhnya pulih dan jernih melihat karya-karya Pram?

Sudahkah kita (negara) menghargai karya-karya bermutu Pram dan merawatnya untuk pengayaan literasi Indonesia? Sejarah literasi Indonesia menyedihkan dan payah. Karya tulis Pram dikagumi dunia, dicetak-ulang berkali-kali, dan diterjemahkan ke banyak bahasa asing, tapi dilarang, dibuang, dan dikecam di negeri sendiri.

Alih-alih dijadikan bacaan wajib anak-anak sekolah, karya-karya Pram disingkirkan dari jangkauan publik, terutama generasi muda. Semestinya generasi muda diminta melahap habis bacaan bermutu itu sebagai

sumber pembangunan karakter, tapi malah dijauhkan dari karya-karya itu.

Ketakutan publik terhadap karya Pram sengaja diciptakan. Melalui ketakutan itulah pikiran publik dikontrol, dikendalikan. Tak boleh ada pikiran lain. Pada saat yang sama pikiran penguasa ditanamkan sedalam-dalamnya.

Penguasa Orde Baru tak peduli bahwa Tetralogi Pulau Buru karangan Pram adalah karya sastra bermutu dengan latar zaman kolonial yang sesungguhnya bagus sebagai sumber literasi kebangsaan. Orde Baru juga tak ambil pusing bahwa dunia mengapresiasi Pramoedya karena kualitas pemikiran kemanusiaannya.

Sedemikian mendalam ketakutan publik, sehingga ketakutan itu dengan sendirinya menyeleksi pilihan-pilihan publik. Cara pandang polisi yang menyita buku-buku, saya kira, merefleksikan soal ini.

Sungguh aneh, buku *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* karya Franz Magnis-Suseno yang terbit setelah Orde Baru runtuh turut disita. Di mata saya, buku tersebut sangat membantu publik Indonesia memahami pemikiran Karl Marx yang menguncang dunia.

Menyita buku tersebut bagaikan menutup jalan kebudayaan dan peradaban Indonesia, bahkan merendahkan para pendiri bangsa yang mustahil punya imajinasi Indonesia Raya tanpa membaca karya-karya Karl Marx.

Dampaknya sangat mendasar dan terasa hingga kini. Perubahan yang digerakkan reformasi pada 1998

terbukti jalan di tempat (involusi). Banyak problem warisan Orde Baru tak menemukan solusi. Konsolidasi demokrasi lamban dan tak menemukan wujud yang didambakan. Perubahan kelembagaan politik tak diikuti penguatan nilai-nilai demokrasi, tak membuat rakyat berdaya secara politik.

Sebaliknya, kesewenang-wenangan penguasa (elite) terkesan dibiarkan, dilindungi, dibenar-benarkan. Hasilnya, korupsi merajalela, distribusi kesejahteraan dan keadilan tak merata, cita-cita kemerdekaan menjauh dari kenyataan.

Tak seperti masa lampau sebelum penjajahan yang mampu bikin Borobudur dan mahakarya lain serta awal-awal kemerdekaan yang mampu bikin Pancasila, UUD 1945, memimpin Asia-Afrika, kini Indonesia miskin karya yang dikagumi dunia.

Sebaliknya, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) malah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Meskipun juaranya Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, keputusan OCCRP menampar muka kita dan patut direnungkan secara sungguh-sungguh.

Para mahasiswa di depan Gedung DPR kemarin mengingatkan kita, terutama mereka yang berada di Gedung DPR dan para elite pemimpin negeri ini. Eksistensi Indonesia dan masa depan yang diimajinasikan para pendiri bangsa terancam, karena

mereka meninggalkan dasar peradaban modern, yakni buku dengan anak kandungnya berupa tradisi kritik.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/10/07/08445451/buku-imajinasi-dan-demonstrasi>

## Mengembalikan Supremasi MPR, untuk Apa?



Suasana Sidang Tahunan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018) (Andreas Lukas Altobelli/KOMPAS.com).

**B**elakangan ini pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan “silaturahmi kebangsaan” dengan sejumlah tokoh nasional. Topik yang didiskusikan di antaranya soal perlunya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk mengembalikan supremasi MPR.

Salah satu isunya adalah pengembalian pemilihan presiden (pilpres) ke MPR seperti sebelum era reformasi. Bukan lagi pemilihan langsung sebagaimana dipraktikkan sejak 2004 hingga 2024 baru lalu.

Isu tersebut menjadi perhatian pemimpin MPR setelah mencermati perjalanan pemilu, terutama pilpres

langsung sejak 2004 hingga 2024. Di samping itu, menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga adanya persoalan-persoalan negara yang belum mampu terjawab oleh konstitusi.

Sebagai contoh, apabila terjadi bencana alam yang berskala besar, pemberontakan, peperangan, atau keadaan darurat lain yang menyebabkan pemilu tak dapat digelar sebagaimana perintah konstitusi. Dalam keadaan tersebut, tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih dari produk pemilu, lalu siapa pihak yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya demikian (*Kompas.com*, 29/05/2024).

Ketua MPR menilai bahwa semua pemimpin partai politik (parpol) merasakan betapa mahal dan brutal pemilu 2024 baru lalu. "Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu (*Kompas.com*, 05/06/2024).

Topik pengembalian supremasi MPR ternyata juga memperoleh respon positif dari Amien Rais, Ketua MPR periode 1999 – 2004. Bahkan, tokoh kunci amandemen UUD 1945 yang melucuti supremasi MPR kala itu mendatangi sendiri pemimpin MPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. Amien Rais mengaku naif ketika dulu melucuti kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden. Padahal, saat itu Amien Rais berharap dengan perubahan itu dapat menekan

terjadinya politik uang. "Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung *one man one vote*, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," kata Amien Rais (*Kompas.com*, 05/06/2024).

## **Kemajuan**

Topik amandemen konstitusi untuk mengembalikan supremasi MPR, yang di antaranya mengembalikan pilpres ke MPR, tentu saja menarik. Saya melihat ada kemajuan dari sisi proses politik, karena disampaikan sendiri oleh pemimpin MPR dalam kegiatan bertajuk "silaturahmi kebangsaan".

Ada kesan pemimpin MPR sangat serius. Bahkan, menurut Bambang Soesatyo, sejak empat tahun lalu MPR sudah meminta sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian mengenai amandemen UUD 1945.

Substansi serupa sesungguhnya pernah digulirkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI-P, 10-12 Januari 2016. Saat itu Megawati menyoroti secara tajam praktik bernegara pascareformasi yang dilukiskan bagaikan tari poco-poco.

Hal itu akibat tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Megawati melihat perlunya MPR menyusun GBHN, yang oleh Bung Karno pada 1959 disebut "Pembangunan Semesta Berencana". Menurut Megawati, para calon pemimpin hanya sibuk bertarung gagasan di dalam menyusun visi misi, daripada

mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Ia menuturkan bahwa gagasan pilpres langsung ditelurkan untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya. Namun, ketika terjadi pergantian pemimpin, berganti pula kebijakan yang dilahirkan di dalam pembangunan.

“Saya sering berseloroh, inilah produk pemilihan langsung, ‘pemimpin visi misi’ lima tahunan. Lama-lama saya berpikir, Indonesia ini suka berdansa, maju satu langkah, mundur sepuluh langkah. Seperti poco-poco,” kata Megawati saat membuka Rakernas di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran (Kompas.com, 10/01/2016).

MPR tak lagi membuat GBHN yang dimandatkan kepada presiden. Pun tak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Tak ada lagi sebutan “presiden sebagai mandataris MPR”. Presiden menjalankan visi-misi dan programnya sendiri sesuai janji kampanye.

Kritik Megawati sesungguhnya telah menjadi kerisauan banyak kalangan. Tapi, karena masyarakat politik Indonesia saat itu masih dihinggapi euforia reformasi, kerisauan itu hanya terdengar sayup-sayup. Mungkin tak terdengar sama sekali di pusat-pusat kekuasaan pengambil keputusan, termasuk MPR.

Saat itu respon terhadap ide Megawati itu juga datar saja. Ada yang menganggapnya aneh, kehilangan rasionalitas. Mengembalikan wewenang MPR menyusun GBHN hanya akan membuat kegaduhan politik, karena harus melakukan amandemen konstitusi. Meski secara terbatas.

Boleh jadi karena respon politiknya lemah, PDI-P sendiri kelihatan tak menindaklanjuti. Isu amandemen terbatas untuk memberi wewenang MPR menyusun GBHN lalu hilang ditelan dinamika politik yang lain.

## **Permusyawaratan**

Sejarah tak pernah berakhir. Apakah ide pemimpin MPR tersebut akan mendapatkan dukungan politik? Entahlah. Sejarah akan membuktikan.

Yang pasti, menurut saya, gagasan supremasi MPR memiliki landasan logis dari sudut Pancasila sebagai dasar negara. Secara tekstual, Pembukaan UUD 1945 menegaskan keutamaan “permusyawaratan” (perwakilan) dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945 pun di antaranya menegaskan keutamaan permusyawaratan. “Saya yakin syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.... Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup,” tegas Bung Karno.

Demokrasi dilihat bukan dari cara memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut memerintah. Tapi, manfaatnya bagi rakyat secara keseluruhan. Demokrasi dibaca pula harus beriringan dengan nasionalisme. Yang timbul tidak karena “rasa” saja, tapi karena keadaan nyata masyarakat terjajah. Keadaan yang membangkitkan gelora, semangat, dan kesadaran bersama untuk bersatu menolak setiap tindakan yang

menjadi sebab ketidakadilan dan kemiskinan. Agar tidak ada kaum yang tertindas, yang papa-sengsara. Demokrasi haruslah menyelamatkan rakyat, mengenyangkan perut rakyat. Harus menyejahterakan rakyat.

Dijelaskan pula pada bagian Penjelasan UUD 1945 bahwa "semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan" tak kalah penting daripada bunyi pasal-pasal dalam konstitusi. Semangat yang dimaksud adalah semangat kekeluargaan/gotong royong, bukan semangat individualisme.

Karena itu, sistem ketatanegaraan dipilih yang mengutamakan permusyawaratan. Dibentuk lah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi dan terlengkap. Anggotanya meliputi semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilu, plus utusan daerah dan golongan.

MPR dibayangkan sebagai penjelmaan rakyat, pengemban kedaulatan rakyat. Penamaannya pun menggunakan kata "permusyawaratan", yang menunjukkan betapa musyawarah menjadi nilai utama, yang menyemangati kerja lembaga tersebut.

Sebagai wujud lembaga tertinggi, MPR diberi wewenang amat besar. Bukan hanya menetapkan konstitusi, tapi juga menyusun GBHN, dan mengangkat serta memberhentikan presiden.

Jelas sekali dasar berpikir para pendiri negara. GBHN diciptakan sebagai perangkat untuk menuntun

penyelenggara pemerintahan – dipimpin presiden – dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Presiden disebut “mandataris” (orang yang menerima mandat) MPR. Presiden tidak mengikuti pikiran dan kemauan sendiri. Tapi, menjalankan mandat yang diberikan MPR. Presiden harus tunduk dan menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Saya membacanya sebagai pelembagaan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai negara pascakolonial yang multikultur, beraneka suku bangsa dan agama, Indonesia membutuhkan cara pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesatuan.

Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu dan kelompok. Melainkan juga kewajiban mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong), toleransi, dan kerukunan untuk kebaikan bersama. Inilah konsep demokrasi permusyawaratan.

Namun, arus politik pasca-runtuhnya Orde Baru mengubah secara mendasar konsep tersebut. Praktik Orde Baru yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme dinilai bermula dari sistem demokrasi permusyawaratan itu.

Selanjutnya, supremasi MPR dilucuti. Kewenangan MPR dalam menyusun GBHN dan mengangkat presiden ditiadakan. MPR diturunkan posisinya dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi yang lain.

Demokrasi dijalankan dengan lebih menonjolkan hak individu. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pun kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Sebuah sistem yang terbukti tidak murah. Tak juga mengurangi korupsi, kolusi, nepotisme. Malahan terkesan makin hebat, terang-terangan, dan seperti memperoleh pembenaran dari biaya politik yang tak murah.

Juga dibuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggantikan utusan daerah dan golongan di MPR. Anggotanya pun dipilih langsung. Tapi, kewenangannya kabur, tumpang tindih dengan DPR.

GBHN digantikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Secara teoritik, RPJPN diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat presiden untuk periode lima tahunan.

Namun, karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada MPR, maka tidak ada pertanggungjawaban yang harus dibuat presiden kepada rakyat. Satu-satunya pertanggungjawaban presiden kepada rakyat melalui mekanisme pemilu lima tahunan. Entah untuk presiden yang menjabat pada periode kedua, atau sengaja tak mengambil hak konstitusionalnya pada lima tahun kedua.

Presiden juga bisa tidak patuh kepada RPJPN. Ia akan mengikuti pikiran dan kepentingan sendiri sesuai janji kampanye. RPJM yang dibuatnya bukan mengacu RPJPN, melainkan mengikuti janji kampanye.

## **Bukan mustahil**

Mengembalikan supremasi MPR tentu saja bukan mustahil. Sangat bergantung pada elite politik, terutama para pemimpin parpol. Kerangka berpikirnya sudah disediakan oleh para pendiri bangsa.

Menurut hemat saya, GBHN sangatlah penting dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan dasar pembangunan seyogyanya tidaklah diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan mayoritas.

Kebijakan dasar itu sebaiknya dirumuskan bersama melalui mekanisme musyawarah seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga tertinggi dan terlengkap. Agar presiden tidak mengembangkan politik sendiri, selera personal, kepentingan tertentu, tetapi menjalankan prinsip-prinsip yang ditetapkan MPR dalam suatu GBHN.

Pun kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Bukankah UUD hasil amandemen empat kali sejatinya masih menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi, meski secara terselubung?

Presiden memang tidak lagi dipilih oleh MPR. MPR pun tidak bisa langsung menjatuhkan presiden tanpa melalui mekanisme *impeachment* yang memerlukan usulan DPR dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dalam ketentuan prosedurnya ternyata MPR-lah yang diberikan wewenang sebagai pemutus terakhir. Secara normatif, bisa atau tidak presiden dimakjulkan tetap berada di MPR.

Sejarah tak pernah berakhir. Apakah ide mengembalikan supremasi MPR yang digagas pemimpin MPR 2019 – 2024 akan ditindaklanjuti MPR 2024 – 2029 melalui amandemen konstitusi? Kita tunggu saja.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/06000011/mengembalikan-supremasi-mpr-untuk-apa->

## HUT Ke-52 PDI-P dan Kado Butet



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (10/1/2025). HUT PDI ke-52 Perjuangan mengangkat tema satyam eva jayate (hanya kebenaran yang berjaya), api perjuangan nan tak kunjung padam.

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

*Luka itu bara,  
bisa menyala  
Luka itu energi,  
bisa berdaya*

*Aku lahir dari luka-luka sejarah, yang berdarah  
dari rahim yang dicabik-cabik kejahatan penguasa  
Asupan giziku campuran nanah dan amarah, tapi  
Aku menjadi dewasa dan perkasa  
Luka itu api,  
bisa membakar*

*Luka itu pelita,  
bisa bercahaya...*

**S**aya kutip bagian awal sajak berjudul “Dibakar Luka” yang dibaca penulisnya, Butet Kartaredjasa, di panggung perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 10 Januari 2025. Di panggung kecil di halaman Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.

“Dibakar Luka” disebut Butet sebagai kado untuk PDI-P yang sedang ber-HUT ke-52. Ditulis di awal 2025 sebagai renungan penulisnya terhadap situasi sejarah sepanjang 2024. Butet menyebut 2024 sebagai tahun yang gelap. Penuh akal-akalan kejahatan yang merusak demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Saya membaca, “Dibakar Luka” sangat tepat diberikan Butet sebagai kado buat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Luka itu bukan hanya milik Butet Kartaredjasa. Luka itu milik bangsa Indonesia. Luka itu terkhusus dirasakan PDI-P, terlebih sang ketua umumnya. Dan, luka itu terekspresikan pula melalui cara PDI-P merayakan HUT ke-52. Sederhana sekali, hanya untuk internal partai.

Di halaman Sekolah Partai Lenteng Agung hanya ada panggung kecil. Di depan panggung terdapat area VIP dengan belasan kursi. Tampak sang ketua umum didampingi beberapa elite partai menyimak Butet membaca puisinya.

Acara inti dilaksanakan di dalam gedung Sekolah Partai Lenteng Agung. Tak ada rangkaian sambutan.

Hanya diisi pidato tunggal Megawati Soekarnoputri, yang dengan gaya khasnya menghabiskan waktu tiga jam lebih.

Ibarat roda yang berputar, “cakra manggilingan” kata orang Jawa. Selama 8 tahun HUT PDI-P senantiasa dirayakan dengan megah dan meriah. Dihadiri Presiden Republik Indonesia yang tak lain kadernya sendiri, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi sering disebut kader terbaik PDI-P. Ia memang sangat populer. Mengundang decak kagum banyak kalangan.

Karakter dan gaya komunikasinya sederhana, merakyat. Meminjam kategorisasi Robert Redfield, karakter dan gaya Jokowi dibentuk oleh “tradisi kecil” (*little tradition*), bukan “tradisi besar” (*great tradition*). Jokowi bentukan tradisi rakyat (warga kebanyakan), bukan tradisi elite (warga istimewa).

Jokowi memang bukan siapa-siapa. Ia rakyat biasa yang sukses menerobos tradisi kepemimpinan politik Indonesia berkat sistem demokrasi. Tanpa sistem politik yang demokratis rakyat biasa mustahil mencapai puncak jabatan politik sebagai presiden. Karena itu, banyak kalangan terkesima. Butet pun mengidolakan Jokowi sebagai “role model”. Dan, PDI-P menyebutnya kader terbaik.

Namun, sejak HUT ke-51 pada 10 Januari 2024, tak ada lagi sambutan presiden. Kader terbaik PDI-P itu tak hadir. Meski ada alasan resmi (karena sedang kunjungan luar negeri), ketidakhadiran Jokowi menegaskan posisi politik mutakhir Jokowi saat itu.

HUT ke-51 hanya diisi pidato sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Tampak sekali merefleksikan keprihatinan mendalam keluarga besar "Partai Banteng".

Pada HUT ke-51 Presiden Jokowi masih merupakan kader "Partai Banteng". Dalam pidatonya, Sang Ibu prihatin dan mengecam keras tindak-tanduk kadernya itu. Megawati sempat mengingatkan dengan mengatakan bahwa Orde Baru akhirnya jatuh juga.

Namun, pada HUT ke-52 pada 10 Januari 2025, kader yang diklaim terbaik itu telah dipecat dari keanggotaan partai. Jokowi dipecat bersama dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming dan menantunya, Bobby Nasution.

Relasi Megawati-Jokowi yang sering disebut relasi "ibu-anak" benar-benar patah. Sang anak telah diusir dari rumah besar yang membesarkannya. Sungguh tragis. Kader terbaik itu dinilai telah melakukan pelanggaran serius AD/ART partai, kode etik dan disiplin partai.

Tak hanya dinilai telah melakukan pelanggaran internal partai, Presiden ke-7 itu dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan Jokowi dinilai telah menimbulkan kerusakan sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Jokowi dibesarkan melalui jalan demokrasi, tapi tragis dan ironis jalan itu dinilai dirusak sendiri oleh orang yang terbukti sukses melalui jalan itu.

Menurut saya, kado Butet sangat layak diterima dan diamini oleh PDI-P pada HUT ke-52 itu. Kata Butet, "Luka itu bara, bisa menyala. Luka itu energi, bisa berdaya."

Selama 3 jam lebih, Megawati bukan sekadar pidato formal yang normatif, melainkan menyemangati, membangkitkan, menyadarkan dan meyakinkan kader-kadernya tentang masa depan bangsa Indonesia yang diformulasikan oleh WR Soepratman dengan sebutan "Indonesia Raya".

Sang ketua umum bukan omong kosong. Ia menjelaskan, mengingatkan, dan menyadarkan berdasarkan pengalamannya sendiri dan para tokoh besar terutama para pendiri bangsa.

Bukan sekadar kritik, tapi sekaligus petuah penting dari hasil refleksi yang sublim atas dinamika politik dan kekuasaan, yang ternyata kader terbaiknya di ujung kekuasaannya justru menggoreskan luka.

Megawati menghadirkan pula luka masa lalunya, baik sehubungan dengan ayahandanya, Bung Karno, maupun tatkala dirinya dimusuhi rezim Orde Baru. Luka itu membara dan menjadi energi yang membuat Megawati tetap sanggup berdiri kokoh memimpin PDI-P, meski harus merasakan luka kembali justru oleh kader terbaiknya. Kata Butet, luka itu menjadikannya dewasa dan perkasa.

PDI-P membuktikannya. Jagonya pada pemilihan presiden memang kalah. Namun, PDI-P masih menjadi partai peraih kursi terbanyak di parlemen. PDI-P memang juga kalah pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah yang selama ini menjadi basis

kekuatannya, seperti Jawa Tengah. Namun, di sejumlah daerah lain dan terutama di Daerah Khusus Jakarta, PDI-P unggul.

Di pidato pada HUT ke-52, Megawati memberi isyarat politik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya menduga, PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati akan tetap berada di luar pemerintahan. Namun, tak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Isyarat itu di antaranya dinyatakan oleh Megawati sendiri yang tetap berhubungan baik dengan Presiden Prabowo, bahkan dengan sapaan khas "Mas Bowo".

Saya kira, formulasinya secara politik di lapangan membutuhkan tafsir yang cerdas dari kader-kader PDI-P, baik dari sudut kepentingan partai maupun rakyat Indonesia, yang berkali-kali ditegaskan oleh sang ketua umum. Politik PDI-P tak lain adalah politik kerakyatan untuk kemaslahatan rakyat.

Luka itu api, bisa membakar, kata Butet, dan luka itu pelita, bisa bercahaya. Semestinya PDI-P makin bercahaya dalam menerangi jalan masa depan Indonesia.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/11/09505671/hut-ke-52-pdi-p-dan-kado-butet>

## Kegagalan Anies “Nyagub”, Dilema PDI-P dan Tantangan Demokratisasi



Anies Baswedan menyapa wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024). Menurut pengurus DPD PDIP, kedatangan Anies tersebut untuk membahas Pilkada 2024. (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

**A**da dua peristiwa politik penting menjelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pertama, kegagalan DPR mengesahkan revisi UU Pilkada yang isinya menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, kegagalan Anies Baswedan mencalonkan gubernur (nyagub) di Jakarta.

Dua peristiwa itu menandai realitas politik mutakhir. Itulah capaian demokratisasi kita. Perjuangan pemajuan demokrasi menemui tantangan. Dan, saya kira, dialektiknya tak akan berhenti. Dialektika itu bekerja membentuk realitas politik berikutnya.

## **Menghembuskan angin segar**

Menjelang pendaftaran Pilkada 2024, MK membuat dua putusan yang menghembuskan angin segar buat demokratisasi di Indonesia. Putusan dibuat atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

Pertama, putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol diselaraskan dengan persentase dukungan calon perseorangan di setiap daerah. Batasan 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu anggota DPRD dibatalkan.

Putusan tersebut tentu saja menguntungkan parpol. Tak hanya parpol peserta Pemilu 2024 nonparlemen, tapi juga parpol peraih kursi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Dengan putusan itu parpol dapat mengusung calon kepala daerah tanpa perlu repot-repot mencari koalisi. Ada harapan bagi rakyat untuk bisa memilih alternatif-alternatif calon pemimpin.

Berbeda dengan aturan sebelumnya. Parpol terkunci oleh strategi koalisi besar. Pintu parpol lain bisa tertutup oleh strategi itu. Ujungnya, rakyat tidak memperoleh alternatif calon pemimpin. Alternatifnya kotak kosong.

Kedua, putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. MK memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah 30 tahun untuk gubernur-wakilnya serta 25 tahun untuk

bupati-wakilnya dan wali kota-wakilnya. Titik penghitungan usia minimal dilakukan sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan saat pelantikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024.

Putusan tersebut tentu saja merugikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang sudah siap-siap mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur pascaputusan MA. Keinginan berkuasa di tingkat provinsi, mengikuti jejak sang kakak yang sukses pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kandas. Kaesang terkendala umur berdasarkan putusan MK.

Namun, putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang semula diakali untuk kepentingan nepotisme. Kepastian hukum sangat dibutuhkan bagi pemajuan demokrasi.

Apa yang terjadi dengan dua putusan MK itu? Aneh tapi nyata, putusan MK yang menghembuskan angin segar bagi demokratisasi justru disabot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Badan Legislasi (Baleg) DPR tiba-tiba bersemangat merevisi UU Pilkada sehari setelah MK membacakan putusan. Revisi itu bukan mengukuhkan substansi putusan MK, sebaliknya justru menyiasati untuk menolaknya. Baleg DPR terkesan sangat percaya diri bahwa DPR akan menyetujui melalui sidang paripurna yang digelar esoknya.

Parpol pemilik kursi di DPR (kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P) terkesan

membiarkan begitu saja rencana Baleg. Mereka terkesan koor tak menganggap rakyat yang selama ini memang diam.

Ada apa dengan parpol kita? Padahal, putusan MK itu menguntungkan parpol secara keseluruhan. Parpol terkesan tak berdaya dan menuruti saja kepentingan-kepentingan yang terganggu oleh putusan MK.

Itulah realitas keparpolan kita hari ini. Parpol kehilangan jatidiri. Parpol mengingkari fungsinya sebagai pelembagaan politik rakyat, pilar demokrasi. Sebaliknya, parpol justru dipakai sebagai instrumen kepentingan elite, bahkan keluarga. Parpol menjadi alat untuk menyandera negara sekaligus memberikan legitimasi atas normalisasi hal-hal yang sejatinya abnormal dan bertentangan dengan kepentingan rakyat serta nilai-nilai demokrasi, seperti korupsi, kolusi, nepotisme.

Realitas keparpolan kita itu tentu saja berpengaruh pada anggota DPR. Meski pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, rakyat memilih orang, bukan memilih parpol, ternyata tidak serta merta anggota DPR bisa bertindak mandiri. Anggota DPR akan cenderung patuh pada perintah parpol, kendatipun perintah parpol itu bertentangan dengan aspirasi rakyat pemilih.

Wajah pemerintahan tampak demokratis dilihat dari depan, tapi dari belakang kelihatan sekali guratan totaliterisme. Namun, harapan tentang demokratisasi tidaklah pupus. Sejarah memiliki kehendaknya sendiri yang tak seluruhnya bisa dikendalikan elite.

Ternyata rakyat marah terhadap akal-akalan DPR. Demonstrasi dengan massa besar terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin saja para elite yang mengakali putusan MK itu berpikir bahwa rakyat tak akan bergerak. Seperti yang sudah-sudah, paling-paling hanya ribut di media sosial, tak sampai turun massa dalam jumlah besar. Apalagi dalam waktu yang relatif pendek.

Tapi, kenyataannya, hanya dalam hitungan jam, sosialisasi dan konsolidasi massa berlangsung masif dan efektif. Pertanda rakyat tidak bodoh, rakyat sejatinya tidak tidur.

Berkat tekanan rakyat dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, DPR akhirnya mengurungkan pengesahan hasil revisi UU Pilkada. Saya menduga, tanpa tekanan massa dalam jumlah besar, DPR tak akan membatalkan revisi UU Pilkada. Pun sebaliknya, bila DPR memaksakan pengesahan, gelombang perlawanan rakyat akan semakin besar pula.

Namun, sejarah berkehendak lain. DPR balik badan. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tak punya pilihan lain kecuali tunduk pada putusan MK yang dinilai memberi ruang bagi pemajuan demokrasi.

## **Dilema PDI-P**

Kegagalan Anies Baswedan menjadi calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta penting pula dicermati. Ironi sekali, Anies Baswedan, mantan gubernur DKI dan calon

presiden yang punya elektabilitas tinggi di Jakarta, gagal nyagub.

Sebelum putusan MK, Anies telah digadang-gadang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, karena kepentingan masing-masing parpol, ketiga parpol itu meninggalkan Anies.

Ketiga parpol balik badan, lalu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Ridwan Kamil diusulkan Partai Golkar, dan Suswono dicalonkan PKS.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung ramai-ramai oleh parpol parlemen. Hanya menyisakan PDI-P, tak mendukung tapi juga tak bisa mengusung calon sendiri. Parpol asuhan Megawati Soekarnoputri itu terkunci.

Anies dan PDI-P bernasib serupa. Kaki politiknya diamputasi. Elektabilitas Anies yang tinggi tak bermakna secara politik, karena tak ada parpol yang mengusung.

Pun PDI-P. Parpol yang sejak Pilpres 2024 memainkan narasi kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan potensial berlanjut pada pemerintahan Prabowo itu juga berpotensi kehilangan peran politik di Jakarta. Bisa terjadi pula di daerah penting lain. Karena itu, angin demokratisasi yang dihembuskan MK dan gagal disabot DPR merupakan angin segar pula bagi Anies dan PDI-P.

Anies tentu saja menarik bagi PDI-P. Ia potensial memenangi pertarungan di Jakarta. Sekaligus potensial menghentikan praktik totaliterisme. Maka, masuk akal

bila sejumlah elite PDI-P menjajaki peluang mengusung Anies.

Namun, kenyataannya lain. PDI-P akhirnya memilih jalan "soft". Tak mendukung jagoan KIM Plus, tak juga mengusung Anies yang berpeluang mengalahkan jagoan KIM Plus, tapi mencalonkan Pramono Anung.

Pramono adalah kader senior PDI-P yang telah lama menjadi "orang istana". Apakah Pramono kompetitif buat Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono dengan dukungan koalisi besar?

Boleh jadi, pertanyaan itu tak penting buat PDI-P. Yang terpenting, Partai Banteng tak kehilangan "peran politik". Tak ada kamus "balas dendam" bagi PDI-P. Sang ketua umum selalu mengajarkan "kesabaran revolusioner".

Secara hipotesis, Anies pun belum tentu memenangi kontestasi Pilkada di Jakarta. Di atas kertas berdasarkan survei, Anies memiliki elektabilitas tertinggi di antara sejumlah tokoh, termasuk Ridwan Kamil. Tapi, apakah elektabilitasnya akan stabil bila benar-benar dicalonkan?

Pengalaman Pilpres 2024, elektabilitas Prabowo terus merangkak naik dari waktu ke waktu, berakhir dengan suara terbanyak saat Pilpres 2024. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang tertinggi di awal justru merosot dari waktu ke waktu, berakhir dengan suara terendah. Siapa menjamin Anies tak bernasib buruk seperti Ganjar pada Pilpres 2024?

Saya melihat dilema PDI-P. Satu sisi, desakan untuk memilih kader sendiri begitu kuat. Anies bukan kader

PDI-P. Apalagi terdapat simpangan ideologis antara PDI-P dan Anies.

Maka, seperti dikatakan Megawati, Anies harus menjadi anggota PDI-P bila harus diusung sebagai calon gubernur. Hal itu ditegaskan pula oleh elite PDI-P, mengingat pengalamannya dengan Jokowi yang berakhir tragis.

Sisi lain, tentu saja PDI-P tak mau kehilangan peran politik, khususnya di Jakarta, yang sering dianggap "Indonesia mini".

Demikian kompleks dilema PDI-P antara peran politik yang diinginkan (hanya PDI-P yang tahu persis), realitas politik yang berkembang dan tuntutan nilai-nilai demokrasi. Maka, narasi kritisnya dimainkan melalui jalan yang "soft". Di Jakarta pilihannya pada kader sendiri yang profilnya "melembutkan" relasi politik antara PDI-P dan Istana, baik hari ini maupun akan datang.

Saya mengamini PDI-P yang memilih kader sendiri. Meski prinsip ini tak mudah dijalankan secara konsisten. Buat apa parpol merekrut kader dan mendidiknya, bila jabatan politik diserahkan kepada orang lain yang bukan kader.

Keberanian dan konsistensi parpol mengusung kader sendiri, baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif, menandai sistem kaderisasinya berjalan. Tak bisa disangkal, kaderisasi kepemimpinan politik oleh setiap parpol merupakan aspek vital bagi demokratisasi.

Atas dasar itu pula, Anies Baswedan sudah seharusnya berpartai, entah bergabung dengan parpol

yang ada atau mendirikan parpol sendiri. Ia telah menjadi aktor politik. Kaki politiknya hanya bisa dijaga melalui parpol.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/02/06000081/kegagalan-anies-nyagub-dilema-pdi-p-dan-tantangan-demokratisasi>

## Cak Lontong, Dekonstruksi, dan Politik "Riang Gembira"



Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan ketua Timmesnya Cak Lontong saat memberikan keterangan di depan FX Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024). (Shela Octavia)

**C**ak Lontong, komedian yang aslinya bernama Lies Hartono, ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Siapa tak terperangah?

Aneh bin ajaib. Cak Lontong yang sehari-hari tampil di panggung untuk mengocok perut penonton dan bukan berorasi politik meski komedinya tak jarang pula bermuatan politik, dipercaya memimpin tim pemenangan dalam kontestasi politik tingkat provinsi.

Apalagi Jakarta, daerah yang dianggap episentrum politik di Indonesia. Apa maksud pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjuk Cak Lontong? Apakah pasangan ini tak ingin memenangi Pilkada?

Banyak pertanyaan tersembunyi di balik penunjukkan Cak Lontong. Pramono Anung hanya mengatakan, "Kami ingin menunjukkan bahwa tim ini bisa bergembira tapi tetap serius," (*Kompas.com*, 05/09/2024).

Saya mencoba membacanya dalam konteks kebudayaan, memahaminya sebagai teks yang memancarkan makna-makna.

## **Dekonstruksi**

Sejauh ini politik cenderung dimengerti dan dijalani sebagai aktivitas yang serius, berat, penuh sinisme, ketegangan dan permusuhan. Saya membaca, melalui Cak Lontong, secara simbolis paham politik seperti itu hendak didekonstruksi. Ditawarkan politik "riang gembira".

Politik "serius" cenderung menampilkan sinisme, prasangka buruk, ketegangan dan permusuhan. Sebaliknya, politik "riang gembira" diasumsikan menampilkan optimisme, keselarasan, dan penyatuan. Memukul versus merangkul.

Media Cak Lontong berkomedial adalah kata/bahasa. Cak Lontong menggarap permainan kata/bahasa; membolak-balik, melipat-lipat kata/bahasa.

Saya ambil contoh satu saja yang masih gres. Di acara HUT *Kompas TV*, 11 September 2024, Cak Lontong memberikan kuis kepada beberapa menteri perempuan.

Cak Lontong menyebutnya Kuis Perempuan Kabinet, atau KPK.

Judul kuisnya sudah memainkan kata/bahasa. Kita biasa menerima KPK sebagai lembaga yang mengurus soal korupsi, tapi Cak Lontong menjauhkan dari pandangan umum. KPK dipakai menyebut kuis yang ditanyakan kepada menteri perempuan.

Pertanyaan kuis, "Menteri Keuangan disingkat jadi?" Cak Lontong memberikan bantuan 6 huruf, dan huruf kedua E. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab "MENKEU", jawaban yang lazim. Tentu saja kita membenarkan jawaban Sri Mulyani. Begitulah cara berpikir kita sehari-hari.

Menurut Cak Lontong, jawaban itu salah. Lalu, ditawarkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bu Menlu menjawab "PENDEK". Ternyata, menurut Cak Lontong, jawaban Menlu Retno Marsudi benar. Tertawalah para penonton.

Rupanya Bu Menlu tak mau "dikerjain" seperti Bu Menkeu. Pasti jawaban yang benar menurut Cak Lontong di luar nalar yang sudah biasa. Ketemulah, "PENDEK", dan dibenarkan oleh Cak Lontong.

Kita tahu, orang menangkap realitas tidak secara telanjang, tapi melalui institusi kata/bahasa (tanda). Melalui kata/bahasa itulah realitas sampai kepada manusia, sehingga dapat pula dikatakan bahwa realitas berlangsung di dalam kata/bahasa. Cara pandang kita terhadap realitas bisa dilihat dari kata/bahasa kita.

Selanjutnya, kata/bahasa juga memengaruhi pandangan/pikiran. Keluasan kata/bahasa yang kita

kuasai berpengaruh terhadap keluasan pandangan/pikiran. Dengan demikian, bahasa bukanlah instrumen netral, sekadar menjembatani manusia dengan objek di luar dirinya, tetapi diatur dan dihidupkan pula oleh pengucapan-pengucapan yang berpamrih.

Sejauh bahasa adalah produksi simbolis, ia tak terpisahkan dari pamrih penutur. Setiap pernyataan yang dihasilkan sesungguhnya adalah tindakan berpamrih, tindakan penciptaan realitas dan makna-makna.

Cak Lontong membangun komedinya dengan mendekonstruksi realitas. Ia membolak-balik, melipat-lipat kata/bahasa yang lazim (biasa) dipakai masyarakat. Cak Lontong lalu mengajak merekonstruksi realitas – dan ini menjadi kekhasan komedinya – dengan mengatakan “mikir”.

Saya menangkap, Cak Lontong seperti mengajak kita meledek realitas atau pandangan umum yang selama ini biasa kita jalani. Padahal, bisa jadi, di dalam realitas atau pandangan umum yang sudah biasa itu sesuatu yang salah dibenar-benarkan, yang tak patut dipatut-patutkan, yang tak lazim dilazim-lazimkan.

Begitulah, realitas atau pandangan umum bisa saja dipenuhi kekonyolan, keganjilan, ketololan. Dalam konteks ini, Cak Lontong mengajak menyadari kekonyolan, keganjilan, ketidakpatutan yang ada di dalamnya. Dekonstruksi sekaligus rekonstruksi.

Gaya komedi Cak Lontong berhasil mengocok perut penonton, karena kita tak merasakan ada kekonyolan,

keganjilan dan ketololan dalam hidup sehari-hari. Tatkala normalisasi kekonyolan, keganjilan dan ketololan itu diledek oleh Cak Lontong, kita tertawa. Ternyata ada yang lucu (aneh) dalam keseharian kita, yang dilanggengkan melalui kata/bahasa.

## **Hegmoni kekuasaan**

Kata/bahasa yang diacak-acak Cak Lontong itu sebelumnya sesak dengan hegemoni kekuasaan. Tentu saja kekuasaan yang berpamrih.

Di zaman yang diklaim super modern sekarang ini, sering pula disebut neoliberalisme, pamrih yang dimaksud tak jauh dari ekonomi berserta turunannya. Seluruh ruang kehidupan nyaris diisi perebutan sumber daya ekonomi.

Beruntunglah mereka yang telah menguasai sumber-sumber kekuasaan, di antaranya politik, ekonomi, ilmu pengetahuan/teknologi/informasi, dan sebagainya. Kekuasaan memiliki selernya sendiri. Kekuasaan turut menentukan perbincangan, kebijakan, menetapkan nilai baik-buruk, tinggi-rendah, dan sebagainya.

Ruang kehidupan dengan sendirinya akan dipenuhi sistem, pola, logika, citarasa tertentu sesuai selera kekuasaan tertentu pula. Sayangnya, selera itu tak memberikan tempat buat rakyat kebanyakan. Rakyat tersisih.

Dengan demikian, politik tak lain adalah ruang negosiasi selera para pihak. Sayangnya, negosiasi selera para pihak itu tak ada yang bernama rakyat. Para pihak

menegosiasikan kepentingan sendiri, tak memperjuangkan kepentingan rakyat.

Rakyat hanya ditampilkan sebagai pemanis belaka, orang Jawa bilang “abang-abang lambe”. Diucapkan hanya sebagai pantas-pantasan tanpa kewajiban pembuktian.

Karena itulah, politik cenderung menampilkan sinisme, prasangka buruk, ketegangan dan permusuhan. Yang sesungguhnya antarelite belaka, tapi atas nama rakyat. Politik cenderung memukul, bukan merangkul; cenderung menegangkan, bukan merukunkan; cenderung menceraiberaikan, bukan menyatukan.

Politik yang cenderung merangkul, merukunkan dan menyatukan adalah politik yang membuka partisipasi nyata rakyat seluas-luasnya; mengajak seluas-luasnya segmen sosial masyarakat. Politik yang madunya bisa dinikmati semua warga masyarakat. Itulah politik “riang gembira”.

## **Kembali pada jati diri**

Kemerdekaan Indonesia diraih dengan tetesan darah dan air mata. Proklamasi kemerdekaan, menurut Bung Karno, bukan peristiwa konstitusional, melainkan peristiwa revolusioner.

Maka, proklamasi kemerdekaan disebut “jembatan emas” menuju tanah seberang. Di tanah seberang itulah dibayangkan kehidupan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan dan kemakmuran, pun ketenteraman dan keamanan, dirasakan rakyat secara keseluruhan.

Karena itu, di tanah seberang, politik harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Politik Indonesia harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai salah satu jalan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Negara harus mengatur pamrih ekonomi dan turunannya dalam kerangka keadilan sosial. Kata Bung Karno, semua buat semua. Bukan buat satu orang. Juga bukan buat satu golongan. Keringat semua buat kebahagiaan semua.

Cak Lontong, buat saya, lebih bermakna dibaca sebagai simbol pengembalian politik pada jati dirinya. Bukan makna elektoralnya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/17/08330281/cak-lontong-dekonstruksi-dan-politik-riang-gembira>

## Pilkada Jakarta: Kemenangan Politik “Riang Gembira”



Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) berbincang disela menyampaikan keterangan pers terkait kemenangan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Cipete, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Pramono-Rano memperoleh 2.183.577 juta suara atau 50,07 persen suara berdasarkan hasil real count C1 KPUD DKI Jakarta. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

**M**asyarakat Jakarta terbukti lebih menyukai politik “riang gembira” yang ditawarkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono-Rano sebagai pemenang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 50,07 persen, atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara. Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara, dan Dharma

Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara (*Kompas.com*, 08/12/2024).

Kemenangan politik “riang gembira” tentu saja menarik dibaca. Jakarta terbukti tidak sertamerta bisa dibaca menggunakan cara pandang yang sama dengan daerah lain.

Sebagaimana diketahui, Pramono-Rano bukan pasangan yang telah disiapkan jauh-jauh hari untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur-wakil gubernur Jakarta. Pasangan ini “dijodohkan” menjelang pendaftaran di KPU Jakarta.

Itu pun berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada. Batasan 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu anggota DPRD dibatalkan.

Putusan tersebut tentu saja menguntungkan parpol. Tak hanya parpol peserta Pemilu 2024 nonparlemen, tapi juga parpol peraih kursi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Parpol tidak terkunci oleh strategi koalisi besar.

Dalam konteks Jakarta, semula hanya ada pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen. Ridwan Kamil diusulkan Partai Golkar, dan Suswono dicalonkan PKS.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka kesempatan PDI-P. Semula PDI-P tak mendukung koalisi besar, tapi juga tak bisa mengusung calon sendiri. Parpol asuhan Megawati Soekarnoputri itu terkunci.

Kesempatan di menit-menit terakhir itu dimanfaatkan oleh PDI-P untuk mengusung calon sendiri. Namun, PDI-P tidak juga segera bisa memutuskan figur yang diusung.

Terjadi dinamika dan tarik-menarik yang kuat di internal antara mengusung Anies Baswedan yang elektabilitasnya masih memuncaki berbagai survei dan kader sendiri. Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kader PDI-P masih kompetitif berdasarkan survei sejumlah lembaga.

Namun, kematangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, teruji ketika harus memutuskan siapa yang diusung partainya untuk Jakarta. PDI-P, menurut saya, akhirnya memilih jalan "soft". Tak mengusung Anies, meski berpeluang mengalahkan jagoan KIM Plus, tapi kontraksi secara internal cukup tinggi. Pilihan pun jatuh pada Pramono Anung dan Rano Karno.

Pramono adalah kader senior PDI-P yang telah lama menjadi "orang istana". Dia dikenal cukup dekat dengan berbagai kalangan, termasuk elite KIM Plus, meski tak banyak dikenal oleh publik. Profil Pramono "melembutkan" relasi politik antara PDI-P dan Istana yang sejak pemilihan presiden tegang.

Pramono lalu dipasangkan dengan Rano Karno sebagai wakil gubernur. Rano Karno menambah profil "soft" pasangan tersebut. Dia adalah seniman, berpengalaman mengelola Provinsi Banten, dan memiliki citra kuat mewakili komunitas Betawi melalui Si Doel.

Wajah lembut pasangan Pramono-Rano semakin terbentuk dengan penunjukkan Lies Hartono sebagai

Ketua Tim Pemenangan. Dia bukan tokoh politik, tapi seorang komedian yang terkenal dengan sebutan Cak Lontong.

Rupanya Megawati Soekarnoputri tetap meyakini bahwa politik adalah kerja keras di lapangan, bukan popularitas survei. Semula pasangan Pramono-Rano tak pernah diperhitungkan, namun pelan tapi pasti elektabilitasnya merangkak naik menurut survei. Ujungnya KPU Jakarta menetapkannya sebagai pemenang satu putaran.

Tampak sekali bahwa pasangan Pramono-Rano memang diturunkan untuk bertarung di lapangan politik. Mereka harus bekerja keras di lapangan. Membaca wajah dan isi pikiran warga Jakarta dengan saksama dan dalam tempo pendek.

Di mata saya, pilihan narasi pasangan Pramono-Rano sangat cerdas. Warga Jakarta sehari-hari dibebani hidup yang serba serius dan menegangkan. Tawaran politik "riang gembira" dengan komandan pemenangan Cak Lontong, menurut saya, merefleksikan kecerdasan dan kepekaan pasangan Pramono-Rano terhadap kompleksitas Jakarta dari berbagai aspek.

Dengan politik "riang gembira" hendak didekonstruksi kehidupan politik yang selama ini cenderung dimengerti dan dijalani sebagai aktivitas yang berat, penuh sinisme, ketegangan dan permusuhan. Sejauh ini politik cenderung menampilkan sinisme, prasangka buruk, ketegangan dan permusuhan. Sebaliknya, politik "riang gembira" diasumsikan

menampilkan optimisme, keselarasan, dan penyatuan. Politik “merangkul”, bukan “memukul”.

Hal itu tampak sekali dari cara dan gaya Pramono-Rano mendekati warga Jakarta. Prinsip “merangkul” sangat tampak terhadap warga Jakarta, baik retorika dan tindakannya. Bahkan, Pramono-Rano sukses menyatukan pendukung Anies dan Ahok yang masih relatif kuat di Jakarta, yang sejauh ini bersimpang jalan.

Dari sisi retorika, pasangan Pramono-Rano tampak memiliki kepekaan tuturan. Praktis tak ada retorika yang membuat blunder.

Agak berbeda dengan Ridwan-Suswono, yang blunder saat bicara soal janda. Hal ini sesungguhnya merefleksikan pemahaman mereka, yang bisa dinilai tak paham dan tak peka soal gender. Apalagi untuk warga Jakarta, yang dari segi pendidikan dan ekonomi serta kesadaran gender boleh jadi jauh lebih baik daripada daerah lain.

Saya melihat, metode Cak Lontong berkomedi dipakai menerjemahkan paradigma politik “riang gembira”. Pramono-Rano memilih Cak Lontong bukan hanya populer, tapi memahami cara komedinya yang dipandang cocok untuk menerjemahkan politik “riang gembira”.

Cak Lontong membangun komedinya dengan mendekonstruksi realitas. Ia membolak-balik, melipatlipat kata/bahasa yang lazim (biasa) dipakai masyarakat. Cak Lontong lalu mengajak merekonstruksi realitas – dan ini menjadi kekhasan komedinya – dengan mengatakan “mikir”.

Cak Lontong mengajak kita meledek realitas atau pandangan umum yang selama ini biasa kita jalani. Bisa jadi, di dalam realitas atau pandangan umum yang sudah biasa itu ada sesuatu yang salah tapi dibenarkan, yang tak patut tapi dipatut-patutkan, yang tak lazim tapi dilazim-lazimkan.

Begitulah, realitas atau pandangan umum bisa saja dipenuhi kekonyolan, keganjilan, ketololan. Dalam konteks ini, Cak Lontong mengajak menyadari kekonyolan, keganjilan, ketidakpatutan yang ada di dalamnya. Mengajak mendekonstruksi, sekaligus rekonstruksi.

Gaya komedi Cak Lontong berhasil mengocok perut penonton, karena kita tak merasakan ada kekonyolan, keganjilan dan ketololan dalam hidup sehari-hari. Tatkala normalisasi kekonyolan, keganjilan dan ketololan itu diledek oleh Cak Lontong, kita tertawa. Ternyata ada yang lucu (aneh) dalam keseharian kita, yang dilanggengkan melalui kata/bahasa.

Warga Jakarta telah memilih. Ternyata yang banyak dipilih bukan yang banyak didukung parpol dan disokong pula oleh presiden dan mantan presiden. Yang dipilih adalah pasangan yang nyata bekerja keras dan cerdas memahami aspirasi warga Jakarta.

Sumber:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/09/10325761/pilkad-a-jakarta-kemenangan-politik-riang-gembira>

## Ketika Prabowo Tak Melanjutkan Warisan Jokowi di IKN



Presiden Prabowo Subianto menyapa tamu undangan yang turun dari atas panggung menuju mimbar kehormatan saat lagu Tabola-Bale dinyanyikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

**T**ahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Indonesia ke-7, memimpin upacara kenegaraan di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Tepat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI, 17 Agustus 2024.

Saat itu IKN menyedot perhatian nasional. Mata sebagian besar rakyat Indonesia tertuju pada IKN, kendati masih amat sangat jauh dari kelayakan sebagai ibu kota negara.

Saya pun turut bangga, tapi juga cemas. Saya percaya, sebagian besar rakyat Indonesia merasakan hal yang sama.

Bangga, karena peristiwa bersejarah. Sebagai gagasan, pemindahan ibu kota negara sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, presiden pertama, sejak 1957. Namun, baru melalui Presiden ke-7, gagasan tersebut nyata. Dasar hukumnya dibuat, pembangunannya pun dimulai.

IKN sebenarnya bisa dimaknai simbol masa depan Indonesia. IKN menawarkan perspektif dan pendekatan baru menuju apa yang oleh W.R. Soepratman disebut "Indonesia Raya".

IKN menantang imajinasi, kreasi dan keteguhan hati pemimpin Indonesia. IKN membutuhkan modal besar, kekuasaan dan semangat besar. Juga butuh dukungannya politik besar, baik politik formal maupun publik pada umumnya. Jalannya masih amat sangat panjang untuk memenuhi standar ibu kota negara.

Namun, di balik rasa bangga juga muncul rasa cemas. IKN menjanjikan "ke-Raya-an" Indonesia, tapi ada sisi lain yang sedang diidap bangsa Indonesia yang siap mengubur "ke-Raya-an" itu (baca: "Sang Saka Berkibar di IKN dan Robohnya Surau Kami", *Kompas.com*, 19/082024).

Apa dan siapa yang menjamin presiden pasca-Jokowi akan ber-HUT RI di IKN? Dan, HUT Kemerdekaan RI ke-80 membuktikan. Presiden Prabowo memilih mengibarkan Sang Saka di Jakarta, meski secara formal status Jakarta sudah bukan lagi ibu kota negara. Lalu, mengapa Prabowo tidak melanjutkan warisan Jokowi ber-HUT di IKN? Kapan ia akan ber-HUT RI di IKN?

Mari kita tengok ke belakang. Di sepanjang kampanye Pemilu 2019 – Prabowo adalah kompetitor Jokowi – tidak ditemukan isu pemindahan ibu kota negara. Juga di dokumen visi-misi pasangan calon presiden Jokowi dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin.

Artinya, isu pemindahan ibu kota negara bukan dirancang sejak awal oleh pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin untuk mendapatkan legitimasi politik rakyat. Dengan sendirinya bisa pula dibaca bahwa pemindahan ibu kota negara itu sejatinya bukan program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Jokowi baru menyampaikan secara resmi perihal pemindahan ibu kota negara saat berpidato pada Sidang Bersama DPD-DPR RI (naskah kedua), 16 Agustus 2019. Setelah berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI (naskah pertama) pada hari yang sama. Saat itu ada 3 pidato. Yang ketiga, pidato penyampaian RAPBN 2020.

Momen tersebut terjadi setelah pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019. Pada bagian akhir pidatonya, Jokowi meminta izin terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Kata Jokowi, “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon *ridha* Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.” (*Kompas.com*, 16 Agustus 2019).

Jokowi rupanya berhitung betul kapan gagasan pemindahan ibu kota negara dilempar ke publik. Ia menunggu saat politik formal betul-betul dalam kendalinya. Baik di pemerintahan maupun di parlemen dan partai politik.

Pengendalian politik formal sangat urgen, baik untuk persetujuan dan legitimasi gagasan maupun penyiapan regulasi. Dan, terbukti di ranah politik formal isu pemindahan ibu kota negara nyaris tak menemui perlawanan.

Hingga regulasi tentang IKN tuntas, saya melihat, partisipasi publik sangat minim. Rakyat tak banyak tahu perihal kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Padahal, IKN adalah proyek super akbar yang tak mungkin diselesaikan dalam satu periode pemerintahan Indonesia yang hanya 5 tahun.

Membangun ibu kota negara tentu tidak sama – rasionalitas, pembiayaan, jangka waktu, dan berbagai aspek lainnya – dengan membangun jalan tol, bendungan, bandara, dan sejenisnya. Ibu kota negara berbicara ekosistem pusat pemerintahan negara, sebuah ruang yang merepresentasikan banyak hal. Mulai dari sejarah, identitas kebangsaan, nilai-nilai hingga cita-cita masa depan suatu bangsa. Pembangunannya besar kemungkinan bersifat lintas pemerintahan.

Sementara itu, jalan tol, bendungan, bandara adalah infrastruktur, subsistem di dalam ekosistem. Pembangunannya bisa segera dirampungkan oleh satu pemerintahan.

Partisipasi publik yang minim membuat kontroversi dan sinisme (olok-olok) terhadap IKN tak berhenti hingga kini. Pada saat itu publik dihadapkan pada keputusan elite, yang prosesnya pun elitis dan terkesan tiba-tiba. Meski menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kajiannya telah disiapkan sejak 2014.

Karena itu, IKN tampak sebagai proyek politis Jokowi di periode akhir jabatannya, bukan proyek bangsa Indonesia. Juga bukan prioritas buat rakyat Indonesia.

Saya menduga, Presiden Prabowo pun melihat IKN bukan prioritas bagi rakyat Indonesia. Ia tetap memerhatikan, tapi tidak memprioritaskan. Hal ini tampak dari alokasi anggaran 2026 untuk IKN. Prabowo masih mengalokasikan sebesar Rp 6,26 triliun, meski turun signifikan dari tahun 2025 yang sebesar Rp 13 triliun dan jauh sekali dibandingkan tahun 2024 sebanyak Rp 39,8 triliun (*CNBC Indonesia*, 18/08/2025).

Di IKN juga masih digelar upacara bendera, tapi dipimpin oleh Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN. Memang auranya berbeda dengan HUT ke-79 saat Sang Saka Merah Putih mengangkas di IKN melalui upacara kenegaraan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Jadi, secara simbolik, Sang Saka Merah Putih tetap mengangkas di halaman Istana Negara. Namun, Istana Negara di Jakarta, bukan di IKN. Jakarta secara hukum memang bukan lagi ibu kota negara, tapi secara nyata masih mengendalikan secara penuh pemerintahan Indonesia.

Dari pidato pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, dan pidato-pidato pada kesempatan yang lain, jelas sekali prioritas Prabowo bersifat ideologis, yakni mengubah realitas paradoks Indonesia. Ia memasuki pemerintahan dengan membawa asumsi ideologis bahwa Indonesia sejatinya negara kaya raya, tapi kekayaannya tak dinikmati rakyatnya. Sebagian besar rakyatnya justru miskin. Prabowo menyebut “serakahnomics” sebagai musuh Indonesia, dan ia berjanji akan melawannya.

Di antaranya Prabowo menyebut praktik tambang ilegal di Indonesia. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.063 dengan kerugian negara minimal Rp 300 triliun. Ia meminta dukungan dari MPR, DPR, DPD, dan seluruh partai politik untuk menindak tambang ilegal. Pun orang besar/kuat yang berada di balik praktik tambang ilegal.

Presiden Prabowo juga menyinggung keputusannya menghapus hak “tantiem” yang diterima pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mencapai puluhan milyar rupiah per tahun per orang. Prabowo menyebut “tantiem” tak masuk akal, sekadar “akal-akalan”.

Dengan demikian, bisa dibaca bahwa Prabowo tidak melihat IKN sebagai solusi mengubah paradoks Indonesia. Justru sebaliknya, IKN bisa mengganggu program ideologisnya. IKN yang semula dijanjikan oleh Jokowi tidak membebani APBN, ternyata justru bergantung pada APBN.

IKN akan menjadi simbol masa depan Indonesia manakala paradoks Indonesia bisa diakhiri.

“Serakahnomics” bisa dihentikan. Indonesia niscaya akan tenang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur manakala kekayaannya telah sebesar-besarnya dinikmati rakyat.

Rakyat bukan menuntut Prabowo untuk berkantor di IKN. Rakyat menuntut bukti nyata dari pernyataan-pernyataan sang presiden.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/19/05300021/ketika-prabowo-tidak-melanjutkan-warisan-jokowi-di-ikn>

## Membaca Selebrasi Prabowo Untuk Jokowi



Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

**P**uncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra sungguh menjadi selebrasi Presiden Prabowo untuk Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Bukan hanya mengundang Jokowi dan keluarga untuk hadir, Prabowo juga memberi tempat istimewa. Jokowi duduk tepat di sebelah kanan Prabowo. Ia juga memberi hadiah keris, memberi kesempatan Jokowi berpidato.

Bahkan, dalam pidato politiknya, Prabowo juga banyak memuji Jokowi (meski semua presiden terdahulu juga dipuji) dan mengakui terang-terangan peran

Jokowi dalam memenangkan dirinya. “Hidup Jokowi,” teriak Prabowo disambut tepuk tangan audien dan nyanyian “Terima Kasih Jokowi”.

Sementara itu, ruang publik sedang hangat menyoroti Jokowi, bahkan muncul desakan “adili Jokowi”. Sejumlah persoalan besar yang kini membelit rakyat dibaca oleh publik sebagai tinggalan Jokowi.

Misalnya, Ibu Kota Nusantara (IKN), pagar laut di Tangerang, Pantai Indah Kapuk (PIK)-2, Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berelasi satu dengan yang lain, dibaca publik sebagai warisan Jokowi.

Program-program yang oleh publik dinilai mercusuar itu dinilai berhubungan dengan ambisi dan kepentingan Jokowi, dan kini menjadi beban berat Prabowo. Sementara itu, sebagai presiden tentu saja Prabowo memiliki program sendiri, yang juga membutuhkan anggaran sangat besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Tentu saja eksekusinya potensial bersimpang jalan dengan program mercusuar warisan Jokowi.

Logika itu dibaca Prabowo seolah-olah ada pihak yang hendak memisahkan dirinya dengan Jokowi.

## **Kenegarawanan**

Pidato Prabowo dengan gaya khasnya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra itu benar-benar dimanfaatkan untuk membangun citra kenegarawanan dirinya. Di depan tamu undangan dari beragam partai politik, pejabat negara dan mantan pejabat, serta kader Gerindra, yang juga ditonton jutaan mata, sang presiden

dengan berapi-api menunjukkan sikapnya untuk menghormati dan menjaga martabat serta marwah para mantan presiden Indonesia.

Kata Prabowo, masing-masing presiden memiliki bagiannya. Bung Karno meletakkan fondasi. Presiden Soeharto membangun, begitu seterusnya hingga Jokowi. Masing-masing telah memberikan jasa-jasanya. "Tak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa," kata Prabowo.

Jelas sekali pesannya. Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai negarawan sejati. Persaingan politik tak jarang memang keras, tapi sekeras apapun semua pihak harus saling berangkuhan.

Sikap Prabowo itu tak aneh. Ia pernah bersaing sengit dengan Jokowi dalam dua kompetisi pemilihan presiden, dan kalah. Namun, Prabowo tak keberatan menjadi menterinya Jokowi. Pun mengakui bahwa Jokowi adalah guru politiknya.

Kita juga ingat, setelah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih, Prabowo menggulirkan gagasan membentuk wadah diskusi antara presiden dan mantan presiden, serupa "The President's Club" di Amerika Serikat. Wadah itu digagas Prabowo untuk mencari jawaban atas berbagai masalah kebangsaan. Meski wadah yang dikehendaki itu hingga kini jauh dari kenyataan.

Kenegarawanan presiden bukan hanya baik dan positif, tapi keharusan. Seorang presiden idealnya bukan sekadar politikus, melainkan negarawan. Kenegarawanan mengandung muatan-muatan normatif yang berbeda

dengan politikus. Negarawan melampaui kualifikasi politikus.

Semua warga negara berhak menjadi politikus, tetapi tidak semua politikus memiliki kualifikasi negarawan. Di dalam politik berkelindan kepentingan-kepentingan pragmatis. Namun, di sana juga tidak melulu berurusan dengan kepentingan pragmatis belaka.

Di sanalah kualitas politikus yang negarawan dibutuhkan, yakni kualitas tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari keutamaan moral yang dimiliki seseorang, yang membuatnya bijak dan bajik. Negarawan tidak dikurung oleh kesempitan kepentingan yang mengancam keseluruhan, tetapi mengutamakan kepentingan keseluruhan dan menjamin keutuhan bangsanya.

*"MY loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins,"* kata Manuel L. Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina 1935-1944. Loyalitas pada partai dan golongan, termasuk keluarga, harus berakhir tatkala loyalitas kepada negara dimulai.

## **Berlebihan**

Namun, menurut saya, kenegarawanan yang hendak ditunjukkan Prabowo itu justru dirobahkan sendiri oleh selebrasi yang berlebihan, lebay, terhadap Jokowi. Sebaliknya Prabowo cenderung sinis terhadap kritik-kritik publik.

Selebrasi untuk Jokowi oleh Presiden Prabowo tentu saja hak sang presiden. Prabowo memiliki alasan-

alasan untuk merayakannya, memujinya, termasuk menyambutnya dengan teriakan "Hidup Jokowi" dan nyanyian "Terima Kasih Jokowi". Termasuk pula memberi Jokowi panggung untuk berpidato. Saya kira, sepenuhnya hak Prabowo.

Prabowo terang-terangan mengakui bahwa keterpilihan dirinya sebagai Presiden ke-8 RI tidak terlepas dari dukungan Jokowi saat menjabat presiden. Saya kira, tak ada yang membantah. Cawe-cawe Jokowi telah menjadi diskusi publik jauh sebelum pemilihan presiden berlangsung.

Namun, menurut saya, dukungan Jokowi bukan cuma-cuma, buka gratisan. Berlaku resiprositas, timbal-balik, dan Prabowo sesungguhnya telah melunasi.

Tentu saja Prabowo memperoleh dukungan sangat besar dari Jokowi, mengingat ia menggandeng Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Kala itu Gibran belum memenuhi syarat usia sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Karena itu, kesediaan Prabowo menjalani proses politik hingga Gibran berhasil menjadi cawapres (meski mencederai kepatutan) sesungguhnya "modal" yang setara dengan "modal" yang diberikan Jokowi. Kepentingan keduanya bertemu, sehingga masuk akal bila terjadi "saling dukung". Keduanya setara, tak ada subordinasi.

Namun, terasa sekali selebrasi yang diberikan kepada Jokowi itu terkesan sebagai politik balas budi. Sekaligus menepis opini publik yang oleh Prabowo

dibaca sebagai politik pecah-belah antara dirinya dan Jokowi.

Namun, saya membaca justru mereduksi visi politik dan kenegarawanan yang dipromosikan Prabowo tatkala pada saat yang sama ia sinis terhadap kritik publik. Sinisme itu diekspresikan melalui kata “ndasmu” (kepalamu) dengan gestur mengejek sehubungan dengan kritik publik.

Kata “ndasmu” dalam perspektif bahasa (budaya) Jawa mengekspresikan sikap sinis, jengkel, marah. Atau, ekspresi psikologis tak hormat dan cenderung merendahkan, mengejek.

Tentu saja, menurut hemat saya, sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden di depan publik, sementara pada saat yang sama sang presiden juga mempromosikan kenegarawanan dan mempersilakan pemerintah yang dipimpinnya dikritik.

Di HUT Ke-17 Partai Gerindra itu Presiden Prabowo kembali dengan lantang menegaskan komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk membela dan memenangkan kepentingan rakyat. Di banyak mimbar, sang presiden selalu mempromosikan politik kerakyatan yang menjadi haluannya.

Masalahnya, sejauh ini antara bahasa pidato dan kenyataan, antara ucapan dan tindakan, masih terjadi kesenjangan. Ada diskrepansi.

Sejarah akan menguji apakah tepuk tangan gemuruh hanya dilakukan para pejabat mengiringi bahasa pidato sang presiden, ataukah dilakukan rakyat di kehidupan sehari-hari mereka.

Di sanalah politik kerakyatan sesungguhnya. Di sana pula ujian bagi Prabowo yang telah didaulat oleh partainya untuk menjadi calon presiden 2029, sementara itu kelulusan kepemimpinannya belum bisa dilihat.

Bahkan, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya malu untuk maju lagi pada 2029 bila ternyata politik kerakyatan yang dengan penuh semangat dipidatokan tak menjadi kenyataan. Pun ujian bagi sang presiden, bila dalam rangka politik kerakyatan, bila Prabowo harus meniadakan jurang antara ucapan dan tindakan, ternyata harus berpisah dengan Jokowi.

Sejarah sering kali berkehendak lain. Tak terbayangkan bahwa Prabowo yang semula berhadapan dengan Jokowi akhirnya bertemu; dan Megawati yang semula bersama Jokowi akhirnya berbeda jalan. Sejarah punya hukumnya sendiri.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/09341791/membaca-selebrasi-prabowo-untuk-jokowi>

## Selamat Datang “Politik Pokok Tanpa Tokoh” (Bagian 1)



Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Warga melakukan aksi di depan tumpukan sampah di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025). Bungkusan sampah yang digantung tersebut merupakan bentuk protes atas terjadinya berbagai kekerasan ketika unjuk rasa beberapa waktu lalu sekaligus menuntut Pemerintah dan DPR agar segera membuat berbagai kebijakan yang adil kepada rakyat Indonesia. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

**N**eपाल bergolak. Protes rakyat Nepal yang diorkestrasi Gen Z berujung krisis politik. Pemerintahan Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli, pun runtuh.

Hal lain yang juga menarik dicatat, setelah gelombang protes besar-besaran yang meruntuhkan rezim, rakyat Nepal menggunakan aplikasi Discord untuk melakukan pemungutan suara. Mereka memilih perdana menteri (PM) sementara. Terpilih lah Sushila

Karki, ketua Mahkamah Agung Nepal, sebagai PM sementara.

Di Indonesia lebih dulu terjadi gejolak. Meski tak sampai menjatuhkan rezim pemerintahan, kita menyaksikan gelombang protes yang diorkestrasi Gen Z pada akhir Agustus 2025.

Begitu cepat gelombang protes itu menerjang warga di sejumlah kota di Indonesia. Begitu cepat pula membuahkannya rumusan: "17+8 Tuntutan Rakyat: Transformasi, Reformasi, Empati". Dan, dengan cepat pula didesakkan kepada rezim penguasa.

Rezim penguasa pun merespon dengan cepat, meski tidak semua tuntutan. Setidaknya, pemberian peningkatan fasilitas anggota DPR dibatalkan. Beberapa anggota DPR yang disorot publik juga dinonaktifkan.

Presiden Prabowo juga mengganti beberapa menteri di kabinetnya, bahkan dua kali pada September ini saja. Namun, apakah melegakan publik? Kita lihat saja pada hari-hari ke depan.

Di Albania lebih radikal lagi. Perdana Menteri Albania, Edi Rama, menunjuk kecerdasan buatan (AI) yang diberi nama Diella sebagai menteri virtual. Diella, yang dalam bahasa Albania berarti 'matahari', adalah anggota kabinet virtual yang diciptakan oleh AI. Diella bertugas mengawasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Albania.

Untuk urusan tender yang potensial dikorupsi rupanya Albania tidak lagi percaya kepada tokoh sungguhan. Tentu saja sangat radikal, dan mengoyak tata pemerintahan konvensional.

Lalu, apa yang bisa kita catat (sebagai hipotesis)? Rupanya kini telah datang era politik baru, yakni politik “pokok tanpa tokoh”.

Politik tetap didasari dan diasuh oleh “pokok”, yakni ide dan pemikiran yang muncul sebagai jawaban atas persoalan yang timbul. Namun, tak membutuhkan “tokoh” sebagai artikulator.

Nepal, Indonesia, Albania, dan boleh jadi juga di tempat lain di belahan bumi ini, menjadi saksi atas peristiwa politik mutakhir yang digerakkan oleh Gen Z dengan instrumen utama media sosial.

Gen Z sering digambarkan generasi yang kreatif dan penuh ide, ber-DNA digital, tapi manja, rapuh, terlalu emosional. Disebut juga “generasi stroberi”. Namun, zaman dengan gawai yang selalu digenggamnya telah membentuk pola, model, paradigma baru berpolitik dan bernegara.

Mereka punya cara sendiri memandang dan menilai realitas serta menaruh harapan kepada negara sehubungan dengan realitas itu. Mereka muak dan marah terhadap sistem politik dan pemerintahan yang korup, pembangunan yang timpang, dan pasar kerja yang menutup harapan. Mereka melawan otoritarianisme, ketidakadilan, dan masa depan yang tak pasti.

Gen Z tumbuh dalam dunia yang dicekam ketidakpastian akibat krisis lingkungan oleh eksploitasi alam yang rakus. Mereka mulai merasakan kegetiran hidup, sementara mereka melihat para elite penguasa berfoya-foya mengumbar gaya hidup hedonistik. Elite

dianggap mati rasa atas masa depan mereka yang tak menentu.

Di Indonesia, mereka berteriak “Indonesia Gelap”, “Kabur dulu aja!” Semakin lebar jurang antara harapan dan kenyataan, semakin kuat gejala diskrepansi yang mereka lihat, semakin tebal amunisi kemarahan mereka.

Hal-hal itu menjadi “pokok” politik dewasa ini. Di sana terdapat kritik, ide, dan segenap pemikiran sebagai tanggapan terhadap realitas yang ada. Yang menarik, mengapa “pokok” menihilkan “tokoh”? Lalu, bagaimana seyogyanya negara (penguasa) membaca fenomena politik mutakhir ini?

## **Artikulator**

Dulu, setiap perubahan politik besar senantiasa bersama dan melahirkan tokoh. Dia lah artikulator dari pokok yang hendak disuarakan publik.

Di Indonesia, misalnya, kehendak kemerdekaan (sebagai pokok) melahirkan tokoh besar. Di antaranya, Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka. Perubahan politik besar pada dekade 1960-an dengan pokok “tritura” (Bubarkan PKI, Perombakan Kabinet Dwikora, Turunkan Harga) juga dibersamai dan melahirkan tokoh. Di antaranya, Soeharto, Abdul Gafur, Fahmi Idris.

Lalu, perubahan politik pada 1998 yang dikenal sebagai Gerakan Reformasi juga dibarengi tokoh. Di antaranya, Gur Dur, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubowono X.

Pokok selalu melekat pada tokoh. Mereka adalah artikulator. Mereka memimpin langsung secara nyata di

lapangan bagaimana pokok itu diartikulasikan. Karena itu, masuk akal bila tokoh-tokoh itu lalu memimpin pemerintahan tatkala perubahan politik berujung perubahan rezim.

Namun, Nepal mengambil jalan lain. Albania lebih radikal. Indonesia pun tanpa tokoh memaksa rezim pemerintahan berubah. Relasi antara pokok dan tokoh rupanya sangat dipengaruhi oleh model komunikasi yang dominan di masyarakat.

Ketika tradisi kelisanan (*orality*) primer menjadi satu-satunya model komunikasi, pokok menyatu dengan tokoh. Hanya melalui tokoh lah pokok diketahui. Tradisi kelisanan juga menyatukan antara tokoh dan warga masyarakat. Tokoh hadir langsung di depan warga. Tokoh berbicara langsung di depan warga.

Hubungan keduanya menyatu, tak terfragmentasi. Sebagaimana temuan Walter J. Ong, tradisi kelisanan primer di antaranya memiliki kekuatan menyatukan. Suara mengalir ke dalam pendengar. Warga mengidentifikasi pokok dari tuturan langsung tokoh. Bukan hanya mendengar langsung suara tokoh, melainkan juga (dimungkinkan) melihat sosoknya.

Karena itu, tak aneh bila Soekarno dengan kepiawaian berpidato sangat ditokohkan oleh rakyat jajahan. Soekarno hadir langsung di tengah-tengah rakyat dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Rakyat mendengarkan pidatonya, lalu mengidentifikasi dirinya. Rakyat menemukan dirinya di dalam pidato-pidato Soekarno.

Relasi antara pokok dan tokoh menjauh tatkala model komunikasi mulai didominasi tradisi keberaksaraan (*literacy*). Produk keberaksaraan dengan teknologi cetak massal membentuk jarak antara pokok dan tokoh. Pun jarak antara tokoh dan publik (warga).

Kata Walter J. Ong, penglihatan (dalam konteks keberaksaraan) mengisolasi, membikin jarak, dan membedah. Pembaca tak berhadapan dengan tokoh. Ia berhadapan dengan produk keberaksaraan, seperti buku, koran, majalah.

Pembaca bisa “membunuh” penulis (tokoh). Pembaca hanya berhadapan dengan pokok yang berjarak dengan tokoh, sehingga bisa membedah pokok dan menemukan hal lain yang boleh jadi tak terbayangkan oleh tokoh.

Kata Roland Barthes, penulis telah mati. Penulis menghilang di dalam teks. Ketika pembaca mengeja teks, ia sesungguhnya tidak lagi berhadapan dengan penulis. Tak ada lagi jejak penulis. Pembaca berkesempatan menyingkap makna orisinalitas teks dan bersikap kritis atas pokok yang dibacanya.

Karena itu, berbeda dengan tradisi kelisanan yang menyatukan, tradisi keberaksaraan justru menghadirkan fragmentasi. Sikap kritis pembaca memungkinkan munculnya banyak variasi dari pokok yang sama. Demokrasi bersemi justru pada tradisi keberaksaraan.

Bila tradisi keberaksaraan menjauhkan pokok dari tokoh, rupanya model komunikasi berjejaring dengan teknologi digital dewasa ini sungguh mengakhiri riwayat tokoh. Pokok menihilkan tokoh. Pokok tak lagi

membutuhkan artikulator. Pokok dimiliki bersama, dan diartikulatori bersama.

Model komunikasi berjejaring semakin mendominasi dan menggeser model sebelumnya. Produk keberaksaraan dalam format cetak dan kelisanan sekunder berbasis video (dan radio) mulai ditinggalkan. Kini warga mulai beralih pada media sosial berbasis teknologi digital.

Media sosial menggabungkan tradisi kelisanan sekunder dan tradisi keberaksaraan dalam format digital dan berjejaring. Melalui media sosial, warga terutama Gen Z, memasuki dunia yang oleh Manuel Castells disebut “masyarakat berjejaring” (*network society*).

Di sanalah Gen Z mengartikulasikan pokok, melalui media sosial yang sehari-hari digenggamnya. Mereka memasuki dunia yang berhimpitan satu dengan lainnya. Belum selesai satu isu, muncul isu berikutnya, demikian seterusnya.

Media sosial lalu menjadi arena dinamis yang penuh perubahan. Dan, semua itu tersebar luas secara cepat, berbeda dengan sebelumnya yang bersifat spasial dan terbatas.

Di akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu kita menyaksikan gerakan sosial yang lahir dari jaringan digital. Kita juga menyaksikan bahwa gerakan sosial itu kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan kolektif-politik di ruang publik, tapi tanpa tokoh.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/21/10532511/selamat-datang-politik-pokok-tanpa-tokoh-bagian-i>

## Selamat Datang “Politik Pokok Tanpa Tokoh” (Bagian 2 Habis)



Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA FOTO/Aditya Nugroho)

**S**elamat datang politik “pokok tanpa tokoh” yang diorkestrasi Gen Z. Apakah negara mau mengerti? Atau, akan menganggap renekan Gen Z belaka?

Gen Z benar-benar memanfaatkan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik. Susul-menyusul, timbul-tenggelam. Dari satu isu ke isu lain. Begitu ada objek, terutama kebijakan publik, mereka dengan sigap meresponnya dengan beragam kreasi.

Kesigapan mereka bahkan melampaui kerja jurnalisisme arus utama. Tak jarang media arus utama

malah mengambilnya sebagai sumber berita. Sekadar contoh, menyusul terkuaknya dugaan korupsi di Pertamina yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah ratusan triliun, meme "Klasemen Liga Korupsi Indonesia" mendadak viral.

Keresahan warga terhadap kasus-kasus korupsi besar diluapkan dengan istilah "klasemen" yang terinspirasi dari dunia sepak bola. Dan, viralisasi meme tersebut berlangsung tanpa komando tokoh.

## **Transformatif**

Negara harus realistis dan jujur. Negara harus mau melihat bahwa politik pokok tanpa tokoh ala Gen Z itu tak lain adalah bentukan zaman.

Ia bisa menjadi model baru politik transformatif saat model lama yang berorientasi tokoh terjerembap dalam kubangan korupsi, otoritarianisme, dan ketidakadilan sosial. Tokoh mudah goyah mengikuti arah angin. Awalnya idealis dan galak terhadap korupsi, tahu-tahu terjerembap ikut korupsi. Tak peduli di wilayah sakral.

Nepal memberi contoh bagaimana Gen Z memobilisasi massa dengan cepat, bahkan berhasil membentuk pemerintahan transisi yang dipilih melalui Discord. Indonesia pun memiliki potensi serupa.

Telah diramalkan jauh-jauh hari bahwa teknologi digital akan mentransformasikan dunia secara radikal. Bahkan, sejumlah kalangan percaya bahwa transformasi tersebut menjanjikan bentuk-bentuk komunitas baru yang lebih partisipatif dan demokratis (Fuchs, 2019).

Teknologi digital dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi partisipatif, menumbuhkan kesadaran berkewargaan, dan mentransformasikan praktik mikropolitik.

Kita menyaksikan bagaimana teknologi digital secara nyata meruntuhkan pola hubungan lama yang hegemonik, feodalistik, dan eksploitatif antara “pusat” dan “pinggir”. Dulu, bila kita ingin tahu suatu hal harus datang ke lembaga tertentu yang disebut pusat informasi. Kini, kita bisa tahu banyak hal tanpa beranjak dari satu tempat. Informasi tak lagi dimonopoli suatu lembaga.

Dengan demikian, teknologi digital telah secara nyata menyediakan lanskap baru yang memungkinkan tumbuhnya banyak pusat. Relasinya bukan dengan pola hirarkis seperti dulu, tetapi kolaboratif-sinergis antarpusat.

Saya melihat, cara Gen Z mengorkestrasi protes melalui media sosial merefleksikan pudarnya relasi hierarkis pusat-pinggir yang feodalistik dan eksploitatif menuju relasi kolaboratif-sinergis antarpusat yang demokratis. Dengan media sosial, ekspresi politik menjadi lebih variatif. Tidak hanya narasi tekstual, tetapi juga bentuk-bentuk audiovisual, seperti potongan video dan gambar.

Mereka dapat memberikan pernyataan dan pendapatnya secara bebas. Antara kritik, kecaman, olok-olok, dan sindiran, campur baur dengan bahasa gambar dan kata-kata yang lucu, kocak, menggemaskan, dan unik.

Karena itu, media sosial menjadi sarana kritik baru yang kadar partisipasi publiknya sangat tinggi. Teknologi digital memfasilitasi peran setiap warga secara cepat dan tepat, berbeda dengan media arus utama yang cenderung lambat.

Media sosial membuat warga dapat berperan sesuai kapasitas yang dimau. Mau sebagai kreator, komentator, atau cukup manggut-manggut setuju sambil tersenyum tipis, bisa dilakukan secara mudah dan cepat.

Tak aneh, bila setiap kebijakan publik segera diikuti meme dan sejumlah kreasi dengan nada kritis. Apalagi, bila kebijakan itu kontroversial dan menyusahkan orang banyak.

Karena itu, menurut hemat saya, negara harus membacanya secara cerdas dan bijak. Gairah baru warga dalam berpartisipasi pada urusan publik, meski tanpa tokoh, niscaya akan memberikan kontribusi positif bagi transformasi demokrasi.

## **Kekuatan subjektif**

Bila politik demokrasi dimengerti sebagai proses yang tak pernah final, kehadiran politik pokok tanpa tokoh sangatlah bermakna. Perubahan politik adalah keniscayaan, tapi perubahan itu juga bukan tiba-tiba.

Perubahan realitas tetaplah membutuhkan kekuatan objektif yang berasal dari dinamika material. Namun, juga tak mengabaikan kekuatan subjektif berupa kesadaran warga, yang kini berwujud politik pokok tanpa tokoh.

Sejarah bukanlah bergerak linier dan bisa dikendalikan dari luar. Sejarah tetap dalam proses menjadi dan bergerak secara terbuka, yang di dalamnya berisi jalinan rumit antara yang objektif dan subjektif.

Karena itu, negara tak boleh meremehkan politik pokok tanpa tokoh yang dikreasi Gen Z. Mereka, yang secara statistik memang besar, bukan sekadar target kampanye digital untuk elektoral. Gen Z butuh ruang partisipasi nyata dalam urusan kebijakan publik. Mereka bukan hanya suka gaduh di media sosial. Namun, bagi mereka, ruang digital adalah *public sphere* dalam pengertian Habermas.

Lihatlah, sejumlah tagar dari *#ReformasiDikorupsi*, *#KawalKeputusanMK* hingga *#IndonesiaGelap*, meme dan sejumlah kreasi lucu yang lain menjadi artikulasi politik yang efektif. Sungguh telah datang politik pokok tanpa tokoh.

Indonesia tak harus mengikuti Nepal. Yang dituntut sejatinya bukan perubahan rezim pemerintahan, melainkan perubahan kebijakan. Bukan orang (tokoh) yang terpenting, tapi kebijakan (pokok). Para penyelenggara negara sudah selayaknya peka, melihatnya secara cerdas dan bijak.

Sudah seharusnya Indonesia belajar dari Nepal. Meski tanpa tokoh, Gen Z Nepal terbukti bisa menurunkan rezim pemerintahan, lalu membentuk pemerintahan sementara secara cepat.

Selamat datang politik pokok tanpa tokoh. Politik tak lagi berorientasi pada tokoh, tapi pada pokok.

Hakekatnya sama dengan politik tanpa tepuk tangan,  
tapi mengenyangkan.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/21/11192001/selamat-datang-politik-pokok-tanpa-tokoh-bagian-ii-habis>

# **B**agian 2

## **Kebudayaan dan Mentalitas**

## Cerlang Nusantara dan Tantangan Indonesia



Aliansi Ekonom Indonesia memaparkan tujuh desakan darurat ekonomi yang diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.(SHUTTERSTOCK)

Sebagian besar warga bangsa Indonesia, saya kira, tak sepenuhnya menyadari atribut “raya” yang dilekatkan WR Soepratman pada kata “Indonesia” di lagu gubahannya, “Indonesia Raya”. Kalaupun menyadari, mungkin sebatas Indonesia memang luas, besar dan kaya.

Ternyata Indonesia bukan cuma luas, besar dan kaya. Yudi Latif dalam karya terbarunya yang berjudul *Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?, Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan* (Penerbit Buku Kompas, 2025) menunjukkan signifikansi Indonesia

pada dunia. Penulis buku *Negara Paripurna* itu menyebut Cerlang Nusantara, lompatan-lompatan besar yang memberi arti signifikan bagi dunia, tapi kerap dilupakan, mungkin juga tak disadari oleh bangsa Indonesia sendiri.

Mulai dari geologi, geografi, oseanografi, sumber daya mineral, keanekaragaman hayati hingga hutan tropis dan keindahan alam. Dari paleoantropologi, arkeologi, peradaban maritim, hingga manusia dengan kerajaan agung dan produk budaya sejak prakolonial hingga zaman kemerdekaan.

Sriwijaya, misalnya, mengajarkan bahwa kejayaan sejati lahir dari kolaborasi, bukan dominasi; kebijaksanaan mengelola keragaman, bukan keseragaman. Sriwijaya bertahan tujuh abad bukan karena pasukan besar, melainkan kemampuan membaca perubahan.

Kuliner Nusantara yang terkesan remeh-temeh pun menggerakkan dunia. Rempah yang kuat pada kuliner Nusantara terbukti menggerakkan Barat yang berujung penjajahan. Yudi Latif dengan mengutip Pramoedya Ananta Toer menulis, "Rempah kita mungkin pernah dijajah, tapi rasanya akan selalu merdeka."

Cerlang Nusantara membuktikan bahwa Indonesia bukanlah pinggiran, melainkan nadi dunia. Tanpa Indonesia, dunia tak akan berdenyut.

Cerlang Nusantara yang ditulis Yudi Latif itu pula, saya kira, basis imajinasi WR Soepratman dan kawan-kawan saat mendeklarasikan "tanah air-bangsa-bahasa Indonesia" dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" pada

1928. Dan, kini terbukti, bahasa Indonesia yang dulu berfungsi lingua franca akhirnya diterima sebagai bahasa resmi UNESCO sejak 2023.

Di stanza kedua dan ketiga “Indonesia Raya” (stanza yang sangat jarang dinyanyikan dan boleh jadi banyak yang tak mengenalnya), tertulis:

(2)

*Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya  
Di sanalah aku berdiri untuk s'lama-lamanya  
Indonesia tanah pusaka, p'saka kita semuanya  
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia*

.....

(3)

*Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti  
Di sanalah aku berdiri 'njaga ibu sejati  
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi  
Marilah kita berjanji Indonesia abadi*

.....

Sangat mendalam maknanya, baik secara historis, antropologis, maupun kosmologis. Istilah “tanah pusaka”, misalnya, khas dalam sejarah dan antropologi. “Tanah pusaka” menandai perikatan yang teramat dalam antara tanah dan orang yang hidup di atas tanah tersebut. Diberi bobot keramat (*fetish*) yang harus dirawat, diselamatkan, dilestarikan, bila perlu dengan taruhan nyawa.

Di bagian akhir stanza ketiga, diseru:

*S'lamatlah rakyatnya,  
S'lamatlah putranya,  
Pulaunya, lautnya, semuanya,*

*Majulah Neg'rinya,  
Majulah pandunya,  
Untuk Indonesia Raya.*

Jelas sekali "Indonesia Raya" bukan imajinasi tanpa dasar. Atribut "raya" layak disandang oleh Indonesia, karena jejak masa lalu Nusantara yang gilang-gemilang.

Tak aneh bila Indonesia yang masih muda belia sukses menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955. KAA merupakan Cerlang Indonesia pada dunia. Jejak historisnya mengamini Soekarno dan para pemimpin Indonesia saat itu didengar pemimpin dunia, khususnya negara-negara di Asia dan Afrika. Spirit pembebasan Indonesia menginspirasi dunia.

Begitu pula ketika Soekarno berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960. Melalui pidato berjudul "To Build The World Anew", Soekarno menawarkan Pancasila sebagai ideologi universal yang relevan untuk membangun dunia baru yang saat itu bipolar. Dan, Yudi Latif pun mencatatnya sebagai signifikansi Pancasila bagi dunia, baik masa lalu maupun masa kini.

Peristiwa tersebut bukan datang begitu saja. Bukan tanpa riwayat yang membuat Indonesia pantas disegani.

## **Ikhtiar membalik arus**

Cerlang Nusantara yang diungkap Yudi Latif mengingatkan bangsa Indonesia untuk tak sekadar mendendangkan “Indonesia Raya” pada acara resmi kenegaraan, tapi ikhtiar serius membalik arus, meraih status “raya” betulan.

“Indonesia Raya” bukan sekadar identitas kebangsaan untuk seremoni, melainkan mengantarkan subjek (yang menyanyikan) memasuki – meminjam antropolog Arnold van Gennep – fase liminal. Dalam perspektif van Gennep, fase liminal adalah fase reflektif yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Meskipun waktu refleksi (durasi menyanyikan 3 stanza) tak sampai 5 menit.

Karya setebal 750 halaman itu oleh penulisnya dibuat bukan sebagai glorifikasi masa lalu, melainkan sebagai ikhtiar menegakkan keadilan. Menurut Yudi Latif, mustahil “Ibu Semesta” menakdirkan satu belahan bumi saja sebagai pusat kejayaan dan kemakmuran, sementara belahan lain terjerembab dalam kubangan kemiskinan dan kesengsaraan yang tak berakhir.

Sejauh ini, Indonesia sebagai bangsa pascakolonial, selalu menerima pandangan yang bias Barat. Peradaban agung seolah hanya milik Barat, sehingga yang lain harus berguru dan tunduk pada Barat. Sejarah seolah mengalir satu arah, dari Barat ke Timur.

Pandangan bias Barat itu selayaknya dibaca ulang dengan membuka kemungkinan arus balik, dari Timur ke Barat. Ada masa ketika Barat gelap, lalu bangkit dengan

nyala obornya. Pun ada masa tatkala Timur berjaya, lalu mundur memasuki kegelapan.

Peradaban bukan gerak linier yang dimonopoli satu kutub. Peradaban, menurut Yudi Latif, sejatinya merupakan proses perjumpaan: saling belajar, saling melengkapi, saling menyempurnakan.

Hal serupa juga pernah diingatkan oleh Pramoedya Ananta Toer melalui karya fiksi yang berjudul *Arus Balik*. Bila Yudi Latif menggunakan oposisi biner Barat:Timur, Pram memakai Utara:Selatan.

Arus sejarah bergerak dari Nusantara di belahan bumi Selatan ke belahan bumi Utara. Namun, pada masa tertentu arus berbalik. Utara menyerbu Selatan. Utara menguasai jalur rempah, menguasai urat nadi Nusantara. "Kapal kita makin lama makin kecil. Seperti kerajaannya. Kapal besar hanya bisa dibuat oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara," seru Wiranggaleng di novel *Arus Balik*.

Dengan demikian, atribut "raya" yang dilekatkan pada Indonesia merefleksikan kesadaran membalik arus yang dilandasi jiwa merdeka. Hanya dengan jiwa merdeka, lompatan besar peradaban Nusantara dimungkinkan timbul kembali, tentu dengan format baru Indonesia modern.

Secara metaforis, Yudi Latif menyebut laksana pohon yang berakar dalam tanah leluhurnya, sementara ranting dan daunnya terbuka menyerap cahaya dari segala penjuru langit.

Para pendiri bangsa telah memberikan teladan. Pancasila yang diterima sebagai dasar negara, misalnya, menurut Bung Karno “digali” dari bumi Indonesia. Cerlang Nusantara dipelajari dengan baik, demikian pula pemikiran lain dari Barat. Pengetahuan dan pemikiran tidak ditelan begitu saja, tapi dikunyah hingga dirasakan kecocokannya.

### **Selamat atau involusi makin rumit**

Jalan membalik arus sejatinya telah dimulai dan makin terbuka pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa yang diakui dunia. Bahkan, spirit pembebasannya berkontribusi besar pada kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Namun, secara substantif ternyata tak mudah dijaga dan kini menjadi tantangan serius kita bersama. Kini, kita memasuki labirin yang penuh jebakan pascakolonial. Jebakan itu memang tertanam begitu mendalam tatkala Nusantara dirundung kekalahan demi kekalahan.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan berhasil melewati usia satu abad pada 2045 dengan selamat? Ataukah, akan terjadi involusi yang makin rumit, yang akan menunda, bahkan mengubur status “raya”? Tak mudah menjawabnya. Yang pasti, hari ini kita dikelilingi absurditas, paradoks, dan ironi yang makin menjadi-jadi. Ambil beberapa saja.

Korupsi dan beragam *underground economy* di negeri ini sungguh absurd. Dilakukan secara berjamaah oleh pembesar negeri. Melibatkan eksekutif, legislatif,

yudikatif, dan kalangan cerdas pandai. Tak peduli wilayah sakral.

Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dalam pidato Dies Natalis ke-61 Fakultas Hukum Universitas Jember, 15 November 2025, angka korupsi dan *underground economy* (ekspor/impor ilegal, *under-invoicing*, narkoba, judi *online*) diperkirakan per tahun mencapai Rp.1.500 – 2.000 trilyun. Sungguh absurd.

Juga soal keadilan sosial. Kalangan elite pesta pora kemewahan, sementara banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Tak sedikit pula rakyat terjerat judi online dari bantuan sosial.

Kemuliaan, keutamaan dan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan agama, filsafat, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal bagaikan kotbah di tengah keriuhan pasar. Ia berbenturan dengan perjuangan hidup yang penuh persaingan tak berkeadilan dan mati rasa kemanusiaan.

Suasana sedih menyelimuti bangsa ini. Ternyata, di usia 80 tahun, anak-anak muda malah menginterupsi pemimpinnya dengan teriakan “Indonesia Gelap” dan berseru “Kabur Aja Dulu”.

Kini, yang paling dibutuhkan, saya kira, ekosistem yang menyuburkan pertumbuhan ruang-ruang kreatif yang dilandasi jiwa merdeka. Bagaikan tanaman, bibit yang baik niscaya tumbuh subur di lahan yang subur.

Namun, negeri ini memiliki pengalaman buruk yang membunuh kreativitas, dan terbiasa dengan praktik seperti itu. Di samping hal-hal yang bersifat birokratis,

pengalaman buruk itu berupa sistem pemaknaan yang monolitik dan hegemonik oleh penguasa.

Kekuasaan cenderung menutup ruang-ruang kreatif, alergi kritik. Kekuasaan lebih menyukai teks yang monolitik, bukan teks yang bersilangan. Tanpa persilangan teks, tak ada refleksi/sintesis.

Melalui karya *magnum opus*-nya, Yudi Latif mengingatkan kembali perihal lompatan besar peradaban Nusantara sebagai pandu masa depan. Bukan hanya buat Indonesia, melainkan juga dunia.

Ia mengutip pandangan dekonstruksi dari nelayan Bugis di Wajo, "Laut bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu kita." Pandangan ini jelas mengoreksi pandangan serakah yang eksploitatif terhadap alam tanpa prinsip keberlanjutan.

Pandangan nelayan Bugis itu kini mulai terdengar sebagai pandangan global. Pandangan semacam itu menguatkan sikap dunia untuk memaksa negara-negara industri maju membayar utang ekologis.

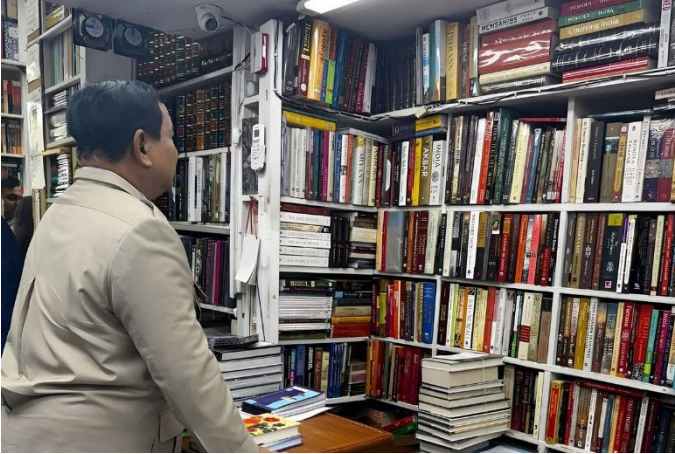
Kini, tinggal bagaimana kita membaca, mengolah, dan memaknai Cerlang Nusantara sebagai "pencerahan" (*aufklärung*). Barat pun bangkit dan berjaya berkat penemuan kembali khasanah budaya Yunani dan Romawi.

Mampukah bangsa Indonesia? Para pendiri bangsa telah memulai. Dan, kini giliran kita.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/13355391/cerlang-nusantara-dan-tantangan-indonesia>

## Prabowo, Tradisi Literasi dan Demokrasi



Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk singgah di toko buku langganannya di sela kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India, Jumat (25/1/2025) waktu setempat.

(Dok. Instagram Presiden Prabowo Subianto )

**D**i sela-sela kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk singgah ke toko buku. “Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi,” tulis Prabowo dalam keterangan di postingan akun Instagram pribadi, *@prabowo* (*Kompas.com*, 25/1/2025).

Postingan itu menarik di mata saya. Meskipun remeh temeh di tengah masalah kenegaraan yang berat dan harus diselesaikan Prabowo di usia kepemimpinannya yang belum genap 100 hari kerja.

Presiden singgah ke toko buku sama sekali tak berarti disandingkan dengan pagar laut yang menyita perhatian publik karena keanehan dan keajaibannya.

Sangat tak ada apa-apanya dibandingkan dengan urusan korupsi yang sudah sedemikian kronis menyandera negara.

Dari sudut jurnalistik pun, Prabowo mendatangi toko buku dan memborong buku juga bukan berita (*news*) lagi. Tak punya nilai berita.

Publik sudah mafhum mendengar Prabowo belanja buku, membaca dan mengoleksinya. Sudah banyak yang tahu bahwa Prabowo itu penggila buku. Belanja, membaca dan mengoleksi buku telah menjadi kegemarannya sejak muda.

Tak aneh bila Prabowo juga menulis sejumlah artikel dan buku. Tak aneh pula bila Prabowo di sejumlah ceramah dan pidatonya sangat percaya diri tanpa naskah dan menguasai masalah, baik lingkup nasional maupun internasional.

Dari artikel dan buku-bukunya, Prabowo tampak sangat paham ideologi-ideologi besar dunia dan praktiknya. Ia juga bukan hanya tahu pemikiran dan seluk-beluk kepemimpinan militer, tapi juga sangat paham kepemimpinan sipil. Prabowo sangat mengerti dan sadar tentang geopolitik bagi sebuah negara.

Tentu saja semua itu berkat kegemaran Prabowo membaca dan kecintaannya pada buku. Tradisi literasi (keberaksaraan) telah secara intensif membentuknya.

Maka, postingan tersebut sudah pasti bukan pencitraan sang presiden. Menurut hemat saya, begitulah seharusnya pemimpin politik dalam lanskap negara demokrasi. Bukan hanya pada level presiden, tapi juga pemimpin politik lainnya.

Para pemimpin politik itu produk tradisi literasi sekaligus agen penting literasi. Kematangan literasi para pemimpin politik Indonesia niscaya membentuk kepemimpinan demokratis.

### **Keterbukaan**

Walter J. Ong menunjukkan bahwa aksara menghasilkan budaya keterbukaan, partisipasi, egalitarianisme. Aksara juga memunculkan budaya kritik.

Buku dan produk keaksaraan lain memisahkan pembaca dari penulisnya. Ada jarak antara penulis dan pembaca yang memungkinkan pembaca melakukan refleksi kritis.

Buku dan produk keaksaraan lain juga menghasilkan persebaran dan perluasan informasi dan pengetahuan. Ia meruntuhkan dominasi, sentralisasi.

Demokrasi mensyaratkan kesanggupan seseorang memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain. Demokrasi membutuhkan kesediaan menerima dan berbagi kepada orang lain.

Karena itu, demokrasi mengandaikan adanya nilai-nilai utama, di antaranya keterbukaan, partisipasi, egalitarianisme dan kritik. Nilai-nilai utama itu bisa ditumbuhkan oleh kekuatan literasi.

Hal itu berbeda dengan tradisi kelisanan (*orality*). Kelisanan menghasilkan pemusatan, penggabungan, penyatuan. Tak ada jarak antara penutur dan pendengar. Tradisi kelisanan tak membuka perluasan informasi dan pengetahuan. Hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan.

Kelangkaan tersebut menghasilkan budaya elitisme, dominasi dan pemberian hak istimewa (*privilege*) kepada sedikit orang (elite).

Bila kelisahan menciptakan elitisme, keberaksaraan menumbuhkan egalitarianisme. Perluasan kemampuan literasi dan jumlah bacaan dengan sendirinya mendorong desentralisasi penguasaan informasi dan pengetahuan yang berujung pada kesederajatan.

Begitulah, banyak kalangan meyakini bahwa demokrasi bisa tumbuh kuat bila tradisi literasi juga kuat. Kita sering merujuk Athena (Yunani) sebagai "proto demokrasi". Masuk akal, karena tradisi literasi tumbuh kuat di sana. Peradaban Yunani tumbuh di atas tradisi baca-tulis warganya.

### **Pelemahan literasi**

Indonesia jelas produk tradisi keberaksaraan. Para pendiri bangsa merayakannya dengan penuh semangat meski dalam situasi yang serba terbatas. Dengan penuh semangat mereka membaca, menulis, dan berdebat melalui surat kabar.

Hasilnya berupa "bayi kebangsaan", yang kelak mendeklarasikan diri sebagai "bangsa Indonesia" yang berhasrat memerdekakan diri dari penjajahan negara kolonial. Tanpa literasi yang kuat mustahil bangsa Indonesia terbentuk dan meraih kemerdekaan.

Karena itu, sangat masuk akal bila para pendiri bangsa memilih negara demokrasi untuk negara Indonesia yang didirikan. Bukan negara agama, bukan

pula negara kekuasaan, juga bukan monarki dan oligarki.

Meminjam Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPK, "Indonesia didirikan sebagai negara 'semua buat semua'; bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua'. Dengan demikian, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bisa dinikmati semua kalangan."

Namun, kemerdekaan selama ini ternyata tak sungguh-sungguh menguatkan tradisi literasi. Kepemimpinan politik justru menjauh dari kehendak awal Indonesia merdeka.

Teeuw pernah meneliti teks Pidato Kenegaraan 1988. Profesor asal Belanda itu menemukan analogi antara teks tersebut dengan puisi-puisi lisan yang menonjol pada masyarakat niraksara.

Keduanya sama-sama mengandung teknik formulaik yang kuat. Tanpa memorisasi pun, dengan teknik formulaik, teks tersebut dapat diturunkan oleh siapapun asal menguasai formula-formulanya. Misal, formula "pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila", "stabilitas nasional untuk pembangunan", dan sebagainya.

Teks Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, menurut Teeuw, menyediakan bahan-bahan yang siap pakai. Para pejabat lain dapat memanfaatkannya sebagai bahan pidato yang pesan hakikinya sama, tapi mudah disesuaikan dengan sidang pendengar.

Dengan kata lain, teks Pidato Kenegaraan Soeharto merupakan induk atau pusat. Teks tersebut diturunkan menjadi teks pidato pejabat lain dengan teknik formulaik. Menurut Teeuw, lewat teknik formulaik itulah sidang pendengar akan terkontrol sedemikian rupa.

Dengan demikian, yang dipraktikkan selama Orde Baru pada hakekatnya bukan penguatan literasi. Tak ada memorisasi, tak ada ruang untuk kritik. Yang terjadi justru pelemahan literasi sebagai basis pembentukan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya, gegap gempita perayaan runtuhnya Orde Baru ternyata juga tak disambut penguatan literasi demokrasi yang oleh Orde Baru dilemahkan. Perangkat keras demokrasi memang berhasil diubah, seperti kebebasan mendirikan partai politik, pendirian MK dan KPK, pemilihan presiden dan kepala daerah langsung, tapi perangkat lunaknya masih berjiwa tiran, feodal, elitis.

Demokrasi yang kita praktikkan bukan memuliakan "demos" (rakyat), tapi justru membunuhnya, bak cerita Malin Kundang. Sejumlah perubahan kelembagaan demokrasi tak membuat rakyat berdaya secara politik.

Kepemimpinan politik justru mengalami defisit keintelektualan dan moralitas. Jagat politik dibanjiri politikus model rasionalitas pragmatis. Kian langka politikus rasionalitas substantif. Meritokrasi semakin tersisih oleh mediokrasi.

## **Paradoksal**

Lihatlah, betapa wajah kita penuh paradoksal. Dari hari ke hari gambaran paradoks itu semakin tampak, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Presiden Prabowo sendiri mengakui dan menyebutnya “Paradoks Indonesia”, di antaranya negeri kaya tapi rakyatnya miskin.

Akibatnya, kita menjadi serba gamang untuk melangkah menghadapi perubahan-perubahan. Kalaupun tidak begitu, kita menjadi reaktif, sekadar respon sesaat dalam bentuk pernyataan tanpa kesungguhan tindakan.

Hal itu tampak sekali, misalnya, dari cara negara merespon fakta pagar laut di Tangerang yang menghebohkan beberapa hari belakangan, yang sekaligus menandai paradoks itu. Negara tampak ragu-ragu dan lamban. Tak aneh bila pagar laut itu disebut “misteri”, mengingat negara ternyata tak menemukan siapa yang bertanggung jawab.

Juga terasa bagaimana kita menanggapi publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Organisasi para jurnalis investigasi dunia itu menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Juaranya Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad. Kita tampak gamang menanggapi. Terkesan tak mau ambil resiko atas “bola panas” yang dilemparkan OCCRP.

Hal ini juga tampak dari “keengganan” institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dan

desakan sejumlah masyarakat sipil sehubungan dengan temuan OCCRP.

Wajah paradoksal itu harus segera diakhiri. Saatnya kepemimpinan politik Indonesia dikembalikan pada akarnya. Kita mempunyai teladan kepemimpinan politik yang dibentuk oleh tradisi literasi yang kuat, yakni para pendiri bangsa. Produknya pun monumental dan menyejarah.

Saatnya para pemimpin politik Indonesia menghidupkan tradisi keberaksaraan secara sungguh-sungguh. Demokrasi hanya akan tumbuh subur di bumi yang menyediakan budaya literasi yang kuat. Dan, saatnya Presiden Prabowo memimpinya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/30/05300511/prabowo-tradisi-literasi-dan-demokrasi>

## Badan Kita Bau Kolonial



Bendera Indonesia.(Thinkstock)

"Kemanusiaan – tugas etis yang diembannya – ditantang gejala zaman. Zaman yang memilih arahnya sendiri bagai angin puyuh menerpa wajah kemanusiaannya. Berat. Berat bagi Idenburg..." tulis Pramoedya Ananta Toer mengawali novelnya yang berjudul *Rumah Kaca*.

**S**iapa Idenburg? Nama lengkapnya Alexander Willem Frederik Idenburg, seorang gubernur jenderal Hindia-Belanda (1909-1916). Ia menggantikan Johannes Benedictus Van Heutsz (1904-1909).

Idenburg adalah gubernur jenderal Hindia-Belanda pertama yang menuai buah kebijakan etik pemerintah Belanda. Idenburg lah gubernur jenderal pertama yang

merasakan gelombang perlawanan bumiputra dengan cara baru.

Cara baru itu sesungguhnya anak sah (meski tak dikehendaki) dari kebijakan etik yang dimulai pada awal abad ke-20. Maka, seperti kata Pram, "Berat. Berat bagi Idenburg...." Berbeda dengan Van Heutsz, pendahulu Idenburg, yang sukses menggenapkan wilayah jajahan Hindia-Belanda dari Sabang sampai Merauke. Tentu dengan cara militer.

Van Heutsz lah pahlawan Perang Aceh di mata Belanda. Karena prestasi itu, nama Van Heutsz sangat dikenang, lalu diabadikan sebagai nama kapal pada 1926, Kapal Van Heutsz.

Idenburg, juga Van Heutsz, tentu saja pernah menempati "Hotel Gubernur Jenderal", yang sejak Indonesia Merdeka digunakan sebagai Istana Negara. Kemegahannya, apalagi dilihat dari masa pembangunannya, menyiratkan kekuasaan besar penghuninya.

Presiden Indonesia berkantor di sana. Maka, tak ada yang aneh bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan bau kolonial di Istana Negara. Kata Jokowi, setiap hari dirinya dibayang-bayangi bau kolonial. Saya yakin, presiden-presiden sebelumnya pun demikian.

Saya juga selalu merasakan bau kolonial saat kereta api yang saya tumpangi melintasi Terowongan Mrawan yang menghubungkan Jember – Banyuwangi (Jawa Timur). Bau kolonialnya kuat sekali.

Terowongan sepanjang 690 meter yang menembus perut Gunung Gunitir itu mulai dibangun pada zaman

Gubernur Jenderal Willem Rooseboom (1901). Dilanjutkan Gubernur Jenderal Van Heutsz, dan baru selesai pada awal Gubernur Jenderal Idenburg (1910).

Apa yang terbayang dari bau kolonial saat kereta api melewati Terowongan Mrawan? Tanpa kekuasaan besar (terutama pengerahan tenaga kerja), tanpa modal dan kepentingan besar, mustahil terowongan kereta api sepanjang 690 meter diselesaikan pada masa itu.

Bukan kekuasaan besar, modal dan kepentingan besar saja. Di sana berkelindan pula nilai-nilai dan ilmu pengetahuan baru (modern) yang berbeda corak dengan yang dikuasai nenek moyang kita.

Itulah “zaman baru”. Kereta api – kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau, sebuah kereta yang dihidupi oleh api – menderu-deru di atas rel yang membelah daerah pedusunan yang hijau dan sunyi, lalu menerobos perut Gunung Gumitir.

Kedigdayaannya telah mengalahkan kuda, sapi, dan kerbau. Dulu kita punya kereta yang ditarik kuda, sapi, kerbau, yang lajunya tak menimbulkan kebisingan. Tatkala orang juga belum gegap gempita memikirkan pelipatgandaan modal.

Zaman baru, disebut pula zaman modern. Di sisi kanan-kiri rel kereta api terhampar perkebunan nan luas: tebu, kopi, kakao, tembakau, teh, lada, karet, dan lain-lain. Tentu saja jaringan rel kereta api itu dibangun untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan menuju negeri Belanda

Awalnya memang hanya mengangkut hasil perkebunan. Tapi, selanjutnya juga mengangkut orang

menuju kota-kota penting, terutama di Jawa. Mobilitas sosial tak terelakkan.

Orang-orang yang naik kereta api dapat memandangi pedusunan mereka yang tenang dan damai dari jendela kereta. Dari suatu dunia lain, dari sudut pandang lain, yang selama ini tak pernah dibayangkan.

Sebelumnya, Si Anu hanya tahu menjadi petani. Tak ada mimpi dan cita-cita. Tak ada imajinasi masa depan. Tak ada mobilitas sosial. Si Anu yang petani, karena orangtuanya petani, dan menurun kepada anak-cucunya. Ia tak akan bermimpi menjadi bangsawan, karena bukan “darah biru”.

Zaman baru telah datang bersama praktik kolonialisme. Di akhir pemerintahan Gubernur Jenderal Idenburg, jaringan rel kereta api telah menembus tanah Jawa. Yogyakarta dan Solo, tempat para raja-raja Jawa bertahta, tak lebih dari persimpangan jalur besar kereta api yang memanjang dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Jember hingga Banyuwangi.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Perubahan tata pandang lama atas ruang, waktu, manusia dan seluruh tata dunia yang sudah berabad-abad dipegang teguh oleh masyarakat tak terelakkan.

Kereta api dan jaringan relnya, perkebunan, kantor gubernur jenderal yang kini menjadi Istana Negara, Terowongan Mrawan, berelasi satu dengan yang lain membentuk “cara hidup” tertentu. Cara hidup itu mengesahkan penaklukan, penjajahan, dan eksploitasi kekayaan negeri lain.

Cara hidup yang dinamai kolonialisme/imperialisme itu lalu dibakukan, diorganisasikan, dilegitimaskan, dan dipertahankan. Untuk kepentingan tersebut, dengan retorika “politik balas budi” (kebijakan etik), pemerintah kolonial Hindia-Belanda mendirikan sekolah, termasuk untuk kaum bumiputra, meski terbatas.

Melalui sekolah, anak-anak bumiputra diajarkan bermimpi, bercita-cita, berimajinasi. Mereka lalu melihat kehidupan lain, cara hidup lain di luar penjajahan.

Sudah menjadi kondratnya, meski sekolah didesain untuk menopang kepentingan penguasa kolonial, tetap saja melahirkan “kaum kritis”. Orang Jawa menyebut “mrojol selaning garu” (lepas lewat sela-sela mata garu/bajak).

Perlawanan kaum kritis produk sekolah itulah yang dihadapi Idenburg. Ia harus bekerja keras. Di hadapannya bukan lagi perlawanan lokal bersenjata yang mudah dipatahkan. Tapi, semangat nasionalisme bumiputra yang menggelora, yang dilembagakan dalam organisasi pergerakan nasional.

Sekolah membangkitkan imajinasi tentang tata kehidupan baru yang sebagian besar berasal dari pemikiran Barat. Mereka tahu kata “eksploitasi”, “pergerakan”, “boikot”, “partai”, “revolusi”, “kemerdekaan”, “demokrasi”, “republik”, “negara-bangsa”, dan sejenisnya.

Melalui kata-kata tersebut, mereka mengimajinasikan kebangsaan dan kemerdekaan. Mereka membayangkan kemandirian sebagai bangsa dan negara. Dari Sabang sampai Merauke yang menjadi

wilayah jajahan Hindia-Belanda dibaca sebagai geopolitik oleh kaum kritis. Di sana dibentuk kesatuan nasional, kesatuan cita-cita sosial, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan ideologi.

Meski penyatuan Sabang sampai Merauke berawal dari politik penaklukan (ekspansionisme) Gubernur Jenderal Van Heutsz, penyatuan itu dimaknai lain dengan kepentingan lain pula.

Warisan Van Heutsz dianalogikan sebagai “badan” dengan “jiwa” baru (pembebasan/kemerdekaan) untuk menggantikan “jiwa” lama (penjajahan/penaklukan). Maka, di atas tanah dari Sabang sampai Merauke (warisan Van Heutsz) terkandung alasan fundamental memilih negara kesatuan, bukan federal; memilih Pancasila sebagai dasar negara, bukan agama.

Terdapat pula alasan, demokrasi tidak cukup dipraktikkan pada bidang politik, tapi juga bidang ekonomi (demokrasi harus memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat). Di sana terkandung alasan fundamental bahwa negara harus melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan rakyat, dan turut menjaga ketertiban dunia.

Sangat gamblang, bau kolonial tak akan pernah hilang dari bumi Indonesia. Dia telah menjadi bagian dari badan kita (bangsa dan negara Indonesia). Masalahnya terletak pada jiwa yang mengisinya.

Ada dua jiwa yang diingatkan dan dibangkitkan oleh bau kolonial. Pertama, jiwa status quo yang memproduksi penjajahan, dan kedua, jiwa progresif yang membuahkan pembebasan.

Dua hal berlawanan itu bisa tumbuh di Istana Negara di Jakarta tinggalan Belanda. Bisa pula tumbuh di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang oleh Jokowi diklaim tak lagi bau kolonial, simbol kemandirian bangsa.

Karena itulah, Bung Karno pada 1956 menyerukan revolusi mental. Tanpa kekayaan mental, investasi ekonomi tak akan berguna. Pembangunan ekonomi hanya akan menguntungkan kalangan terbatas. Kesejahteraan tak menjangkau rakyat kebanyakan. Wage Rudolf Soepratman pun sama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.

Sayang sekali revolusi mental Jokowi bergema hanya di tahun-tahun awal pemerintahannya yang pertama. Di tahun-tahun selanjutnya semakin menghilang, lalu menjelang akhir pemerintahannya yang kedua justru terjadi titik balik (baca: "Titik Balik Revolusi Mental Jokowi", *Kompas.com*, 08/02/2024).

Tatkala merampungkan tulisan ini di Kafe Unej, saya ditemani secangkir kopi yang tentu saja bau kolonial. Bersama kopi yang pernah menjadi bagian dari sejarah kolonial negeri ini, saya membayangkan Istana Negara di IKN. Serupa Terowongan Mrawan yang menerobos perut Gunung Gomitir pada awal abad ke-20, IKN mustahil dibangun tanpa modal besar, kekuasaan besar, kepentingan dan ambisi besar.

Istana Negara di IKN akan nyata sebagai simbol kemandirian dan kemerdekaan rakyat Indonesia, menurut hemat saya, bila jiwa penghuninya juga

merdeka dan progresif, tak dijajah oleh banalitas keserakahan.

Lalu, siapa menjamin hal-hal besar di IKN itu terbebas dari banalitas keserakahan? Hanya jiwa merdeka dan progresif yang bisa memastikan bahwa hal-hal besar di IKN tak akan mengulang praktik hitam kolonialisme. Sanggupkah pemerintahan baru hasil Pemilu 2024? Kita tunggu. Merdeka!

Sumber:

<https://www.kompas.com/stori/read/2024/08/17/060513379/badan-kita-bau-kolonial>

## Bencana Ekologis dan Tradisi Menyanyikan “Indonesia Raya”



Suasana perkotaan Aceh Tamiang pascabanjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Berdasarkan data Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh pada Selasa (2/12) sebanyak 1.452.185 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda 3.310 desa di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom. (BAYU PRATAMA S)

**B**encana ekologis (bukan sekadar bencana alam, melainkan ada kontribusi manusia) yang menimpa Aceh dan Sumatera sudah seharusnya membawa kita (bangsa Indonesia) untuk merenungi. Sudah seharusnya ada refleksi, evaluasi yang sungguh-sungguh dengan kesadaran penuh, guna menemukan perubahan/pembaruan yang substantif dan wajib ditindaklanjuti. Sudah seharusnya kita meruat diri, atau meminjam istilah Arnold van Gennep, memasuki ruang liminal.

Melalui tulisan ini, saya hendak merenungi satu aspek ritual bernegara, yakni tradisi menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Adakah yang perlu dikritik?

Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan gubahan WR. Soepratman itu sudah lazim dinyanyikan hanya satu stanza, stanza pertama. Dua stanza yang lain sangat jarang dinyanyikan. Bahkan, tak sedikit yang tidak tahu bahwa “Indonesia Raya” sejatinya terdiri atas tiga stanza.

Kesan yang saya tangkap, alasannya butuh waktu yang lama, tidak praktis, tidak efisien, dan sejenisnya. Memang tidak ada kewajiban menyanyikan penuh tiga stanza. Yang wajib, menyanyikan stanza pertama, sebagaimana selama ini.

Padahal, bila “Indonesia Raya’ itu dinyanyikan lengkap tiga stanza hanya butuh waktu 4,28 menit. Hampir sama dengan kebiasaan menyapa para hadirin dalam pidato-pidato resmi.

Persoalan itu sepertinya sepele, tak signifikan dalam urusan bernegara. Tak ada sangkut-pautnya dengan bencana ekologis yang meluluhlantakkan Aceh dan Sumatera.

Tak ada urusan pula dengan situasi dan kondisi Indonesia yang oleh Presiden Prabowo Subianto disebut “paradoks Indonesia”, negeri kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Tak berhubungan dengan krisis integritas kepemimpinan, di antaranya ditandai oleh semakin banyak penyelenggara negara ditangkap penegak hukum, bahkan di kalangan penegak hukum sendiri.

## **Penguatan Identitas kebangsaan**

Jangan sepelekan “Indonesia Raya”, yang sejatinya tiga stanza, tapi sering hanya stanza pertama yang dinyanyikan. Menyanyikannya secara utuh sesungguhnya merupakan penguatan identitas kebangsaan.

Sejak awal “Indonesia Raya” digubah sebagai identitas kebangsaan yang berbasis pada kristalisasi historis masyarakat jajahan. Tentu saja bukan sembarang ditulis.

“Indonesia Raya” mewakili gagasan kebangsaan Indonesia dalam bahasa puisi. Mewadahi alasan-alasan historis dan fundamental, serta menuntun arahnya. Kata WR. Soepratman, “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Sangat jelas klausa tersebut berisi strategi pembangunan yang semestinya dijalankan pada pascakemerdekaan. Pembangunan badan (ekonomi, infrastruktur dan sejenisnya) mestilah didahului pembangunan jiwa (karakter). Kata Bung Karno, investasi material dan skill tanpa investasi mental hanya melanggengkan penjajahan.

“Indonesia Raya” juga merefleksikan modal bangsa Indonesia untuk menjadi “raya”. Saya kira, bukan tanpa alasan WR. Soepratman melekatkan atribut “raya”. Tanpa modal yang masuk akal, mustahil status “raya” akan disandang bangsa Indonesia.

Mari kita simak dua stanza yang sangat jarang dinyanyikan. Isinya sungguh menggambarkan modal yang kita miliki dan dipersyaratkan untuk mencapai status “raya”.

Stanza 2:

*Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya  
Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya  
Indonesia tanah pusaka, p'saka kita semuanya  
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia*

*Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya  
Bangsanya, rakyatnya, semuanya  
Sadarlah hatinya, sadarlah budinya  
Untuk Indonesia Raya*

Stanza 3:

*Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti  
Di sanalah aku berdiri 'njaga ibu sejati  
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi  
Marilah kita berjanji Indonesia abadi*

*Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya  
Pulaunya, lautnya, semuanya  
Majulah negerinya, majulah pandunya  
Untuk Indonesia Raya*

Jelas sekali "Indonesia Raya" sebagai identitas kebangsaan merupakan produk kecerdasan para pendiri bangsa, buah pemikiran yang sangat matang dan visioner.

Mengapa Indonesia disebut tanah yang mulia, tanah yang kaya? Yudi Latif dalam karya terbarunya yang berjudul *Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?*

(2025) menunjukkan kemuliaan dan kekayaan Indonesia yang signifikan bagi dunia.

Yudi Latif menyebutnya “Cerlang Nusantara”. Mulai dari geologi, geografi, oseanografi, sumber daya mineral, keanekaragaman hayati hingga hutan tropis dan keindahan alam. Dari paleoantropologi, arkeologi, peradaban maritim, hingga manusianya dengan kerajaan agung dan produk budayanya.

Kemuliaan dan kekayaan itu dilukiskan Pramoedya Ananta Toer dalam novel yang berjudul *Arus Balik* sebagai kekuatan (arus) bumi bagian Selatan yang mengalir ke bumi bagian Utara.

Karena kemuliaan dan kekayaan itu, kita menganggapnya sebagai “tanah pusaka”. Ada perikatan yang sangat mendalam antara tanah dan komunitas, yang membuat tanah itu diberi bobot keramat (*fetish*) yang harus dirawat, diselamatkan, dilestarikan, bila perlu dengan taruhan nyawa. Karena itu, sungguh masuk akal bila kita harus berdiri di wilayah Indonesia untuk selamanya.

Lalu, mengapa Indonesia disebut tanah yang suci, tanah yang sakti? Di mana kesucian dan kesaktiannya? Kata “suci” dan “sakti” dari sudut oposisi biner menempati posisi sakral. Dua kata itu sering dipakai pada sesuatu yang bersifat adikodrati (supernatural), hal-hal gaib, spiritualitas.

Apakah tanah Indonesia memiliki sifat-sifat sakral? Meski tidak eksplisit, buku Yudi Latif yang berjudul *Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?* (2025) menjawabnya.

Kata Yudi Latif, dunia tak berdenyut tanpa tanah Indonesia.

Karena sifat adikodrati itu Indonesia memperoleh sinar matahari secara penuh dalam jumlah yang berimbang antara siang dan malam. Cuaca juga tidak ekstrem. Panas tidak terlalu, dingin pun tidak terlalu. Indonesia adalah anugrah Illahi yang patut disyukuri.

Namun, di balik itu, sifat adikodrati menuntut kita memiliki kepekaan (kearifan), karena potensi Indonesia sangat rawan bencana alam. Kita hidup di atas cincin api bumi. Tanpa berbuat apapun (diam saja) terhadap alam, hidup kita dikelilingi bencana alam. Apalagi bila berbuat dengan menentang kaidah alam.

Maka, sangat masuk akal stanza ketiga menyerukan agar bangsa Indonesia berdiri menjaga "ibu sejati", yang tak lain adalah kosmos yang menghidupi kita. Menjaga agar kosmos itu terus-menerus menebarkan kemakmuran dan keselamatan secara berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukan sebaliknya, malah memperkosa "ibu sejati". Potensi bencana alam yang sudah besar diperparah oleh tata kelola alam yang kontraproduktif, sehingga ancaman bencana berlipat ganda.

Kita harus membawa bencana Aceh dan Sumatera sebagai refleksi, catatan kritis, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak membuahkan manfaat bagi orang banyak bila dilakukan dengan memperkosa "ibu sejati".

Ujungnya adalah bencana ekologis, yang dampaknya sungguh mengerikan, tak sebanding dengan nilai ekonomisnya. Banjir bandang di Aceh dan

Sumatera adalah buah pemeriksaan terhadap “ibu sejati”, alarm bagi daerah lain di Indonesia.

## **Pesan sakral**

Karena itu, “Indonesia Raya” bisa dikategorikan lagu sakral, penuh pesan sakral. Tak sembarangan dinyanyikan. Ada proses mentalitas yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kognitif, emosional, dan spiritual.

Liriknya kaya simbolisme dan metafora. Dibutuhkan proses mental yang melibatkan penafsiran dan internalisasi makna-makna simbolis, menghubungkan teks dengan pengalaman dan keyakinan, bahkan pandangan dunia. Bukan sekadar pribadi, melainkan komunitas kebangsaan. Dengan demikian, kita menginternalisasi pesan sakral “Indonesia Raya” ke dalam sistem kognitif, nilai, dan tindakan.

Demikian juga bila dibaca melalui perspektif Walter J. Ong. Lagu “Indonesia Raya” selalu dinyanyikan secara bersama. Kata Ong, suara (tradisi lisan) memiliki kekuatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama kemampuan mengikat orang secara bersama, memperkuat rasa kebersamaan, identitas, dan solidaritas.

Saatnya kita membiasakan menyanyikan “Indonesia Raya” secara penuh tiga stanza. Agar kita juga mendoa untuk Indonesia bahagia. Bukan hanya berseru untuk Indonesia bersatu.

Agar kita juga berjanji untuk Indonesia abadi. Berjanji menyelamatkan rakyatnya, pulaunya, lautnya,

hutannya, dan kekayaan alam lain, demi Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/24/08054101/bencana-ekologis-dan-tradisi-menyanyikan-indonesia- raya?source=kolom>

## Sang Saka Berkibar di IKN dan Robohnya Surau Kami



Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). Upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI tersebut mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

**S**aya turut bangga melihat Sang Saka Merah Putih berkibar di lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Tepat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI), 17 Agustus 2024.

Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melunasi janjinya untuk menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN. Saya menyaksikan dari Youtube, Jokowi turun dari mimbar kehormatan, berjalan menuju meja Sang Saka. Diambilnya bendera kebangsaan Indonesia itu, diberikannya kepada Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (Paskibraka). Beberapa saat kemudian Sang Saka berkibar di lapangan Istana Negara IKN.

Sebuah peristiwa bersejarah. Sebagai gagasan, pemindahan ibu kota negara sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 1957. Saat itu Soekarno memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Melalui Presiden Jokowi, gagasan tersebut nyata. Dasar hukumnya dibuat, pembangunannya pun dimulai.

Tentu saja IKN masih compang-camping. Masih jauh dari standar ibu kota negara. Tapi, buat saya, IKN bisa dimaknai simbol masa depan Indonesia. "Upacara tahun ini perdana di Ibu Kota Nusantara, simbol transisi menuju Indonesia yang memiliki lebih Indonesiasentris. Mari kita bawa kemajuan ke setiap sudut tanah air," kata Jokowi (*Kompas.com*, 18/08/2024).

Saya sependapat. IKN menawarkan perspektif dan pendekatan baru menuju apa yang oleh W.R. Soepratman disebut "Indonesia Raya". IKN menantang imajinasi, kreasi dan keteguhan hati pemimpin Indonesia, baik pemimpin hasil Pemilu 2024 maupun setelahnya.

IKN tentu saja masih membutuhkan modal besar, kekuasaan dan semangat besar. Juga butuh dukungan politik besar pula, baik dari politik formal maupun publik pada umumnya. Jalannya masih panjang.

Namun, saya melihat sesuatu yang memprihatinkan, kontradiktif. Kebutuhan IKN masih serba besar, tapi perilaku para penyelenggara (pemimpin) negara memperlihatkan gejala krisis keteladanan bernegara.

Di HUT ke-79 ini wajah kita memperlihatkan guratan paradoks. Satu sisi membanggakan: IKN menjanjikan “ke-Raya-an”. Sisi lain memprihatinkan: krisis keteladanan bernegara bersiap mengubur “ke-Raya-an” itu.

## **Roboh**

Pada tahun 1956 terbit cerpen berjudul *Robohnya Surau Kami* karya A.A. Navis. Diterbitkan oleh Penerbit Nusantara (Bukittinggi), dan sejak 1986 diterbitkan ulang oleh Gramedia Pustaka Utama.

Cerpen A.A. Navis itu terasa baru terbit Agustus 2024. Surau tua di suatu kampung “roboh” akibat penjaganya bunuh diri. Dua hal yang ironis, paradoks. Surau adalah tempat beribadah kepada Tuhan. Tapi, penjaganya mengakhiri hidup dengan cara yang dilarang Tuhan.

Sebab-musababnya pun ironis, paradoks. Penjaga surau adalah pengabdikan Tuhan. Hidupnya hanya di surau untuk Tuhan. Tapi, ia kehilangan keyakinan. Keyakinannya goyah, terpengaruh omongan bahwa dirinya tak akan masuk surga.

Tuhan tak menyukai orang yang hanya mengurus diri sendiri tanpa mau tahu kesulitan orang lain di dunia. Tuhan membenci perbuatan orang yang tak mau mengambil resiko untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Bunuh dirilah penjaga surau. “Roboh”-lah surau tua itu.

Belakangan ini kita juga menyaksikan banyak lembaga pemerintahan “robok”. Kita ambil beberapa saja.

Tiga lembaga pemerintahan produk Reformasi “robok” dalam waktu hampir bersamaan. Lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saya yakin bukan kebetulan dan “robok” tiba-tiba. Ada relasi sistemik yang membuatnya “robok” dalam waktu hampir bersamaan.

MK dibentuk untuk memastikan undang-undang negara tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar, tak memuat tendensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini penting, mengingat undang-undang sebagai instrumen kebijakan rentan diboncengi KKN.

KPK dibuat untuk menjaga negara dari rongrongan KKN. KKN inilah penyebab rakyat tak kunjung menikmati kesejahteraan. Padahal, proklamasi kemerdekaan diperjuangkan sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. Bung Karno menyebutnya “jembatan emas”.

KPU didesain untuk memastikan pemilu berlangsung bebas, jujur, adil, demokratis. Pemilu diterima sebagai pilar demokrasi, maka harus dipastikan caranya tak mereduksi kedaulatan rakyat. Pemilu Orde Baru dinilai penuh rekayasa yang mereduksi kedaulatan rakyat.

Namun, ironis dan tragis. Ketiga lembaga anak kandung Reformasi itu “robok”. Penyebabnya serupa: krisis keteladanan bernegara para penjanganya.

Di MK, Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Ia ikut mengadili norma yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Ia dicopot dari jabatan Ketua MK.

Tindakan Anwar dinilai menabrak aturan dan etika. Implikasinya sangat mendalam, berujung pada carut-marut, terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengabsahan hasil Pilpres 2024 akhirnya dilakukan melalui putusan MK.

Namun, putusan MK pun tidak bulat. Tiga dari delapan hakim MK menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Residu Pilpres 2024 sangat mendalam bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

KPK "roboh". Ketuanya, Firlis Bahuri, diberhentikan. Ia diduga memeras mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang menjadi tersangka. Bagaimana bisa pucuk pimpinan KPK melakukan pemerasan yang semestinya diberantasnya?

KPU "roboh" juga. Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Ia dinilai melanggar etika terkait tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Pelanggaran etik Hasyim bukan yang pertama sejak menjabat Ketua KPU pada 2022. Sudah beberapa kali ia dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kualitas moral Hasyim, saya kira, berpengaruh pula terhadap kualitas Pemilu 2024.

Banyak lembaga pemerintahan “robok”. Penjaganya miskin keteladanan bernegara, tapi sangat “kreatif” memikirkan dan berbuat untuk diri sendiri. Tak peduli orang lain. Kekuasaan dikelola semau-maunya. KKN dinormalisasi. Keserakahan dimaklumkan.

“Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia kaummu, bersaudara semua, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun,” jelas malaikat menjawab pertanyaan Haji Saleh yang diceritakan Ajo Sidi kepada penjaga surau dalam *Robohnya Surau Kami*.

Boleh jadi ada kesadaran, tapi tak punya daya transformasi. Penjaga surau membunuh diri sendiri, sementara penyelenggara (pemimpin) negara diberhentikan dari jabatannya dan masuk penjara.

## **Kesadaran transformatif**

Lantas, siapa yang menjamin Sang Saka Merah Putih berkibar di IKN pada HUT ke-100, 17 Agustus 2045, ketika penyelenggara negara krisis keteladanan?

Keteladanan bernegara dalam konteks Indonesia adalah kesadaran transformatif terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Bukan nilai-nilai normatifnya saja yang harus melandasi praktik bernegara, tapi juga “semangat dan suasana kebatinan” sejak fase pembuahan, perumusan dan pengesahan Pancasila (Latif, 2011).

Kesadaran transformatif itu dapat dilihat dari perspektif penyelenggara negara dan rakyat. Dari sudut penyelenggara negara, Pancasila merupakan paradigma

bagi proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik untuk kesejahteraan rakyat. Pancasila ditransformasikan menjadi kebijakan, program, regulasi, dan etika bernegara.

Dari sisi rakyat, Pancasila dapat difungsikan sebagai ideologi kritik. Rakyat menggunakannya sebagai kerangka evaluasi terhadap kebijakan, program, regulasi dan perilaku penyelenggara negara.

Di sanalah titik temu kesadaran transformatif antara penyelenggara negara dan rakyat. Acuanya sama (Pancasila), arah tujuannya pun sama (kesejahteraan rakyat).

Namun, yang amat penting tapi cenderung dilupakan, yakni “semangat (dan suasana kebatinan)” saat Pancasila dikonstruksikan. Hal ini ditegaskan pula pada bagian Penjelasan UUD 1945 dengan sebutan “semangat penyelenggara negara”.

Aspek semangat cenderung diabaikan. Mungkin juga dianggap tak pernah ada, tak pernah dipahami oleh penyelenggara negara.

Semangat yang dimaksud adalah semangat untuk bergotong royong, bukan semangat individualisme. Semangat bersedia mengambil resiko untuk kesejahteraan rakyat, bukan semangat untuk kesejahteraan sendiri.

Semangat penyelenggara negara tak kalah penting dibandingkan bunyi pasal-pasal dan program. Semangat akan menuntun perilaku penyelenggara negara.

Sayang sekali, UUD 1945 hasil amandemen tak lagi mencantumkan bagian Penjelasan UUD 1945. Saya

curiga, jangan-jangan krisis keteladanan bernegara yang terus mendera para penyelenggara negara di antaranya karena tak ada lagi tuntutan di dalam Konstitusi.

Karena teksnya hilang, tak ada pengetahuan yang diwariskan. Tak ada bahan yang terus-menerus mengingatkan-ingatkan perihal semangat bergotong-royong itu.

Yang muncul lalu semangat semau-maunya sendiri dalam mengelola kekuasaan. Semangat mengotak-atik aturan demi kepentingan sendiri. Semangat saling menggertak dan menyandera. Semangat mencari untung dan selamat sendiri. Semangat yang serba bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Saya kira di sanalah tantangan berat pemerintahan baru nanti. Tanpa kesadaran transformatif para penyelenggara negara, berat bagi Sang Saka Merah Putih berkibar terus di IKN. Dan, kesadaran transformatif itu harus diteladani dari pemimpin tertinggi.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/19/08532991/sang-saka-berkibar-di-ikn-dan-robohnya-surau-kami>

## Jejak Pramoedya dan Masa Depan Literasi Indonesia



Medali Neruda—Sastrawan Pramoedya Ananta Toer (kiri) tersenyum bahagia memegang Medali Pablo Neruda yang diserahkan oleh James Sinclair (kanan), Duta Besar Chile untuk Indonesia di rumah dinas di Jakarta, Selasa (3/8/2004). Pram (67) adalah satu dari 100 sastrawan dari 65 negara yang menerima medali penghargaan untuk memperingati satu abad Pablo Neruda, Sang peraih Nobel dari Chile pada tahun 1971.

Kompas/Lasti Kurnia

**K**amis, 6 Februari 2025, tepat satu abad (100 tahun) Pramoedya Ananta Toer. Maestro sastra Indonesia itu tercatat dilahirkan pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, dan wafat pada 30 April 2006.

Bung Pram beruntung. Hidupnya melintasi empat zaman: pergerakan kemerdekaan (1925-1945), awal republik (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), dan reformasi (1998-2006). Sebagian perjalanan hidupnya

dihabiskan di tahanan, tapi pikirannya merdeka. Pikiran tak bisa ditahan.

Banyak karya Pram ditulis saat fisiknya ditahan. Di antaranya karya saat di Pulau Buru yang disebut Tetralogi Pulau Buru: *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*.

Rasanya belum ada tandingannya. Entah kapan Indonesia kembali memiliki tokoh literasi sekuat dan sehebat Pramoedya. Kita patut bangga dan bersyukur. Pramoedya, menurut profesor asal negeri K-Pop, Koh Young Hun (2014), adalah salah satu ikon penting Indonesia. Pramoedya sangat membantu memperkenalkan konten Indonesia ke dunia luar.

## **Ironi**

Pramoedya, di mata saya, adalah ikon literasi Indonesia. Jejaknya merefleksikan sejarah literasi Indonesia, yang ternyata penuh ironi. Pram merefleksikan ironi itu.

Karya tulis Pram bukan hanya banyak, tapi juga bermutu. Dikagumi dunia, dicetak-ulang berkali-kali, dan diterjemahkan ke bahasa asing. Namun, juga dilarang, dibuang, dan dikecam di negeri sendiri.

Alih-alih dijadikan bacaan wajib di sekolah, karya-karya Pram disingkirkan dari jangkauan publik, terutama generasi muda. Semestinya generasi muda diminta melahap habis bacaan bermutu itu sebagai sumber pembangunan karakter.

Tetralogi Pulau Buru terbit pertama kali pada 1980-an, persis saat penguasa Orde Baru sedang galak-

galaknya pasca-Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) 1974. Dekade 1980 bisa disebut puncak konsolidasi kekuasaan Orde Baru.

Represi penguasa Orde Baru juga merambah kampus melalui kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus). Sebuah kebijakan pengendalian literasi dalam rangka sterilisasi kampus dari pikiran-pikiran lain. Penguasa dengan saksama mengawasi gerak-gerik warga masyarakat, termasuk kampus. Mirip-mirip dengan cara pemerintah kolonial yang diceritakan Pram di *Rumah Kaca*.

Saya ingat betul betapa untuk menyelesaikan *Bumi Manusia* pada pertengahan 1980-an jantung harus berdegup melampaui biasanya. Seolah-olah intel, aparat keamanan, atau warga biasa yang bertindak "informan", terus mengawasi.

Ketakutan publik seperti itu sengaja diciptakan. Melalui ketakutan itulah pikiran publik dikontrol, dikendalikan. Tak boleh ada pikiran lain. Pada saat yang sama pikiran penguasa ditanamkan sedalam-dalamnya.

Penguasa Orde Baru tak peduli bahwa Tetralogi Pulau Buru adalah karya sastra bermutu dengan latar zaman kolonial yang sesungguhnya bagus sebagai sumber literasi kebangsaan. Orde Baru juga tak ambil pusing bahwa dunia mengapresiasi Pramoedya karena kualitas pemikiran kemanusiaannya.

Sedemikian mendalam ketakutan publik, sehingga ketakutan itu dengan sendirinya menyeleksi pilihan-pilihan publik. Saya ingat betul, ketakutan itu pula yang mendorong pejabat fakultas di kampus saya pada awal

1990-an membredel tabloid mahasiswa. Dekan ketakutan terhadap tabloid mahasiswa yang menayangkan wawancara Pramodya selepas dari Pulau Buru. Ketakutan dekan dengan sendirinya menyeleksi diri sendiri.

Menyingkirkan Pramodya dan karya-karyanya dari publik sama halnya dengan melemahkan literasi bangsa Indonesia. Kampus akhirnya kehilangan peran vital, yakni menghidupkan dan menguatkan literasi bangsa. Sungguh ironi. Bila kampus saja mengalami pelemahan literasi, apalagi masyarakat di luar kampus.

Dampaknya sangat mendasar. Perubahan yang digerakkan reformasi pada 1998 jalan di tempat (involusi). Banyak problem warisan Orde Baru tak menemukan solusi. Konsolidasi demokrasi lamban dan tak menemukan wujud yang didambakan. Perubahan kelembagaan politik tak diikuti penguatan nilai-nilai demokrasi, tak membuat rakyat berdaya secara politik.

Sebaliknya, kesewenang-wenangan penguasa (elite) terkesan dibiarkan, dilindungi, dibenar-benarkan. Hasilnya, korupsi merajalela, distribusi kesejahteraan dan keadilan tak merata, cita-cita kemerdekaan menjauh dari realita.

Indonesia tanpa karya yang dikagumi dunia. Sebaliknya, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) malah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Meskipun juaranya Presiden Suriah yang digulingkan,

Bashar al-Assad, keputusan OCCRP menampar muka kita dan patut direnungkan secara sungguh-sungguh.

### **Tradisi kritik**

Di mata saya, Pramoedya adalah tipologi manusia produk literasi yang kuat. Ia setipe dengan para tokoh pergerakan kemerdekaan. Mereka adalah generasi yang sukses merayakan literasi dalam situasi yang serba terbatas. Mereka membaca, menulis dan berdebat melalui surat kabar dan karya sastra tentang zamannya dengan penuh gairah. Literasi yang sungguh-sungguh terbukti membuahkan tradisi kritik dan keterbukaan pikiran.

Hasilnya luar biasa, sebuah mahakarya yang reflektif dan visioner. Literasi mereka menandai “kebangkitan” rakyat jajahan. Literasi tersebut membuahkan bangsa Indonesia dengan segenap piranti ketatanegaraannya.

Kita ambil satu aspek dari mahakarya itu, yakni Pancasila, yang disepakati sebagai dasar negara. Pancasila mustahil lahir tanpa literasi yang sungguh-sungguh. Bung Karno menyebut “digali” dari bumi Indonesia.

Tanpa literasi yang kuat dengan tradisi kritik yang juga kuat mustahil pemikiran-pemikiran besar yang berkembang di bumi Indonesia bisa diketahui, baik kekuatan maupun keburukannya. Pancasila berhasil disepakati, baik substansi maupun teksnya, melalui perdebatan yang tajam, yang hanya dimungkinkan oleh manusia-manusia yang tumbuh di dalam literasi yang baik.

Tradisi kritik adalah anak kandung tradisi literasi. Literasi tanpa kritik tak akan menjumpai refleksi, tak akan menemukan sintesis-sintesis, yang dibutuhkan bagi pembaruan peradaban.

### **Kelisanan sekunder**

Dengan menziarai jejak Pramoedya sebagai ikon literasi Indonesia yang penuh ironi, semestinya kita mampu memetik pelajaran berharga untuk masa depan. Kini kita dihadapkan pada tradisi baru mengepung publik, yakni tradisi kelisanan sekunder (*secondary orality*). Tradisi baru itu tak boleh disepelekan.

Kelisanan sekunder terbentuk oleh penggunaan teknologi komunikasi elektronik mutakhir yang demikian pesat. Teknologi itu mampu menggabungkan tradisi kelisanan primer dan tradisi keberaksaraan (literasi), sekaligus gambar dan video. Teknologi itu juga mampu menyimpan dan menyebarkannya secara partisipatif.

Bila di awal abad ke-21 lalu tradisi kelisanan sekunder hanya diintroduksi melalui radio dan televisi yang penyebarannya terpusat, kini semakin masif dan partisipatif melalui media berbasis internet. Media sosial telah menggeser posisi media konvensional.

Kelisanan sekunder berbeda dengan kelisanan primer yang sepenuhnya mengandalkan fungsi oral dan aural. Di kelisanan sekunder, teks tulis (cetak) tetap memegang peranan vital sebagai sumber informasi. Secara ideal, tradisi kelisanan sekunder tetap membutuhkan literasi berbasis teks tulis. Di sinilah masalah kita.

Kelisanan sekunder telanjur masif, tak mungkin dibendung, sementara tradisi literasi belum sepenuhnya tumbuh secara baik. Buku cetak dan produk sejenis mulai ditinggalkan. Publik mulai beralih pada produk digital berbasis internet dengan segenap karakteristiknya.

Publik tampak lebih percaya kepada pendengung daripada laporan jurnalistik. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan, negara pun lebih percaya kepada kerja pendengung daripada kerja jurnalis.

Publik juga tampak lebih suka mengikuti *podcast* daripada membaca artikel. Para intelektual pun lalu membikin *podcast* dan memiliki *chanel* untuk penayangannya. Pembaca artikel tak sebanyak pendengar *podcast*.

Tak ada yang salah dari kehadiran tradisi kelisanan sekunder itu. Kelisanan sekunder adalah keniscayaan perkembangan teknologi. Masalahnya, tradisi kelisanan sekunder yang kini mengepung kita tumbuh di atas (bentukan dari) tradisi literasi kita yang masih lemah, yang secara historis sengaja dilemahkan demi kepentingan kekuasaan.

Kita lalu diliputi kegagapan, tak memiliki daya kritis, baik dalam produksi konten maupun menghadapi produk digital yang masif dan cenderung mengaburkan batas antara *history* dan *story*, antara fakta dan fiksi, atau yang dikenal dengan istilah *post-truth*. Tradisi baru itu tak mencerdaskan.

Saya mengamini Yudi Latif di postingan Instagram-nya beberapa hari lalu. Kata penulis buku *Negara*

*Paripurna* itu, meskipun layar digital menawarkan kecepatan, buku cetak memberikan kedalaman. Dalam dunia yang serba cepat, katanya, kehadiran buku cetak mengingatkan kita bahwa belajar bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan jiwa. Di setiap lembarannya, kita menemukan keabadian.

Pramoedya telah mengajarkan. Ia memang tak sempat merasakan secara penuh era kelisanan sekunder. Namun, Bung Pram meyakini bahwa keabadian (dalam sejarah) hanya ditemukan lewat tulisan. Dan, (membuat) tulisan yang dimaksudkan tentu saja seperti yang diajarkan Bung Pram. Dimulai dari berpikir kritis dan terbuka.

Sumber:

[https://www.kompas.id/artikel/jejak-pramoedya-dan-masa-depan-literasi-indonesia?open\\_from=Section\\_Opini](https://www.kompas.id/artikel/jejak-pramoedya-dan-masa-depan-literasi-indonesia?open_from=Section_Opini)

## Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprpto: Kejujuran itu Menakutkan



Seniman Yos Suprpto menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait penundaan pameran tunggalnya bertajuk *Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Gedung YLBHI-LBH*, Jakarta, Sabtu (21/12/2024). Yos menyayangkan Galeri Nasional selaku penyelenggara pameran menghentikan aktivitas pameran seninya itu. (ANTARA FOTO/Aditya Nugroho)

Seorang seniman besar Indonesia yang populer dengan julukan pelukis si “mata hitam” memiliki dalil yang menarik. Kata si “mata hitam”, Jeihan Sukmantoro, “Moyang etika dan estetika adalah kejujuran.”

Saya mengamini dalil tersebut. Saya yakin, dalil Jeihan itu pula dasar proses kreatif seniman, termasuk Jeihan sendiri dan Yos Suprpto sebagai pelukis.

Kejujuran akan memancarkan kebaikan dan keindahan. Kejujuran bukan sekadar keterbukaan inderawi dan akal pikiran, melainkan sekaligus

pertimbangan hati nurani (budi) manusia. Di situlah, saya kira, titik temu antara kebaikan dan keindahan, antara etika dan estetika.

Karena itu, kejujuran merupakan sumber peradaban. Kejujuran pula yang melahirkan sejarah kepahlawanan. Kejujuranlah yang membangkitkan semangat perlawanan di mana pun dan kapan pun setiap terjadi ketidakadilan sosial dan pengingkaran terhadap harkat martabat manusia.

Dan, seniman hanyalah saksi di antara saksi-saksi lain tentang kehidupan. Seniman bersaksi melalui karya seninya. Setiap karya yang diciptakannya adalah pribadinya, kejujurannya.

Namun, ternyata tak setiap orang di setiap saat berani melihat dan mendengar kejujuran. Kejujuran itu menakutkan bagi sebagian orang.

Maka, atas nama kepentingan tertentu, kejujuran disembunyikan. Kejujuran dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan tersebut. Kehendak menyembunyikan kejujuran itulah yang membatalkan pameran tunggal Yos Suprpto di Galeri Nasional Indonesia beberapa hari lalu, tepatnya Jumat, 19 Desember 2024.

## **Dua catatan**

Dari pemberitaan media massa maupun media sosial, saya mencatat dua hal. Sudut pandang pihak Galeri Nasional dan sudut pandang Yos selaku pencipta karya.

Pertama, pembatalan itu menurut pihak Galeri Nasional disebabkan beberapa karya seniman asal Yogyakarta itu tidak bisa dipajang dan harus diturunkan berdasarkan penilaian kurator. Kurator menilai, beberapa lukisan tersebut dianggap tak sesuai tema “Kebangkitan: Tanah untuk Swasembada Pangan”. Lukisan terlalu vulgar, sekadar ekspresi kemarahan, semacam pendangkalan metafor yang menjadi kekuatan karya seni.

Penilaian kurator itu diamini Kementerian Kebudayaan. Bahkan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak istilah “bredel”. Kata Pak Menteri, bukan “bredel”, tapi “penundaan”.

Saya heran Pak Menteri menerima tafsir kurator begitu saja. Terkesan sekadar pejabat birokrasi, bukan Menteri Kebudayaan dengan pemahaman yang baik tentang kebudayaan. Padahal, Fadli Zon sosok yang mumpuni di bidang kebudayaan.

Presiden Prabowo sangat tepat menugaskan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan. Bukan lantaran kegemarannya mengoleksi benda-benda budaya, Fadli Zon didukung kemampuan akademik bidang kebudayaan. Teori-teori penafsiran tentu tak asing bagi Fadli Zon.

Saya tak percaya Pak Menteri memaknai lukisan Yos berjudul “Konoha II” langsung menilai “vulgar”, sehingga tak pantas dipamerkan. Pun para pengunjung galeri. Mereka bukan golongan awam yang memaknai lukisan sebatas tangkapan indera mata.

Tampaknya ada yang disembunyikan oleh Fadli Zon sebagai orang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan kebudayaan Indonesia. Apa itu? Tak lain tafsirnya sendiri, kejujuran Fadli sendiri. Rupanya Pak Menteri masih juga fobia terhadap kejujuran.

Pak Menteri juga terkesan meniru politik eufemisme Orde Baru. Menolak kata “bredel” dan menggantinya dengan “penundaan”. Padahal, kedua kata menunjuk realitas yang sama. Nyatanya pameran batal tanpa kejelasan tindaklanjut. Bahkan, kedua pihak menggelar konferensi pers yang membuat peristiwa tersebut viral.

Politik eufemisme biasa dipakai penguasa Orde Baru untuk menyembunyikan realitas yang tidak disukai. Misalnya, kata “kelaparan” diganti “rawan gizi”; “kenaikan harga” diganti “penyesuaian harga”.

Catatan kedua, karya-karya Yos yang diminta diturunkan itu ternyata terkait mantan penguasa di Indonesia yang belum lama lengser. Yos menolak penilaian kurator yang juga diamini Pak Menteri bahwa lukisan tersebut vulgar, sekadar ekspresi kemarahan, dan tak sesuai tema.

Sebagai seniman, Yos melihat urusan tanah untuk pangan tak pernah lepas dari urusan kekuasaan. Saya pun mengamini pandangan tersebut. Yos bersaksi melalui karya-karyanya. Karena itu, ia menolak menyembunyikan kejujurannya.

## **Sistem pemaknaan**

Pembatalan pameran tunggal Yos Suprpto, di mata saya, bukan sekadar urusan kurator dan seniman yang hendak memajang lukisannya di Galeri Nasional. Pembatalan itu bersangkutan paut dengan sistem pemaknaan yang menyejarah, yang dampaknya pada pertumbuhan kebudayaan.

Saya yakin, tak ada cawe-cawe Joko Widodo, Presiden ke-7. Pun Presiden Prabowo. Namun, begitulah sistem pemaknaan kita hingga hari ini masih terasa monolitik dan hegemonik.

Penguasa memonopoli pemaknaan dan memancarkannya ke seluruh urat nadi kehidupan. Tanpa cawe-cawe langsung pusat kekuasaan pun, masyarakat akan mengikuti tafsir pusat kekuasaan. Tentu saja bukan tiba-tiba, melainkan terbentuk secara historis.

Pembatalan pameran tunggal karya-karya Yos itu segera mengingatkan saya pada kejadian serupa 10 tahun lalu. Sama persis saat presiden baru, Joko Widodo, mengawali pemerintahannya. Juga sama di pertengahan bulan menjelang akhir tahun. Bahkan, Presiden Joko Widodo saat itu sedang getol-getolnya berpidato tentang Revolusi Mental.

Saat itu, Rabu, 10 Desember 2014, di Malang, sejumlah warga dan organisasi massa tertentu membubarkan pemutaran film berjudul "Senyap" (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer. Film garapan sutradara berkebangsaan Amerika Serikat itu bertutur tentang kehidupan keluarga korban

pembunuhan massal di Indonesia antara tahun 1965 – 1966 (*Kompas*, 12 Desember 2014).

Film “Senyap” direncanakan oleh Komnas HAM diputar di sejumlah kota, termasuk Malang, Jawa Timur, sebagai bagian dari Peringatan Hari HAM Internasional. Komnas HAM menilai, film “Senyap” merupakan salah satu dari sekian banyak film yang mengungkapkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dari perspektif korban.

Namun, apa yang terjadi? Rupanya masih ada sebagian masyarakat yang ketakutan oleh “Senyap”. Mungkin ada yang ketakutan karya tersebut menyebarkan komunisme, atau ada pihak tertentu yang merasa tersudutkan. Film “Senyap” akhirnya memproduksi kesenyapan, karena batal diputar.

Dua peristiwa pembatalan penayangan karya seni, yang kebetulan sama-sama mengawali suatu rezim pemerintahan, menunjukkan betapa hingga kini sistem pemaknaan kebudayaan kita masih monolitik dan hegemonik. Rezim mengklaim demokratis, tapi tak berdaya juga menghadapi sistem pemaknaan tinggalan rezim Orde Baru.

Orde Baru belajar dari pemerintah kolonial tentang “keamanan dan ketertiban”. Kebebasan berpendapat diawasi. Pikiran lain dicurigai. Ruang publik harus steril dari ekspresi kejujuran. Sejumlah media massa dibredel, karena memberi tempat pikiran lain. Karya sastra dan seni yang mengekspresikan kejujuran distop. Sastrawan dan senimannya dikucilkan.

Pramoedya Ananta Toer, misalnya. Bukan hanya orangnya yang dikucilkan, tapi juga karya-karyanya. Novel-novel Pram dilarang beredar dan dikategorikan “suversif”. Kita kehilangan sumber literasi berkualitas.

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan profesor dari negeri K-Pop, Koh Young Hun (2014). Ia justru menempatkan Pram sebagai salah satu ikon penting Indonesia. Di mata Hun, Pramoedya sangat membantu memperkenalkan konten Indonesia ke dunia luar. Bukan hanya karena produktivitasnya mengagumkan, tapi juga kualitas pemikiran kemanusiaannya yang disampaikan melalui karya-karya Pram.

Buku-buku akademik pun disensor. Buku *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* karya Yoshihara Kunio (LP3ES, 1990), terjemahan dari *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*, ditarik dari peredaran. Padahal, buku itu sangat akademis, hasil riset akademis. Kejujuran akademis pun dianggap membahayakan, harus disingkirkan.

## **Melemahkan kreativitas**

Sistem pemaknaan monolitik dan hegemonik itu melemahkan kreativitas, sehingga merugikan pertumbuhan kebudayaan Indonesia. Proses kreatif jalan di tempat. Tak ada dialektika guna menemukan sintesis-sintesis.

Kreativitas kebudayaan mengandaikan adanya refleksi dari hubungan antarteks, persilangan antarteks.

Kreativitas tidak tumbuh dari teks yang monolitik dan hegemonik.

Sejarah kebudayaan negeri ini mengajarkan hal itu. Epos Mahabharata dari India, misalnya, tidak diterjemahkan secara langsung begitu saja oleh para pujangga kita, melainkan ditransformasikan dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan karya besar.

Di Jawa, misalnya, muncullah karya seni wayang purwa dengan segenap pirantinya. Di mata saya, pertunjukan wayang purwa adalah satu di antara karya agung generasi pendahulu bangsa Indonesia.

Sejarah Indonesia modern juga mengajarkan. Bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila, menurut hemat saya, merupakan karya besar yang juga tumbuh dari refleksi hubungan antarteks.

Bangsa Indonesia dan Pancasila bukan tumbuh dari sumber asli, juga bukan salin-tempel asing. Bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan hasil dari kreativitas di dalam hubungan antara yang terjajah dan yang menjajah, masa lalu dan masa kini, dunia lama (tradisi) dan dunia baru (modern).

Bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai produk kebudayaan adalah efek dialektis hubungan antarteks. Warisan nenek moyang dalam banyak hal dikritik secara tajam, di antaranya sifat feodalistiknya.

Barat (modern) juga tidak dicontek mentah-mentah. Ada kritik dan refleksi di dalam persilangan antarteks, sehingga membuahkan bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Kita patut prihatin atas peristiwa di Galeri Nasional beberapa hari lalu. Pembatalan pameran karya-karya Yos Suprpto itu merefleksikan pelemahan kreativitas kebudayaan. Proses kreatif kebudayaan kita lalu miskin persilangan antarteks.

Sangat serius akibatnya. Alih-alih menghasilkan karya-karya bermutu yang dilandasi pemikiran kemanusiaan yang kuat dan menjawab tantangan Indonesia ke depan yang diimajinasikan dengan sebutan "Indonesia Emas", saya khawatir, untuk sekadar memilah-memilih kebudayaan yang baik dan bermutu saja kita tak mampu.

Lihatlah, misalnya, betapa susah kita menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN bukan melemah, sebaliknya menguat, terkesan dipelihara untuk saling menyandera.

Kita juga gagap menerjemahkan demokrasi. Pilkada langsung dikeluhkan berat di ongkos, tapi tak ada yang berani menghentikan politik uang. Tak ada dekrit stop politik uang produk semua partai politik.

Kejujuran ternyata masih menakutkan! Harus disembunyikan!

Sumber:

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/23/140252265/pembatalan-pameran-lukisan-yos-suprpto-kejujuran-itu-menakutkan>

## Panggil Aku Toer Saja



Pramoedya Ananta Toer, sastrawan Indonesia yang pernah dipenjara di Pulau Buru, namun tetap

*produktif dalam berkarya.*

(KOMPAS/SINDHUNATA)

**M**engenang satu abad (100 tahun) Pramoeodya Ananta Toer yang jatuh pada 6 Februari 2025, salah satu karyanya yang berjudul *Panggil Aku Kartini Saja* menginspirasi judul artikel ini. Pram dilahirkan pada 6 Februari 1925 di Blora, dan wafat pada 30 April 2006.

Saya merasakan jiwa dan semangat antifeodalisme Pram yang begitu kuat pada karya tersebut. Pun karya-karya yang lain, baik yang fiksi maupun non-fiksi.

Orang boleh bilang, "apalah arti sebuah nama". Nama hanyalah penanda. Tak ada hubungan dengan yang ditandai. Hubungan keduanya mana suka, arbitrer.

Tak ada alasan mengapa suatu binatang di sini disebut “anjing”, “asu”, “kirik”, di sana disebut “dog”.

Benar dari satu sudut pandang. Sudut yang menganggap bahwa bahasa terpisah dari kenyataan sosial. Bahasa semata-mata penanda untuk membedakan kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain.

Namun, dari sudut yang lain, bahasa ternyata tidak netral secara sosial. Ada pamrih dari penggunaannya. Bahasa menandai identitas penggunaannya.

Nah, dari sanalah Pram membaca sejarah. Pram membaca Kartini, perempuan ningrat yang melawan keningratan pada zamannya. Pram seperti hendak menjadi penyambung lidah Kartini, lalu berkata sejujurnya, “Panggil aku Kartini saja”. Jadi, tanpa embel-embel “Raden Ajeng”, gelar kebangsawanan, penanda status sosial tertentu yang merefleksikan hak-hak istimewa bagi penyandangannya.

Pram tahu persis bahwa embel-embel RA pada nama itu bersifat pemberian yang bersifat geneologis (*ascribed status*), karena sistem sosial tertentu. Bukan karena prestasi yang diraih dan diperjuangkan oleh seseorang dari mana pun asalnya, apapun warna kulitnya (*achieved status*).

Itulah feodalisme pada zaman Kartini yang bercumbu dengan kolonialisme. Percumbuan keduanya membuat penjajahan berlarut-larut, makin kuat.

Pram membaca dengan jeli bahwa Kartini sejatinya melawan sistem sosial yang dibentuk melalui percumbuan feodalisme dan kolonialisme itu. Sistem

sosial itu dinilai sebagai sumber ketidakadilan dan deskriminasi, kesengsaraan dan kemelaratan rakyat di Nusantara yang sebelumnya berjaya.

Di karyanya yang berjudul *Arus Balik*, Pram bertutur kejayaan Nusantara saat menjadi kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di bumi. Terbesar pula kapal-kapalnya, juga bandar-bandarnya. Tak tertandingi, kata Pram.

Maka, saat itu arus bergerak dari bumi selatan ke utara. Kapal-kapalnya, manusianya, adab perbuatannya. Juga cita-citanya. Semua bergerak dari Nusantara di bagian Selatan ke "atas angin" di bagian Utara, demikian Pram membaca sejarah Nusantara dan menuturkannya menjadi narasi yang hidup.

Pram memberontak. Ia meneriakkan kesederajatan manusia. Ia mengecam keras tradisi "jalan jongkok" seperti dijalani Minke, tokoh utama *Bumi Manusia*, tatkala menghadap sang ayah yang seorang bupati.

Pram konsisten dengan jiwa dan semangat antifeodalisme. Ia tak mau mencantumkan nama lengkap sang ayah, Mastoer, pada nama belakangnya. Pram tampak risih dengan nama Mastoer, nama sang ayah yang dianggap berbau aristokratik. Sang ayah, Mastoer, memang seorang guru, seorang priyayi.

Dituturkan Umar Kayam pada novel *Para Priyayi* bahwa guru dari golongan pribumi pada zaman kolonial dipandang sebagai priyayi oleh masyarakat. Guru dipandang sebagai status sosial baru berkat tradisi persekolahan yang diklaim pemerintah kolonial sebagai bagian politik etik, "balas budi". Pendidikan mengubah

stratifikasi sosial lama yang tertutup, yang hanya diisi golongan bangsawan/priyayi dan kawula/rakyat.

Berkat pendidikan status priyayi menjadi terbuka, bukan bersifat geneologis, melainkan diperjuangkan. Meski keterbukaan itu pun terbatas juga, karena tidak semua kawula/rakyat bisa masuk sekolah.

Mastoer adalah satu di antara kaum terpelajar pribumi. Keterpelajarannya menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan untuk kaum pribumi tak lain adalah jalan kebangkitan nasional menuju kemerdekaan rakyat Indonesia.

Cara Mastoer mendidik murid-muridnya tidak disukai pemerintah kolonial. Mastoer akhirnya harus berhenti mengajar dengan segenap resiko pahit bagi keluarganya.

Pram menuturkannya di dalam kumpulan cerita pendek semi-otobiografi yang berjudul *Cerita dari Blora*. Pram kecil hanya mengetahui tanpa mengerti aktivitas sang ayah sebagai guru. Juga hanya tahu gaya berbusana kawan-kawan sang ayah pada kurun waktu yang disebut "zaman swadesi". Setiap pertanyaan yang diajukan kepada sang ibu selalu dijawab "akan tahu sendiri setelah besar nanti".

Pram tak bisa pura-pura. Meski sang ayah bukan priyayi yang menjadi kaki tangan kolonial. Tentu Pram tahu persis betapa banyak kaum priyayi yang memilih menjadi perkakas pemerintah kolonial untuk melanggengkan penjajahan. Priyayi yang memilih memberontak dengan resiko kehilangan hak-hak istimewa dan kelezatan zaman jauh lebih sedikit.

Rupanya jiwa dan semangat antifeodalisme Pram tak mau kompromi. Meski sang ayah bukan jenis priyayi yang menghamba kepada penguasa, Pram merasa terganggu dengan nama sang ayah, Mastoer, yang dirasakan terlalu aristokratik. Pram bilang: "Panggil aku Toer saja."

Jiwa dan semangat antifeodalisme Pram tak pernah surut meski raganya dikerangkeng bertahun-tahun di tahanan. Dengan jiwa dan semangat itu pula Pram membaca sejarah. Di tangan Pram, sejarah tidak sekadar direkonstruksi, tetapi dihidupkan kembali, diinjeksi jiwa dan semangat antifeodalisme.

Di tangan Pram, sejarah tidak kehilangan konteks masa kini dan masa depan. Karya tulis Pram, baik yang fiksi maupun non-fiksi, membentuk imajinasi di benak pembaca, yang pada gilirannya turut menentukan cara mereka memahami bangsa. Dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan.

Suatu bangsa harus memiliki kesadaran sejarah, "jasmerah," kata Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitulah seharusnya, suatu bangsa mengetahui dari mana mereka berasal dan akan ke mana melangkah. Tanpa itu mereka akan terombang-ambing, tak jelas kendali dan arah lajunya.

Pram memungut dan merajut serpihan-serpihan masa lalu menjadi narasi yang hidup. Histori dirajut bersama stori. Pembaca tak sekadar menjadi penikmat pasif yang berjarak dengan peristiwa yang diceritakan, tetapi mengalami dan merasakan. Peristiwa dan tokoh

sejarah akan dirasakan sebagai peristiwa dan tokoh masa kini, juga masa depan.

Saya yakin kita pasti akan marah dan mengecam keras melihat Minke harus berjalan jongkok menghadap sang ayah. Kita akan terpukau oleh keberanian Nyai Ontosoroh di pengadilan kolonial, sekaligus mengecam keras hukum kolonial.

Pun kita marah dan mengecam keras tatkala gelar akademik doktor dan jabatan profesor diburu atau diberikan dengan cara-cara tak patut. Kita juga marah dan mengkritik keras ketika kaum elite bertindak sewenang-wenang terhadap golongan lemah, "adigang adigung adiguna", seperti kasus Ronald Tannur.

Atau, koruptor triliunan rupiah yang ternyata hanya dihukum ringan, atau eksploitasi sumber daya alam dan sejenisnya yang dengan semena-mena menggusur orang-orang kecil dan menganggap mereka cukup diganti rugi. Kita mengecam keras tatkala hukum diakal-akali semata-mata hanya untuk kepentingan individu, keluarga dan kroni penguasa.

Jangan meremehkan feodalisme. Ia memiliki daya hidup yang sangat hebat, karena menjelma di dalam jiwa.

Di era kelisanan sekunder (*secondary orality*) saat ini, feodalisme yang dilawan Pram justru gampang beralih rupa. Ia memiliki kemampuan mimikri, di mana pun dan kapan pun. Terutama di saat kekuasaan bercumbu dengan kapital. Dan, Pram mengingatkannya, "Panggil aku Toer saja."

Sumber:

<https://www.kompas.com/stori/read/2025/02/09/074218879/panggil-aku-toer-saja>

## Memaknai Permintaan Maaf Jokowi



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mengikuti acara Zikir Kebangsaan bersama sekitar 3.000 umat lain di halaman Istana Merdeka, Kamis (1/8/2024). KOMPAS/NINA

SUSILO

**Z**ikir Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, 1 Agustus 2024, di antaranya diisi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kekurangannya dalam memimpin Indonesia. Jokowi menyadari, sebagai manusia biasa, tidak mungkin mampu menyenangkan semua pihak.

Berbagai komentar bermunculan di berbagai media komunikasi. Ada yang memuji, ada yang mencela. Saya mencoba membacanya dari sudut kebudayaan.

Permintaan maaf Jokowi yang dilakukan menjelang akhir jabatan (karena merasa tidak bisa memenuhi harapan semua pihak) itu biasa dalam budaya kita. Tak ada yang aneh. Tak perlu dipuji, pun tak perlu dicela.

Pada umumnya pejabat di Indonesia akan meminta maaf di akhir masa jabatannya. Baik pejabat politik maupun pejabat administratif/birokrasi. Dengan kebesaran hati, biasanya masyarakat pun akan menerima permintaan maaf tersebut. Begitulah budaya kita.

Permintaan maaf model ini tak menyebutkan bagian mana saja yang “disadari” tak menyenangkan sebagian masyarakat. Dalam konteks Jokowi, misalnya, apakah tindakannya mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto?

Tindakan tersebut mengundang kecaman banyak kalangan. Juga melukai kawan-kawan dekat Jokowi yang mengusung dan membelanya sejak menjadi wali kota Solo, bubernur DKI dan presiden dua periode.

Ataukah, tindakannya merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membuat UU Cipta Kerja, yang juga ditentang banyak kalangan? Atau, proyek mercusuar Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terkesan hendak meniru tokoh mitologis Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan (1000 candi) dalam satu malam?

Hal yang tidak (belum) menjadi budaya kita adalah permintaan maaf (saat masih menjabat) atas tindakan/keputusan yang dianggap keliru, lalu mengambil tanggung jawab atas kekeliruan tersebut. Tanggung jawab itu, misalnya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau mengubah tindakan/keputusan yang dianggap keliru.

Permintaan maaf jenis ini akan diikuti perubahan realitas, punya daya ubah (gugah) kultural.

## **Mentalitas**

Keengganan mengambil tanggung jawab atas tindakan/keputusan pernah dikritik keras oleh Mochtar Lubis pada pidato di Taman Ismail Marzuki tahun 1977. Pidato itu dibukukan oleh Yayasan Obor Indonesia dengan judul *Manusia Indonesia*.

Mochtar Lubis mengkritik mentalitas manusia Indonesia. Sastrawan yang juga jurnalis itu menjelaskan enam sifat manusia Indonesia yang umumnya negatif. Keenam sifat tersebut adalah: hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya, bersifat dan berperilaku feodal, percaya takhayul, artistik, dan bermental (karakter) lemah.

Jauh sebelum kritik Mochtar Lubis, pada 1956 Bung Karno juga pernah mengingatkan soal mentalitas. Melalui pidato pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1956, Bung Karno menyatakan bahwa kolonialisme-imperialisme telah membentuk mentalitas pecundang.

Bung Karno lalu menyerukan revolusi mental. Tanpa kekayaan mental, menurut Bung Karno, pembangunan ekonomi tak akan mendatangkan kesejahteraan bersama.

Kala itu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum merajalela. Kesenjangan sosial ekonomi dan keadilan sosial juga belum menjadi isu utama publik. Bangsa Indonesia hanya dihadapkan pada perbedaan

kepentingan dan pertikaian politik secara tajam antarkelompok.

Peringatan Bung Karno dan kritik Mochtar Lubis itu rupanya tak menjadi perhatian rezim pemerintah. Ketika pada 1982 Mochtar Lubis diminta merefleksikan kembali kritiknya, dengan tegas ia mengatakan tidak ada perubahan, bahkan makin parah (ST Sularto, *Kompas*, 21/7/2008).

Isu mentalitas mendapat perhatian kembali pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Ia menugasi Bappenas dan Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) selaku "*leading sector*" yang menerjemahkan dan memandu program-program revolusi mental. Jokowi juga melengkapinya dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Menurut Jokowi, revolusi mental harus dimulai dari mengenal karakter orisinal. Bangsa Indonesia, menurut Jokowi, berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan suka bergotong-royong. Karakter tersebut diyakini sebagai modal yang seharusnya membuat rakyat sejahtera.

Namun, kenyataannya malah KKN tumbuh subur. Etos kerja tidak baik, birokrasi bobrok. Menurut Jokowi, kondisi semacam itu dibiarkan selama bertahun-tahun, sehingga menjadi semacam "*budaya*" (*Kompas.com*, 17/10/2014).

Banyak kalangan menaruh hormat terhadap retorika revolusi mental Jokowi dan tampilannya saat itu. Seorang warga negara biasa, bukan turunan pembesar,

tapi memperoleh kepercayaan politik tertinggi sebagai presiden. Kesuksesan Jokowi pada periode pertama mengantarkan kemenangannya pada Pilpres 2019.

## **Titik balik**

Revolusi mental Jokowi yang semula mengundang tepuk tangan publik mengalami titik balik menjelang akhir jabatan periode keduanya. Nilai-nilai esensial revolusi mental yang dibangunnya sejak tahun awal menjabat dinodainya sendiri.

Secara formal, titik balik terjadi sejak Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Padahal, pintu yang dilalui Gibran mencederai tatanan hukum. Juga bermasalah dari sisi etika, yang berakibat pada pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi sebenarnya masih memiliki kesempatan agar revolusi mentalnya tidak mengalami titik balik, yakni tidak mengizinkan Gibran melanjutkan proses pendaftaran calon meski terbuka jalan buat sang putra. Namun, jalan itu diabaikan, Jokowi tak mengambilnya.

Banyak kalangan mengecamnya, menganggap revolusi mental Jokowi omong kosong, hoaks. Kepemimpinan politiknya tak lagi memesonakan, sebaliknya malah membahayakan demokrasi.

Andaikata Mochtar Lubis masih hidup dan ditanya perihal manusia Indonesia, jawabannya tentu tak akan beda dengan jawaban pada 1982. Sifat hipokrit, feodal,

dan keengganan bertanggung jawab atas perbuatannya, masih sangat kuat. Karena itulah, KKN merajalela.

Bukan kebetulan bila tiga lembaga negara (MK, KPK, Komisi Pemilihan Umum/KPU) "roboh" hampir bersamaan akibat ulah pejabat puncaknya. Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. Firli Bahuri diberhentikan dari jabatan Ketua KPK. Hasyim Asy'ari dipecat sebagai Ketua KPU.

Ketiga pejabat itu dinilai melakukan pelanggaran etik berat. Seperti kritik Mochtar Lubis, terkesan "enggan bertanggung jawab atas perbuatannya". Tak ada permintaan maaf karena telah mengecewakan rakyat Indonesia. Sebaliknya, malah berusaha membela diri.

Kasus pembunuhan "Vina dan Eky Cirebon" belum selesai hingga kini, tapi tak ada pihak yang bertanggung jawab, lalu meminta maaf dan bergegas menyelesaikannya. Geger "profesor palsu" tak ada pula pejabat yang meminta maaf dan mengambil tanggung jawab.

Dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono perlu diapresiasi. Ketika dihadapkan pada isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi tanggung jawabnya selaku Ketua Komite Pengawasan Tapera, ia tidak mengelak. Di tengah arogansi pejabat lain merespons tuntutan publik terkait Tapera, Basuki justru menanggapi dengan rendah hati, merasa menyesal, lalu menangguhkannya.

Permintaan maaf Jokowi di akhir kekuasaannya tak lebih dari cerminan kualitas budaya kita, yang semula hendak direvolusi oleh Jokowi. Permintaan maaf jenis ini

berhenti di bibir saja, sekadar pemerah bibir. Orang Jawa bilang "*abang-abang lambe*", diucapkan hanya sebagai pemanis belaka tanpa kewajiban pembuktian.

Permintaan maaf sekadar pemerah bibir tak memiliki daya ubah kultural. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah permintaan maaf pemimpin yang mengubah realitas sosial, yang berdampak pula pada perubahan budaya.

Sumber:

[https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/07/memaknai-permintaan-maaf-jokowi?open\\_from=Opini\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/07/memaknai-permintaan-maaf-jokowi?open_from=Opini_Page)

## Paus Fransiskus, Bung Karno, dan Penghapusan Ketetapan MPRS 33/1967



Bung Karno saat menghadiri rapat raksasa menyambut Proklamasi Kemerdekaan R.I di Lapangan

Ikada Jakarta (Lapangan Monas), 19 September 1945. (Arsip Kompas)

**P**aus Fransiskus meninggalkan jejak peradaban yang sungguh berharga di bumi Indonesia. Tak sampai sepekan di Indonesia, teks yang diproduksi, baik tuturan maupun tindakan, sungguh menukik pada inti peradaban manusia.

Bukan hanya kesederhanaan, keautentikan diri, keramahan dan kehangatan terhadap "liyan" (orang lain), melainkan juga pesan Paus Fransiskus yang begitu mendalam dan aktual untuk Indonesia.

Saat berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta, 5 September 2024, Sri Paus mengingatkan bahwa harta paling berharga yang dimiliki Indonesia bukanlah tambang emas terbesar, melainkan kerukunan dan rasa

saling menghormati. Perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, kata Paus Fransiskus.

Dan, Paus Fransiskus pun mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal, sesaat setelah Imam Masjid Istiqlal mencium kepala Sri Paus. Sebuah teks yang bermakna sangat mendalam dari sudut kebudayaan.

Bukan hanya penting buat umat Katolik, melainkan juga untuk umat lain, untuk bangsa Indonesia yang kaya ragam. Sangat penting dan relevan, menurut hemat saya, karena bertepatan pula dengan momentum transisi pemerintahan pasca-Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lama lagi meninggalkan singgasana kekuasaan yang telah diduduki 10 tahun. Selanjutnya, Prabowo Subianto, presiden terpilih, akan menggantikannya.

Empat hari berikutnya, tatkala kita masih hangat membicarakan jejak Paus Fransiskus, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan tindakan yang juga bermakna sangat mendalam dari sudut kebudayaan.

Tindakan itu adalah penghapusan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Dengan penghapusan itu MPR menegaskan bahwa Bung Karno, sang proklamator, tidak pernah mengkhianati negara.

Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 berisi pencabutan kekuasaan Soekarno dengan alasan mengkhianati negara. Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan sebagai kelompok ketetapan MPRS yang tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR Nomor

1/2003 yang memberi wewenang MPR melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR dan MPRS dari rentang waktu 1960 – 2002.

MPR menilai, tuduhan terhadap Soekarno tidak pernah dibuktikan secara hukum dan keadilan. Tuduhan tersebut juga dinilai bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum.

Pertimbangan lainnya, pada 2012 Bung Karno telah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, salah satu syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara.

Saya melihat relasi bermakna antara teks yang diproduksi Paus Fransiskus dan MPR tentang penghapusan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967. Kedua teks memancarkan makna yang penting dan relevan untuk kebudayaan Indonesia masa depan.

Inti kebudayaan adalah cara hidup manusia secara bersama. Kebudayaan terbentuk berkat tendensi manusia untuk selalu memperbaiki kehidupannya. Hari ini mestilah lebih baik daripada kemarin. Hari esok mestilah lebih baik daripada hari ini.

Kehidupan yang diperbaiki meliputi kehidupan lahir dan batin, material dan imaterial. Manusia tidak cukup memenuhi pangan, sandang, dan papan. Manusia butuh pula rasa aman dan nyaman, butuh pula pengakuan dan penghargaan.

Buat saya, tindakan MPR mencabut Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 bisa dikatakan “terlambat”. Tapi, sebagaimana ajaran kebajikan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Saya sebut “terlambat”, mestinya tak lama dari lahirnya Ketetapan MPR Nomor 1/2003, MPR sudah berani memutuskan. Tapi, proses politik, sebagaimana juga Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai produk politik, bukan produk hukum, ternyata memang membutuhkan “kesabaran revolusioner”. Terutama bagi keluarga besar Bung Karno, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kekuasaan yang terjalin dalam proses politik memiliki selernya sendiri. Kekuasaan turut menentukan perbincangan, kebijakan, dan menetapkan nilai-nilai, sehingga baru menjelang akhir kepemimpinan MPR 2019-2024 penghapusan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 baru bisa dilakukan.

Boleh jadi kesadaran kolektif, yang terbentuk melalui titik temu antara kondisi objektif dan kondisi subjektif, memang baru terwujud pada periode ini. Sebagaimana mimpi kemerdekaan rakyat Indonesia yang sudah membunyah pada dekade 1930-an, ternyata baru 15 tahun berikutnya kemerdekaan itu nyata, setelah Perang Dunia Kedua dan Jepang kalah.

Saya merasakan jalinan makna antara jejak Paus Fransiskus selama beberapa hari di Indonesia dan jejak Bung Karno yang telah menjadi sejarah yang selayaknya menuntun bangsa Indonesia.

Ada kata-kata kunci yang semakna. Paus Fransiskus mengingatkan tentang kerukunan, perbedaan bukan alasan untuk pertikaian. Bung Karno selalu mengingatkan soal persatuan, gotong royong. Bahkan, pada pidato 1 Juni 1945 Bung Karno menyebut gotong royong sebagai inti Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara.

Dengan gotong royong, individu tidak dikerdilkan. Dengan gotong royong itu pula, individu mendapatkan tempat untuk kebersamaan. Di dalam gotong royong, seseorang akan tumbuh subur dalam taman sari orang lain. Inilah idealisasi sekaligus modal sosial-kultural bangsa Indonesia.

Namun, kita juga harus kritis-reflektif. Gotong royong, asas paling dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, ternyata terus-menerus diuji. Bahkan, tak jarang justru kaum elite, para cerdas pandai lulusan pendidikan tinggi yang suka mempertontonkan tindakan tak terpuji yang menabrak logika kepastasan umum, ingkar pada prinsip dasar gotong royong.

Banyak kaum elite dipenjara karena korupsi. Bahkan, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan karena dugaan korupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran etik. Sungguh memprihatinkan. Sungguh mengoyak akal sehat dan nurani.

Saya lalu teringat pemikiran kritis generasi ketiga Mazhab Frankfurt (Jerman). Struktur normatif kehidupan masyarakat secara keseluruhan mengalami krisis

“rekognisi” (pengakuan). Pengakuan tentang hak-hak dan identitas, baik individu maupun kelompok sosial, seharusnya menjadi prinsip penataan masyarakat.

Menurut Honneth, pemikir Mazhab Frankfurt, tanpa politik rekognisi yang baik, yang berimbang, dinamika masyarakat hanya akan menghasilkan malapetaka bagi umat manusia. Maka, keadilan bukan sekadar distribusi ekonomi yang merata. Bukan “economic equality”, melainkan “social respect” dan “dignity”.

Keadilan adalah situasi tatkala orang atau sebuah kelompok sosial mendapatkan pengakuan dan penghargaan tentang hak-hak dan martabatnya, tatkala masing-masing warga dapat merealisasikan dirinya secara baik dalam kehidupan sosial, dapat bertindak bebas untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama. Dan, kita menyebutnya gotong royong.

Penghapusan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 patut diapresiasi dan dimaknai secara positif untuk Indonesia masa depan. Saya melihat negara sudah “berdamai” dengan Bung Karno.

Maka, seyogyanya segera ajarkan secara baik dan benar pikiran-pikiran Bung Karno kepada para siswa/mahasiswa. Juga pikiran pendiri bangsa Indonesia yang lain. Agar para calon penentu masa depan kita mengenali dan memahami secara baik hal-hal fundamental kebangsaan dan visi besar Indonesia merdeka.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/12/06000081/paus-fransiskus-bung-karno-dan-penghapusan-ketetapan-mprs-33-1967>

## Pancasila, Indonesia Raya, dan Kampus Berdampak



Ilustrasi Pancasila.(KOMPAS/TOTO SIHONO)

*"Ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktek hidup manusia, atau prakteknya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan."* (Bung Karno)

**P**ernyataan Bung Karno yang saya nukil untuk mengawali tulisan ini disampaikan saat berpidato pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di UGM, 19 September 1951.

Saya kira maknanya sejalan dengan konsep "kampus berdampak" yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pak Menteri *Brian Yuliarto tampaknya tak mau kampus hanya menjadi "menara gading". Ia*

*mungkin risih, kampus hanya berlomba banyak-banyakan publikasi internasional, berebut peringkat dunia. Itu pun tak jarang ditempuh tanpa mengindahkan moral akademik.*

*Sementara itu, rakyat yang sebagian keringatnya diperas untuk menghidupi kampus tak merasakan buahnya. Kampus terasing dari masyarakatnya. Karena itu, kampus harus menjadi “menara air”. Pak Menteri menawarkan gagasan “kampus berdampak”.*

Kampus tidak boleh hanya menghasilkan lulusan, publikasi, dan ranking global, tetapi harus mentransformasi kehidupan masyarakat. Kampus mesti hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai suluh peradaban, menerangi jalan, menyatukan harapan, dan menjadi ruang bagi tumbuhnya perubahan.

## **Minoritas kreatif**

Peradaban manusia niscaya terus tumbuh-berkembang. Di balik proses tumuh-berkembang itu terdapat kekuatan pendorong yang sangat penting, yakni komunitas kecil yang oleh Arnold J. Toynbee, sejarawan Inggris, disebut “minoritas kreatif” (*creative minority*).

Peradaban yang gilang-gemilang, kata Toynbee, lahir bukan dari kelompok mayoritas atau superior, tapi dari kelompok minoritas yang kreatif. Mereka adalah individu atau kelompok kecil yang memiliki kelebihan tertentu, baik moral maupun intelektual, sehingga memiliki wibawa dan pengaruh dalam masyarakat.

Penggerak dan pencipta kebudayaan adalah orang-orang kreatif dengan jumlah kecil. Kaum minoritas kreatif ini, karena tantangan zamannya, melahirkan pemikiran-pemikiran yang berujung pada perubahan kebudayaan.

Saya kira, kampus adalah rumah bagi minoritas kreatif sebagaimana dilukiskan Toynbee. Di sanalah tantangan zaman dibaca dan dipikirkan secara merdeka, kritis dan kreatif. Di sana pula gagasan-gagasan pembaruan disuarakan melalui beragam cara.

Tak ada kebenaran mutlak bagi minoritas kreatif. Orang-orang kampus senantiasa menempatkan suatu temuan (tesis) sebagai hipotesis. Kebenaran temuan itu bersifat sementara dan setiap saat siap digugurkan. Kultur inilah yang membuat kampus sebagai rumah kreatif bagi minoritas kreatif.

Sejarah Indonesia membuktikannya. Bangsa Indonesia dengan segenap piranti ketatanegaraannya jelas-jelas karya kaum minoritas kreatif yang bermula dari kampus.

Para tokoh pergerakan nasional – Soetomo, Tjipto, Tirto, Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan kawan-kawan – adalah minoritas kreatif tempaan pendidikan tinggi. Mereka memikirkan keadaan masyarakat dengan menanggalkan hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah kolonial. Mereka menulis dan berdebat tentang masyarakat jajahan dan tantangannya.

Mereka menggagas “bangsa” dan memikirkan kemerdekaannya. Mereka juga menyiapkan pranata kenegaraan baru untuk komunitas kebangsaan yang

disebut Indonesia. Sejarahwan Jepang, Takashi Shiraishi, melukiskan dinamika kaum pergerakan dalam menanggapi kehidupan awal abad ke-20 dengan sebutan “zaman bergerak”.

Minoritas kreatif itu adalah orang-orang yang sangat percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah fondasi kemajuan. Kiprah mereka mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa.

Ilmu pengetahuan adalah kekuatan untuk melakukan perubahan. Kualitas seseorang ditentukan oleh akumulasi pengetahuan yang dimilikinya. Kualitas sebuah bangsa pun sangat ditentukan oleh kapasitas pengetahuan para pemimpin dan warganya.

Mari kita baca gagasan agung tentang Indonesia Raya dan Pancasila. Dua karya yang sama-sama mencerminkan kapasitas intelektual dan akumulasi pengetahuan pendiri bangsa.

Dua karya itu bagaikan raga dan jiwa, bentuk dan isi. Indonesia Raya dan Pancasila tidak turun dari langit begitu saja, tapi hasil pergulatan intelektual yang sungguh-sungguh dan menyejarah.

Indonesia Raya direfleksikan dari reruntuhan kejayaan masa silam. Nusantara pernah gilang-gemilang tatkala menjadi kesatuan maritim di bawah Majapahit. Masa lalu disadari secara kritis, masa kini (zaman kolonial) dibaca secara kritis pula, lalu masa depan dirumuskan secara visioner dengan diikat komitmen/janji.

“Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Marilah kita berjanji,

Indonesia abadi," kata WR Soepratman dalam lagu "Indonesia Raya" tiga stanza.

Sungguh agung. Berisi kesadaran eksistensial sebuah komunitas kebangsaan yang bersatu dan berdaulat dengan jiwa merdeka untuk kebahagiaan hidup.

Lalu, Bung Karno dan minoritas kreatif lain di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengisinya dengan Pancasila. Bung Karno menawarkan Pancasila pada pidato 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar negara Indonesia merdeka.

Pancasila yang ditawarkan Bung Karno jelas bukan imajinasi kosong. Pancasila dirumuskan dengan berbekal kekuatan pemikiran dan kekayaan ilmu pengetahuan. Bung Karno menyebutnya "digali" dari bumi Indonesia.

Mereka, Bung Karno dan anggota BPUPK, bukan intelektual yang dogmatis, melainkan intelektual yang merdeka. Tidak *the book thinking*, tapi *out of the book*, bahkan *out of the box*. Pengetahuan yang diterima tidak ditelan begitu saja, tapi dikunyah sedemikian rupa hingga dirasakan kecocokannya.

Bung Karno tidak percaya begitu saja tentang teori politik (demokrasi) dan nasionalisme model Barat. Ia mengkritiknya dan menawarkan gagasan baru yang dinilai cocok untuk masyarakatnya.

Demokrasi Barat dikritik hanya berkaki politik, hanya berorientasi pada hak perseorangan, sehingga tidak cocok untuk Indonesia. Nasionalisme model Barat

juga dikritik. Kata Bung Karno, nasionalisme Barat itu arogan, chauvinis, menjajah, sehingga juga tidak cocok untuk Indonesia.

Demokrasi untuk Indonesia harus pula berkaki ekonomi. Bung Karno menyebutnya "sosio-demokrasi". Demokrasi haruslah menjamin kesejahteraan rakyat.

Nasionalisme untuk Indonesia haruslah berperikemanusiaan. Nasionalisme Indonesia harus memiliki sifat welas-asih, melindungi, bukan mengancam. Bung Karno menyebutnya "sosio-nasionalisme".

Kesungguhan mengunyah ilmu pengetahuan itu, misalnya, bisa pula dibuktikan melalui *Indonesia Menggugat*. Pledoi Bung Karno setebal 192 halaman (Penerbit S.K. SENO, Djakarta, 1956) yang dibacakan pada 1930, yang ditulis di usia yang relatif muda (30 tahun), adalah karya monumental yang hingga kini masih sering dikutip untuk memahami sistem kolonialisme/imperialisme Hindia-Belanda.

Bung Karno merujuk puluhan referensi berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Indonesia, dan daerah (Jawa). Tak kurang 190 catatan kaki, sebagian besar berisi rujukan pada data bibliografis.

Tak aneh bila Bung Karno meyakini bahwa ilmu pengetahuan bukan atribut sosial atau hiasan belaka. Ilmu pengetahuan harus menuntun praksis hidup. Harus dipergunakan untuk mengabdikan kepada kehidupan manusia, pada dunia kemanusiaan. Pak Menteri Brian Yulianto menerjemahkannya dengan menawarkan "kampus berdampak".

## **Jauh dari kehidupan nyata**

Indonesia Raya dan Pancasila sebagai dasar negara masih jauh dirasakan oleh rakyat. Lagu “Indonesia Raya” sudah hampir satu abad dikumandangkan sejak 1928, tapi hingga kini kita hanya fasih menyanyikannya.

Pun Pancasila. Teksnya dibaca setiap upacara bendera, tapi tak membekas di hati dan pikiran kita. Pancasila hanya jaya di atas kertas. Kalah di kehidupan nyata.

Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Indonesia Raya dan Pancasila sudah mendekati kenyataan melihat angka stunting Indonesia masih di atas 20 persen dan menduduki angka tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste (WHO, 2022). Laporan pemerintah terkini, angka stunting turun menjadi 19,8 persen pada 2024.

Sementara itu, kekayaan Indonesia yang dikorupsi diduga mencapai ribuan triliun rupiah. Korupsi telah menyantera negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi yang gila-gilaan membuat negara kesulitan memenuhi kewajiban konstitusinya.

Di tengah situasi semacam itu kita susah untuk sekadar membayangkan Indonesia emas pada 2045. Indonesia berpotensi kalah bersaing dengan negara tetangga.

Wajah Indonesia penuh paradoks. Dari hari ke hari gambaran paradoks itu semakin tampak, baik di bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Azas-azas ilmu pengetahuan yang berkontribusi besar bagi

pembentukan Indonesia semakin ditinggalkan, dan digantikan azas-azas kekuasaan.

Wajah paradoks Indonesia harus segera diakhiri. Kampus tentu saja memiliki peran strategis. Bila Indonesia Raya dan Pancasila tak segera dirasakan rakyat Indonesia, saya kira, kampus turut berhutang pada sejarah. Kampus abai terhadap tugas sejarah, yakni mengawal perubahan Indonesia.

Kini, yang paling dibutuhkan, saya kira, ekosistem yang melahirkan kultur akademik yang mendukung tumbuhnya minoritas kreatif. Bagaikan lahan, ekosistemnya harus menyuburkan tanaman di atasnya. Pada gilirannya kampus akan menjadi pionir bagi gairah masyarakat terhadap pengembangan sains, teknologi, dan seni.

Namun, kita memiliki pengalaman buruk yang membunuh minoritas kreatif. Di samping hal-hal yang bersifat birokratis dan administratif, serta apresiasi negara yang masih rendah terhadap kerja-kerja otak, pengalaman buruk itu adalah sistem pemaknaan yang monolitik dan hegemonik oleh penguasa.

Akibatnya, pelarangan-pelarangan terjadi di ruang kreatif. Kampus dihantui ketakutan terhadap kritik kekuasaan. Kemerdekaan berpikir lenyap. Tak ada lagi dialektika di kampus guna menemukan sintesis-sintesis.

Proses kreatif lalu jalan di tempat. Kreativitas kebudayaan tidak tumbuh dari teks yang monolitik dan hegemonik. Kreativitas mengandaikan adanya refleksi dari persilangan antarteks.

Karena itu, kampus harus dibebaskan dari pemaknaan yang monolitik dan hegemonik. Selama kampus kehilangan kebebasan akademiknya, selama kampus masih dihantui pelarangan-pelarangan, gagasan Pak Menteri tentang “kampus berdampak” hanya indah didengar.

Tanpa kebebasan akademik, tanpa kemerdekaan berpikir, kampus akan tetap terasing dari masyarakatnya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/01/05573691/pancasila-indonesia-roya-dan-kampus-berdampak>

## Merayakan Imlek: Mengingat Gus Dur dan Megawati



Atraksi barongsai saat perayaan Imlek 2574 di Vihara Dhanagun, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/1/2023). Tahun Baru China 2574 atau Imlek 2023 jatuh pada, Minggu (22/1/2023) menjadi perayaan yang dinanti oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

**B**eberapa tahun belakangan kawan saya yang satu ini selalu berkirim kue keranjang setiap menjelang Tahun Baru Imlek. Kawan ini berdarah Tionghoa yang berprofesi sebagai dosen.

Biasanya kue keranjang dikirim lewat jasa pengiriman. Tapi, kemarin itu lain. Kue keranjang dibawa sendiri ke ruang kerja saya. Sambil meletakkan kue keranjang di meja, kawan itu mengatakan sesuatu yang membuat saya menulis esai ini.

“Dulu kami harus menyembunyikan kebahagiaan saat Imlek karena politik. Tapi, sekarang kami merdeka merayakan Imlek juga karena politik,” ujarnya.

Saya tidak berkomentar apa-apa. Saya tidak tahu maksud kalimat tersebut dituturkan. Mungkin karena udara politik tanah air akhir-akhir ini lagi hangat, sehingga banyak hal yang berelasi dengan politik, atau endapan masa lalu terefleksikan.

Saya tersenyum, lalu berdiri. “Selamat merayakan Imlek,” ucap saya sambil menjabat tangannya. Kawan saya itu lalu pamit.

Kalimat singkat kawan saya itu langsung membawa ingatan kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Saat menjabat presiden dan wakil presiden, mereka punya peran sangat besar dalam membahagiakan warga Tionghoa.

Bagi warga Tionghoa, merayakan Imlek merupakan peristiwa kebudayaan terpenting. Bukan hanya merefleksikan urusan duniawi (material), tapi juga urusan spiritual (imaterial).

Tahun Baru Imlek jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024. Namun, suasana menyambut Imlek sudah terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Semarak Imlek bukan hanya dirasakan warga Tionghoa. Warga masyarakat lain pun merasakannya.

Semarak Imlek tentu saja berdampak besar secara ekonomi. Perayaan Imlek dengan tradisi khas berelasi dengan kegiatan produksi dan konsumsi yang menjadi inti perekonomian.

Banyak kalangan memperoleh manfaat. Bukan hanya warga Tionghoa, tapi juga warga yang lain. Begitulah perayaan yang menyatukan antara agama dan kebudayaan.

Imlek merupakan hari yang ditunggu-tunggu dan penuh keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Mereka menyambutnya dengan suka cita, penuh kebahagiaan. Berbagai sajian tradisi khas menandai kesukacitaan dan kebahagiaan itu. Imlek berelasi pula dengan leluhur yang telah meninggal dunia. Maka, tradisi Imlek juga berisi persembahyangan untuk leluhur.

Karena itu, saya sangat mengerti dan bisa merasakan tatkala kesukacitaan dan kebahagiaan perayaan Imlek harus disembunyikan.

Bertahun-tahun pada zaman Orde Baru warga Tionghoa tak boleh merayakan Imlek secara terbuka di ruang publik. Tak ada semarak Imlek.

Larangan tersebut dilakukan Orde Baru melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Secara tekstual pemerintah Orde Baru beralasan bahwa kebudayaan Tionghoa dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moral yang tidak wajar bagi warga negara Indonesia.

Namun, secara kontesktual, larangan tersebut berdimensi politis. Peristiwa Oktober 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dugaan keterlibatan Tiongkok menjadi penyebabnya.

Dampak tuduhan keterlibatan Tiongkok sangat serius. Aksi-aksi demonstrasi awal Orde Baru menyasar

pula kelompok Tionghoa. Beberapa kantor perwakilan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi sasaran amuk massa.

Dengan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 pemerintah Orde Baru melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa secara terbuka di Indonesia. Larangan itu juga menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa (Konghucu) tidak berstatus pemeluk agama yang diakui.

Padahal, tradisi Tionghoa masuk ke wilayah Nusantara diperkirakan bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan Cina ke Asia Tenggara ratusan tahun lalu. Artinya, tradisi Tionghoa sudah menjadi bagian dari masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia digagas.

Bahkan, proses pembentukan bangsa Indonesia tak sedikit pula kontribusi warga Tionghoa. Perbincangan tentang “bangsa” yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional awal abad ke-20 sebagian dilakukan melalui surat kabar terbitan orang-orang Tionghoa.

Namun, arus balik terjadi pasca-Orde Baru. Banyak kebijakan Orde Baru dikoreksi. Dan, koreksi paling penting bagi warga Tionghoa tentu saja pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid – Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebagai seorang demokrat sejati, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentu saja sangat mengerti penderitaan

warga Tionghoa selama tiga puluh tahun akibat kebijakan diskriminatif Orde Baru.

Pada Januari 2000, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Selaku presiden, Gus Dur menjamin bahwa semua warga Tionghoa dapat menjalankan praktik-praktik kebudayaan dan religinya secara bebas di Indonesia.

Presiden pertama hasil Pemilu 1999 era Reformasi itu juga mengakui secara resmi agama Konghucu. Agama yang diakui negara menjadi enam: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Perayaan Imlek 5 Februari 2000 menjadi perayaan pertama secara terbuka setelah sejak 1967 dilarang penguasa Orde Baru. Kita bisa merasakan kesukacitaan dan kebahagiaan warga Tionghoa saat itu.

Berbagai atraksi dan pernak-pernik khas Imlek kembali menyemarakkan Imlek. Kelenteng-kelenteng kembali semarak. Bahkan, atraksi kesenian barongsai pada perayaan Imlek tak jarang dikolaborasikan dengan kesenian setempat.

Kebijakan politik yang membahagiakan warga Tionghoa itu makin sempurna setelah Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Sebelumnya hanya libur fakultatif.

Megawati menerbitkan Keppres Nomor 19 Tahun 2002. Keppres itu bukan hanya memberi kesempatan

warga Tionghoa merayakan Imlek tanpa gangguan hari kerja, melainkan juga pengakuan dan perlakuan setara terhadap warga Tionghoa dengan warga yang lain.

Kawan saya benar. Politik membuat warga Tionghoa tertekan saat Imlek, tapi politik juga yang membebaskannya.

Saya mencatat pelajaran penting. Hal mulia dan wibawa dari kekuasaan bukan seberapa lama kekuasaan itu dipegang, tapi seberapa tepat kekuasaan itu digunakan. Bukan soal waktu berkuasa, tapi manfaat saat berkuasa bagi kebaikan bersama dan kemaslahatan umum.

Gus Dur dan Megawati tak genap satu periode menjabat presiden. Tapi, kekuasaan itu telah membahagiakan warganya yang hendak merayakan Imlek.

Selamat merayakan Imlek bagi saudara-saudara warga Tionghoa, semoga menuai kebahagiaan dan keberuntungan, *gong xi fa cai*.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/10/10111331/merayakan-imlek-mengingat-gus-dur-dan-megawati>

## Sukacita Mudik Terusik: Ada Apa Pasca-Lebaran?



Polisi menyemprotkan air dari kendaraan water canon untuk membubarkan pengunjuk rasa terkait revisi UU TNI di Jalan S. Parman depan kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

**S**ukacita mudik Lebaran kali ini sungguh terusik. Saya kira, bukan saya saja. Boleh jadi mayoritas pemudik.

Ada sejumlah hal yang membuat sukacita mudik Lebaran kali ini terusik. Dan, hal-hal itu mau tak mau membawa memori saya melompat ke akhir 1997, awal 1998, tatkala penurunan nilai rupiah terhadap dollar AS tak terbendung, lalu berimbas pada krisis politik.

Catatan saya, sejak memasuki Ramadhan, langit Indonesia tampak redup berawan. Aksi penolakan UU TNI oleh para mahasiswa dan sejumlah masyarakat sipil berlangsung di berbagai kota. Tak peduli bulan puasa.

Bahkan, aksi-aksi tersebut mulai diwarnai bentrok antara peserta aksi dan aparat keamanan.

Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi revisi UU TNI. Di samping kritik terhadap aspek isi peraturan yang dicurigai akan melemahkan prinsip supremasi sipil, juga kritik terhadap aspek proses dan prioritas kebutuhan.

Misalnya, apakah revisi UU TNI lebih urgen dibandingkan dengan undang-undang perampasan aset? Mengapa pemerintah dan DPR tak bersemangat mengesahkan undang-undang perampasan aset sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi? Bukankah pemberantasan korupsi yang sudah kronis di Indonesia diyakini sebagai salah satu cara mewujudkan pemerataan kesejahteraan/kemakmuran?

Sayang sekali, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat terkesan mandul. DPR seakan kehilangan legitimasi di mata rakyat. DPR seakan teralienasi dengan kehendak rakyat.

Misalnya, mengapa DPR tidak menyentuh isu reformasi peradilan militer, yang oleh publik dipandang sebagai salah satu isu krusial? Meski menduduki jabatan sipil, prajurit TNI berada dalam lingkup peradilan militer.

Apakah aksi-aksi penolakan UU TNI itu tak akan terlanjut pasca-Lebaran? Benarkah aksi-aksi berlabel penolakan UU TNI itu berurusan dengan UU TNI belaka, atau sejatinya berkelindan pula isu-isu lain yang sebelumnya dirumuskan oleh mahasiswa dengan sebutan "Indonesia Gelap"?

Lalu, beriringan dengan aksi-aksi penolakan UU TNI, redaksi *Tempo* diteror dengan pengiriman kepala babi yang kupingnya dipotong dan beberapa bangkai tikus yang kepalanya dipenggal. Meski paket itu ditujukan kepada *Tempo*, banyak kalangan menilai bahwa cakupan pesannya sesungguhnya ditujukan kepada publik yang kritis.

Namun, sayang sekali, teror politik melalui kepala babi itu ditanggapi datar oleh pejabat pemerintah dengan kalimat canda: "dimasak saja". Terkesan meremehkan, tak ada empati, dan menyalahkan *Tempo* yang memilih mazhab jurnalisme kritis.

Teror politik menggunakan bangkai tikus mengingatkan saya pada novel berjudul *La Peste* (versi bahasa Indonesia berjudul *Sampar*) karya Albert Camus. Novel yang membawa Camus diganjar Nobel Sastra 1957 itu bercerita tentang kekejaman Nazi (Hitler) pada Perang Dunia II.

Secara metaforik, Camus menggambarkan teror Nazi melalui penemuan bangkai tikus dalam jumlah banyak, lalu mewabahkan penyakit sampar (*pes*). Ganas sekali, kejam sekali.

Sampar menyebar dengan cepat, membunuh secara mengerikan. Sampar juga memicu penyingkiran dan pengucilan orang. Suasana kota sangat mencekam, menakutkan.

"Teror" di bidang ekonomi juga mengusik sukacita para pemudik Lebaran kali ini. Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dikabarkan terus merosot. Pada Oktober 2024, IHSG masih berada di level 7.772, tapi

terus merosot hingga 19,48 persen dalam lima bulan terakhir. Pertengahan Maret, tepatnya 18 Maret 2025, IHSG anjlok 6,12 persen hingga ke posisi 6.076 (*BBC News Indonesia*, 28/03/2025).

Saya sama sekali tak berurusan dengan IHSG, juga tak paham seluk-beluk IHSG. Seperti juga Presiden Prabowo yang mengaku tak punya saham. Pun para menteri, sehingga tak pusing lantaran IHSG merosot.

Yang saya pahami, IHSG merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara, khususnya di pasar modal. Karena itu, saya kira, berita IHSG merosot tak bisa diremehkan, mengingat bertemali dengan hal-hal lain dalam kurun waktu yang berhimpitan.

Hal lain itu di antaranya nilai tukar rupiah yang juga terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998. Pada Kamis, 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah sempat terpuruk pada posisi Rp 16.606 per dollar AS.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS disebut bakal membuat ruang fiskal Indonesia "compang-camping". Tak terlalu sulit memahaminya. Harga sejumlah barang akan melonjak, terutama yang komponennya berurusan dengan dollar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak akan melemah terus-menerus. Dia mengklaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Klaim Airlangga Hartarto itu mengingatkan saya pada klaim serupa oleh penguasa Orde Baru pada 1998. Saat itu pemerintah juga menghadapi penurunan nilai tukar rupiah. Pada 21 Juli 1997, rupiah masih di angka Rp 2.700 per dollar. Agak membaik ke titik Rp 2.633 per dollar pada 1 Agustus 1997.

Lalu, merosot terus, menjadi Rp 5.363 per dollar pada 2 Januari 1998 menuju Rp 10.000 per dollar pada 6 Januari 1998. Rupiah tembus Rp 17.000 per dollar pada 22 Januari 1998, dan tak pernah kembali pada nilai semula.

Pemerintah Orde Baru juga membangun citra optimistik dengan menyatakan “fundamental ekonomi Indonesia kuat”. Bahkan, ketika menyampaikan RAPBN 1998/1999 di depan anggota DPR pada 6 Januari 1998, Presiden Soeharto masih bilang: “Badai pasti berlalu” (*Kompas*, 7 Januari 1998).

Apa yang terjadi? Kata orang Jawa, “*kriwikan dadi grojogan*”. Semula hanya aliran kecil (*kriwikan*) yang nyaris luput dari perhatian publik, lalu membesar (*grojogan*) dan menenggelamkan.

Menurut catatan saya, sepanjang Juli hingga September 1997 perhatian publik yang direpresentasikan melalui media massa lebih terarah pada perhelatan politik di DPR dan persiapan SU MPR 1998. Mungkin nilai rupiah masih dianggap wajar.

Atau, mungkin juga karena pergunjungan politik menjelang SU MPR 1998 lebih punya daya tarik. Kalau pun penurunan nilai rupiah dibicarakan, sudut

pandangannya diarahkan pada spekulasi yang hanya bermain untung-untungan.

Boleh jadi benar, kondisi saat ini berbeda dengan situasi 1998. Pelemahan rupiah sekarang tidak seradikal krisis 1998. Saat ini barang-barang kebutuhan pokok masih tersedia di pasar.

Saat rupiah menyentuh Rp 17.000 per dollar pada 1998, kenaikan harga sejumlah kebutuhan hidup segera mengikuti. Bukan saja harga barang melambung tinggi, tapi sekaligus langka.

Rakyat panik. Harga barang melambung, daya beli merosot tajam. Kalangan berduit pun susah mendapatkan barang, karena ketersediaan di pasar terbatas. Karena itu, kini angka 17.000 membawa makna "horor". Psikologi publik rentan panik. Tak mudah dikendalikan.

Selanjutnya, mudik Lebaran kali ini juga berbarengan dengan daya beli masyarakat yang merosot. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengungkapkan, gairah konsumsi masyarakat melemah. Pelemahan konsumsi dapat dilihat dari ketiadaan tren berbelanja untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran.

Bahkan, CORE Indonesia mencatat hingga pekan ketiga Ramadhan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Sebaliknya, ada sinyal kuat, kelompok rumah tangga menengah ke bawah mengerem belanja (*Kompas.com*, 28/03/2025).

Pelemahan daya beli juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Kementerian

Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik mencapai 146,48 juta, atau setara dengan 52 persen penduduk Indonesia.

Namun, proyeksi tersebut jauh di bawah jumlah pemudik pada 2024 yang mencapai 193,6 juta, atau turun 24 persen. Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan efisiensi pemerintah. Karena kebijakan efisiensi, banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.

Langit Indonesia pasca-Lebaran boleh jadi masih redup berawan. Kebijakan unggulan pemerintah, misalnya Danantara, belum berdampak nyata yang membahagiakan rakyat. Baru di atas kertas, di mimbar pidato, kebijakan pemerintah disebut-sebut memenangkan rakyat.

Sementara itu, pejabatnya juga tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka cenderung reaksioner terhadap kritik publik. Bukan merefleksikannya untuk perbaikan kebijakan, tapi seringkali justru mereaksinya secara emosional dan dangkal.

Mudik Lebaran adalah "jeda". Kenyataan hidup yang penuh kompetisi saling mengalahkan, yang tak jarang dilakukan secara tidak adil, sewenang-wenang,

diskriminatif, penuh kelicikan dan keculasan, sejenak “terlupakan” oleh sistem kultural.

Tapi, siapa tahu, meski sejenak, di kampung halaman itu kita menemukan kembali keautentikan sebagai warga komunitas kampung yang sejatinya bersahaja, egaliter dan menyatu bersama warga yang lain. Siapa tahu dengan pulang kampung, meski sejenak, kita tercerahi.

Seingat saya, dulu pemerintah Orde Baru terlalu pongah dengan kebenarannya sendiri. Sementara itu, rakyat menuntut Soeharto turun tahta, meski baru saja diangkat kembali sebagai presiden melalui SU MPR pada Maret 1998. Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Setelah kondisi objektif-subjektif sejarah kala itu tak lagi mengizinkan Soeharto terus bertahta.

Tentu saja kondisi objektif-subjektif yang menggerakkan sejarah 1998 tak sama dengan sekarang. Tapi, saya kira, tak ada yang tahu persis seperti apa kondisi objektif-subjektif itu.

Selayaknya kita proaktif agar sejarah kelam 1998 tak terulang. Selayaknya pula kita ingin kondisi objektif-subjektif pasca-Lebaran nanti menemukan hukumnya untuk tak mengulang peristiwa 1998.

Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo seyogyanya juga tak pongah dengan pandangan sendiri. Di luar Istana niscaya bertebaran pandangan lain yang konstruktif buat bangsa dan negara.

Namun, tak bisa dipungkiri, sejarah sering pula bergerak di luar kehendak manusia. Wallahualam...

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/31/06341441/sukacita-mudik-terusik-ada-apa-pasca-lebaran>

## Hari Anak Nasional, Anak-anak Mandalika, dan Keteladanan Mentalitas



Kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Bazaar Mandalika, Kawasan The Mandalika (23/7/2024) yang digelar ITDC menggandeng Yayasan GNI.

(DOK. ITDC)

**P**eringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 yang jatuh pada 23 Juli 2024 mengangkat tema "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Membaca tema tersebut, ingatan saya segera terbang ke Pantai Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beberapa waktu lalu, bersama kolega Fakultas Hukum Universitas Jember saya mengunjungi pantai yang tak jauh dari Sirkuit Internasional Mandalika untuk ajang balap motor dunia, MotoGP Mandalika. Di pantai yang panorama lautnya begitu indah itu anak-anak Mandalika beraksi.

Mereka yang umumnya masih di bangku kelas 4 sampai kelas 6 Sekolah Dasar itu tak gentar untuk “memprovokasi” para pengunjung pantai. Mereka meledek cara pengunjung berfoto di spot-spot foto Pantai Kuta Mandalika. “Itu foto gaya KTP,” seru seorang anak. Kawan-kawannya lalu menimpali dengan ledakan-ledakan sejenis seolah-olah gaya berfoto para pengunjung sudah ketinggalan zaman di era telepon pintar dewasa ini.

Sambil terus meledek, anak-anak Mandalika menawarkan cara memfoto yang atraktif menggunakan kamera pengunjung. Ongkosnya murah, seikhlasnya, demikian mereka merayu pengunjung. Tapi, hasilnya dijamin tak mengecewakan.

Dan, betul. Buat saya yang awam fotografi, gambar yang dihasilkan spektakuler, fantastik. Misalnya, orang sedang mengangkat batu besar dengan latar lautan lepas. Melompat sembari tangan dan kaki direntangkan, atau seolah-olah tengah mendorong pulau/bukit. Berlari di tengah hujan pasir bak diterjang badai.

Cara mereka mengambil gambar pun atraktif sekali. Duduk bersila sembari badannya dimiringkan, atau telungkup. Anak lainnya sibuk mengarahkan gaya si model dadakan.

Mereka mengatur aneka gaya dan seting lokasi dengan bahan seadanya yang tersedia di sekitarnya. Pengunjung tinggal mengikuti arahan fotografer dadakan yang masih bocah itu.

Dari mana anak-anak Mandalika itu belajar fotografi? Seorang anak bercerita, mereka belajar dari

kawan-kawannya yang lebih dulu menguasai. Konon, awalnya seorang anak diajari oleh seorang turis, lalu mereka berkreasi dengan imajinasinya.

Anak-anak Mandalika itu tentu bertalenta besar. Pun pembelajar yang brilian, penuh optimisme. Kepercayaan dirinya juga sangat kuat. Mereka betul-betul "mutiara" Mandalika yang berkilau. Saya yakin kilauannya akan makin menakjubkan di masa depan.

Saya maklum melihat karya fotografi anak-anak Mandalika. Pasalnya, pendahulu mereka juga bertalenta besar.

Lihat tenun yang ikonik Lombok, motif Subahnale. Sebuah motif kuna tenun suku Sasak yang begitu indah dan menakjubkan, meski dikerjakan dengan teknologi tradisional.

Berupa susunan geometris segi enam menyerupai sarang lebah dengan motif bunga di dalamnya. Segi enam menggambarkan rukun iman (Islam) yang berjumlah enam.

Disebut Subahnale, karena motif ini merefleksikan ungkapan kekaguman terhadap kebesaran Allah. Ketika motif ini dikerjakan, perempuan penenun berulang-ulang melafazkan "Subhanallah" (Mahasuci Allah).

Di samping butuh ketrampilan yang sempurna, Subahnale dikerjakan dengan penuh penyatuan antara tata lahir dan tata batin. Penenunnya pun mestilah perempuan yang sudah menopause. Simbolisasi orang yang sudah sepenuhnya bersih dari nafsu keduniawian.

Saya melihat sesungguhnya di bumi Indonesia ini terpendam "mutiara-mutiara". Pendahulunya juga

orang-orang yang memiliki mahakarya. Misalnya, di Jawa ada Candi Borobudur dan sejumlah candi yang lain, seni wayang purwa, gamelan Jawa, juga seni batik. Di Sulawesi Selatan ada Kapal Pinisi, lalu karya sastra yang sangat terkenal, La Galigo. Di Bali ditemukan sistem pertanian Subak, juga seni tari yang mengagumkan.

Lalu, masalahnya, apakah “mutiara” itu akan berkilau? Bagaimana merawat dan melindungi “DNA bertalenta” agar muncul kilauan yang makin menakjubkan di masa depan?

Anak-anak yang sekarang berada di bangku sekolah akan memimpin pada 2045. Mereka menjadi kunci kemajuan bangsa dan negara Indonesia saat berusia 100 tahun. Mereka yang akan memastikan bahwa Indonesia Emas bukan sekadar mimpi, bonus demografi bukan musibah melainkan berkah.

Anak-anak bertalenta dan pembelajar yang penuh kepercayaan diri itu sangat butuh atmosfer pendidikan yang memberikan kebebasan berimajinasi dan kreasi. Pendidikan tidak sekadar menitikberatkan pada potensi akademik siswa. Pendidikan harus pula menjamin pembentukan karakter, pengembangan kecakapan, dan tak kalah penting memupuk daya imajinasi untuk berkreasi.

Namun, kenyataan di lapangan kita masih bergulat dengan masalah klasik. Kesenjangan membelenggu dunia pendidikan di Tanah Air, terus menghantui setiap pemerintahan. Sering kali faktor geografi dan demografi menjadi “kambing hitam”.

Faktanya, kesenjangan tak hanya berbasis wilayah, tetapi juga status sosial ekonomi. Keadilan pendidikan masih menjadi mimpi yang tak mudah diwujudkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mencapai 9,13 tahun, setara dengan kelas 9 SMP/ sederajat. Tahun sebelumnya sebesar 9,08 tahun.

Namun, sebarannya terdapat kesenjangan antarprovinsi. Nilai RLS tertinggi DKI Jakarta dengan 11,42 tahun. Papua menjadi provinsi dengan RLS terendah, sebesar 7,34 tahun, setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat. Provinsi lain yang memiliki RLS di bawah rata-rata nasional, di antaranya, Kalimantan Barat (8,17 tahun), Nusa Tenggara Timur (8,31 tahun), dan Nusa Tenggara Barat (8,39 tahun), tempat “mutiara” Mandalika terpendam.

Kesenjangan berbasis ekonomi terlihat pada angka partisipasi kasar (APK). Penduduk miskin masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan, terutama jenjang pendidikan tinggi. Padahal, kesetaraan akses pendidikan menjadi salah satu cara mengatasi kesenjangan ekonomi.

Capaian APK perguruan tinggi pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) hanya sebesar 17,54 persen. Sementara pada kelompok dengan pengeluaran tertinggi (kuintil 5) mencapai 52,65 persen (*Kompas.id*, 22/07/2024).

Pemerataan pendidikan antardaerah dan antarsatuan pendidikan, yang di antaranya meliputi fasilitas, sumber daya manusia (SDM), dan pengelolaan,

memang menjadi tantangan setiap pemerintah. Namun, pendidikan yang tidak sekadar menitikberatkan pada potensi akademik, tapi juga menjamin pembentukan karakter, pengembangan kecakapan, dan memupuk daya imajinasi, sangat butuh “keteladanan mentalitas”.

Keteladanan mentalitas yang saya maksud adalah keteladanan sikap mental untuk menjauhi apa yang oleh Koentjaraningrat, tokoh antropologi Indonesia, disebut “mentalitas menerabas”. Atau, apa yang oleh sastrawan dan jurnalis Mochtar Lubis disebut hipokrit dan feodal.

Mentalitas menerabas, hipokrit dan feodal itulah yang membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme sulit diberantas. Malah terkesan gila-gilaan di era Reformasi ini. Yang pada gilirannya bisa menawan dan mengerdilkan talenta besar dan optimisme anak-anak.

Karena itu, keteladanan mentalitas harus ditunjukkan oleh para pemimpin pemerintahan dan lembaga pendidikan, dari yang tertinggi hingga terendah. Termasuk guru yang sehari-hari berhadapan dengan murid.

Tanpa keteladanan mentalitas susah bangsa ini akan menjumpai Indonesia Emas di tahun 2045. “Mutiara” Indonesia tak akan berkilau.

Sumber:

<https://www.kompas.com/stori/read/2024/07/24/183046479/hari-anak-nasional-anak-anak-mandalika-dan-keteladanan-mentalitas>

## Dokter Asing dan Penyakit Tak Percaya Diri



Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7/2024). Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir.

(ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

**K**ampus kedokteran Indonesia heboh. Gara-gara Prof. Budi Santoso diberhentikan secara tiba-tiba sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair).

Dari kabar yang saya ikuti melalui media massa, pemberhentian itu terkait dengan penolakan Prof. Budi Santoso terhadap rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Namun, pihak Unair menyatakan bahwa pencopotan tersebut merupakan kebijakan internal. Universitas hendak menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menilai pemberhentian itu urusan internal Unair. Kemenkes tidak punya hubungan kelembagaan yang bisa mengintervensi universitas.

Meski pihak Unair dan Kemenkes membuat klarifikasi, logika publik tak bisa menyembunyikan benang merah antara sikap sang profesor dan rencana sang menteri yang mau mendatangkan dokter asing.

Relasi antarteks yang dikonsumsi publik dengan mudah menurunkan proposisi bahwa pemberhentian Prof. Budi Santoso dari jabatan Dekan FK Unair berhubungan dengan sikapnya yang menolak rencana Menkes mendatangkan dokter asing.

Isu dokter asing menarik dari perspektif saya. Tak mudah kita keluar dari jeratan kultur masyarakat pascakolonial. Hati-hati dengan jeratan kultur masyarakat pascakolonial.

Saya yakin, masing-masing memiliki data dan tafsirnya untuk mengukuhinya. Menkes menganggap dokter asing dibutuhkan di Indonesia, sebaliknya Prof. Budi Santoso dan para dokter lain.

## **“Xenofobia” dan “Xenofilia”**

Bagi masyarakat pascakolonial seperti Indonesia, sebutan “asing” tak bebas nilai, kekuasaan, dan kepentingan. Serupa dengan sebutan “pribumi” pada zaman kolonial.

Demikian pula turunannya, seperti dokter asing, tenaga kerja asing, produk asing, modal asing, dan sebagainya. Ada beban politik identitas (kebangsaan) dengan segenap ikutannya.

Muncullah dua hal yang bersifat laten. Yakni, sikap “xenofobia” pada satu sisi dan “xenofilia” pada sisi yang lain.

Xenofobia merupakan ketakutan berlebihan pada hal-hal yang berbau asing, sehingga cenderung menolaknya, cenderung anti. Kesengsaraan masa lalu sebagai kaum yang terjajah turut mbingkainya.

Sebaliknya, xenofilia merujuk sikap pengagungan berlebihan pada hal-hal yang berlabel asing, sehingga cenderung meremehkan hal-hal yang dari dalam sendiri. Pengagungan berlebihan pada label asing itu juga konstruksi sosial yang bisa dilacak jejaknya pada zaman kolonial.

Saya membaca dua hal tersebut merefleksikan penyakit tak percaya diri yang bersifat laten. Tersembunyi dan menjerat, serta potensial muncul dalam konteks tertentu seiring dengan kepentingan-kepentingan yang menyertainya.

Lalu, apakah mendatangkan dokter asing itu merefleksikan xenofilia, sebaliknya sikap menolak itu menunjukkan xenofobia? Saya kira, tidak selalu, belum

tentu. Di situlah dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran para pihak. Dibutuhkan pula sikap kritis.

Kebijakan publik bukan tak boleh dikritik, termasuk kebijakan mendatangkan dokter asing. Pun fakta kemampuan dalam negeri untuk menyediakan dokter bukan tak bisa disangkal. Juga kinerja para dokter kita hari ini.

Keterbukaan, kejujuran dan sikap kritis membuka jalan pencarian titik temu. Bukankah kedua pandangan hendak menuju pada titik yang sama?

## **Teladan dari pendiri bangsa**

Para pendiri bangsa dapat menjadi teladan. Eropa (Barat) yang maju bukan diterima begitu saja, atau disikapi "serba anti", tapi dibaca secara kritis. Warisan nenek moyang yang feodal pun dikritik secara tajam.

Soekarno, misalnya, mengecam keras model nasionalisme Eropa yang *chauvinis*, bersifat serang-menyerang. Nasionalisme Eropa memang membawa kemajuan dan kejayaan, tapi hanya mengejar kepentingan sendiri, mengabaikan bangsa lain.

Nasionalisme semacam itu oleh Soekarno ditolak, karena menjadi penyebab penjajahan di muka bumi. Yang diinginkan adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan. Nasionalisme yang mengakui persamaan hak semua suku bangsa, ras, dan agama. Nasionalisme progresif yang antipenjajahan. Kata Soekarno, nasionalisme yang tumbuh di tamansarinya internasionalisme.

Saya kira, Pancasila pun demikian. Pancasila lahir dari refleksi persilangan antarteks yang dilakukan pendiri bangsa. Ada dialektika pemikiran yang intensif. Soekarno menyebut “digali” dari bumi Indonesia, yang menunjukkan keterbukaan, kejujuran dan sikap kritis.

Pancasila bukan tumbuh dari sumber asli (warisan nenek moyang) saja, juga bukan dari pinjaman asing belaka. Tak ada xenofobia, pun bukan xenofilia. Pancasila bukan warisan leluhur, juga bukan *copy paste* asing (Barat), melainkan efek kritis hubungan antarteks.

## **Refleksi Jaya Suprana**

Saya merasa perlu mengetengahkan kembali refleksi Jaya Suprana yang dituliskannya setahun lalu, “Meragukan Karya Bangsa Sendiri” (*Kompas.com*, 05/07/2023). Saya kutip kembali pengalamannya yang menarik dan inspiratif. Saat ia hendak mementaskan wayang orang di panggung Sydney Opera House, Australia.

“Pada masa itu, hasrat saya antusias didukung oleh manajemen Sydney Opera House. Namun diragukan justru oleh sesama warga Indonesia sendiri, dengan dalih bahwa saya ingin mempermalukan bangsa Indonesia di forum internasional karena wayang orang adalah seni kelas kampung,” kata Jaya Suprana (*Kompas.com*, 05/07/2023).

Tapi, pada 18 Desember 2018, ia membuktikan bahwa wayang orang bukan seni kelas kampung. Jaya menggelarkan lakon Banjaran Gatotkaca oleh Laskar Indonesia Pusaka di panggung Sydney Opera House,

Australia. Ternyata, wayang orang dapat pula menjadi seni kelas dunia. "Pergelaran itu memperoleh sambutan *standing ovation* lebih dari 2.000 hadirin memadati hall utama Gedung Kesenian paling bergengsi di planet bumi masa kini," tulis Jaya Suprana.

Tidak hanya *standing ovation*. Kata Jaya Suprana, sesuai pertunjukan, para hadirin antre panjang untuk foto bersama dengan para seniman/seniwati wayang orang.

Pergelaran itu juga dipuji oleh Manajer Produksi Sydney Opera House, Derrin Brown, sebagai satu di antara pertunjukan terbaik sepanjang sejarah Sydney Opera House. Jelas bukan karya kaleng-kaleng dari manusia kaleng-kaleng.

Urusan dokter tentu saja tidak sama dengan pertunjukan wayang orang. Tapi, semangat untuk menghasilkan produk yang berkelas tidaklah berbeda.

Penyakit tak percaya diri konstruksi kolonialisme suatu saat pasti sembuh. Berkat semangat yang kuat untuk mengedepankan keterbukaan, kejujuran, dan kekritisannya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/08/10524911/dokter-asing-dan-penyakit-tak-percaya-diri>

# **B**agian 3

## **Korporatokrasi, Oligarki dan Korupsi**

## Bung Karno, Korporatokrasi, dan Eko-Marhaenisme



Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno (keempat kanan) bersama Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar (ketiga kiri), Kepala Pusat penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar (keempat kiri) dan sejumlah pejabat terkait menunjukkan barang bukti uang sitaan saat konferensi pers kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Gedung Bundar Jampidus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (17/6/2025). Kejagung menyita Rp11,8 triliun lebih yang merupakan penyerahan dari lima terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO.

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

*"Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya."* (Bung Karno)

**M**enyambut peringatan wafatnya Bung Karno (21 Juni), petikan pidatonya yang disampaikan pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1964 kembali terdengar nyaring. Saya hendak merujuk dua peristiwa aktual saja.

Pertama, heboh penambangan nikel di wilayah Raja Ampat yang dikenal pula dengan julukan “Surga Terakhir di Bumi”. Presiden Prabowo akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Namun, ada satu perusahaan yang tidak dicabut IUP-nya, yakni PT GAG Nikel.

Julukan “Surga Terakhir di Bumi” itu bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan faktual. Berbagai sumber menyebutkan bahwa lanskap Raja Ampat memiliki keindahan yang menakjubkan. Raja Ampat merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Raja Ampat memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan beting, yang mengelilingi empat pulau utama, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool. Keajaiban alam Raja Ampat bukan hanya milik Indonesia, tapi juga menjadi kekayaan dunia yang perlu dijaga bersama.

Kemolekannya tak mudah dilukiskan. Saya yakin banyak sekali warga Indonesia yang berharap kelak bisa menikmati anugerah Tuhan di Papua Barat Daya itu.

Namun, “Surga Terakhir di Bumi” itu kini terancam oleh ekspansi tambang nikel. Anugerah Tuhan yang semestinya dijaga kelestariannya berpotensi lenyap dan tinggal cerita akibat ketamakan/kerakusan manusia.

Kedua, penyitaan uang Rp 11,8 triliun atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa hari lalu. Uang Rp 11,8 triliun tersebut berasal dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Wilmar International Limited yang merupakan induk perusahaan Wilmar membantah bahwa uang tersebut merupakan hasil sitaan Kejagung. Perusahaan itu menyebut, uang Rp 11,8 triliun tersebut merupakan uang jaminan untuk menunjukkan iktikad baik Wilmar Group atas kasus yang sedang menyimpannya (*Kompas.com*, 18/06/2025).

Selain Wilmar Group, merujuk laman resmi Mahkamah Agung (MA), ada dua korporasi lain yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni PT Musim Mas Group dan PT Permata Hijau Group. Nilainya juga tidak kecil. Musim Mas Group sebesar Rp 4,89 triliun, dan Permata Hijau Group sebesar Rp 937,5 miliar.

## **Korporatokrasi**

Dua peristiwa aktual tersebut, saya kira, merepresentasikan realitas korporatokrasi yang mencengkeram negeri ini.

Korporatokrasi diartikan gabungan kekuatan korporasi besar, lembaga keuangan dan pemerintahan untuk menyatukan kekuatan finansial dan politik guna memaksa masyarakat mengikuti kehendak mereka. Inilah percumbuan antara kekuatan kapital dan politik yang mengerikan, karena beroperasi pada tingkat kebijakan (legalitas) yang tak jarang mengatasnamakan kepentingan negara.

Korporatokrasi menyasar ranah kebijakan dan regulasi tatakelola bidang-bidang basah, seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, perbankan, perdagangan, kesehatan. Dengan menguasai ranah kebijakan dan regulasi, apapun yang dilakukan akan tampak legal.

Bibit korporatokrasi sesungguhnya telah tertanam sejak zaman kolonial. Percumbuan antara korporasi dan pemerintah kolonial membuat rakyat jajahan tertindas dan miskin. Meski sesungguhnya rakyat memiliki alat-alat produksi.

Realitas penindasan dan kemiskinan itulah yang dilihat dan ditentang oleh Bung Karno melalui marhaenisme. Pernyataan Bung Karno yang saya kutip di atas tentu saja berbasis pada pemikiran marhaenisme.

Korporatokrasi mendapatkan angin segar pada zaman Orde Baru. Makin menggurita justru pada zaman Reformasi.

Dilihat dari sudut ekspansi kapitalisme dunia, Orde Baru dan Reformasi sejatinya berada dalam satu perahu. Keduanya lahir di tengah kekacauan ekonomi yang parah, lalu melakukan rehabilitasi ekonomi dengan dana

pinjaman luar negeri berdasarkan resep lembaga keuangan dunia. Kedua rezim menjalankan politik “pintu terbuka”.

Kalau politik pintu terbuka rezim Orde Baru dimaksudkan untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam kerangka kerja “dunia melawan komunisme”, politik pintu terbuka rezim Reformasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam kerangka kerja “dunia pasca-Perang Dingin”.

Kedua dunia sama-sama dikendalikan oleh negeri kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat. Karena itu, kedua rezim juga menjadi subordinat kapitalis dunia. Jelas sekali korporatokrasi adalah menifestasi neoliberalisme.

Secara teoritis, pemerintah yang mendapatkan kekuasaan langsung dari rakyat seharusnya jauh lebih kuat dan mampu mengendalikan korporasi tersebut. Namun, pemerintah dalam arti luas justru tunduk pada kepentingan ekonomi korporasi. Kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berdaya. Mereka mudah disuap, mudah tertawan oleh kepentingan korporasi.

Korporatokrasi jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Esensinya bukan terletak pada percumbuhan antara kapital dan politik, melainkan percumbuhan itu melegalkan eksploitasi sumber daya alam dan manusia demi keuntungan kapitalis dan elite penyelenggara negara semata.

Mereka tidak terbatas pada korporasi besar (multinasional) dan pemerintahan di tingkat pusat saja, tapi juga korporasi nasional dan pemerintahan di tingkat

daerah. Percumbuhan itu tidak hanya mengeruk secara rakus kekayaan alam, tapi juga rentan terhadap korupsi yang dilakukan dengan menyandera negara (*state-hijacked corruption*).

Korupsi tersebut melibatkan pemerintah dalam arti luas, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan, sampai batas tertentu didukung sebagian media massa dan kaum intelektual.

## **Menyelamatkan Indonesia**

Aksi menyelamatkan Indonesia harus menjadi agenda penting dan utama bangsa ini. Gurita korporatokrasi terbukti menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan.

Pengelolaan kekayaan alam Indonesia bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melainkan mengalir untuk kaum elite di dalam negeri maupun luar negeri. Kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati kalangan terbatas, bukan rakyat pada umumnya.

Bahkan, negara pun kesulitan memenuhi kewajiban konstitusi, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Angka korupsi, penggelapan, dan sejenisnya yang diduga mencapai ribuan triliun rupiah sangat kontras dengan kesulitan negara untuk menyediakan beasiswa dan fasilitas pendidikan yang baik. Kontras pula dengan angka stunting yang masih tinggi (20 persen) dan fasilitas kesehatan untuk rakyat yang memprihatinkan.

Pesan Bung Karno di atas patut direnungkan. Ternyata pengelolaan kekayaan negara tidak cukup oleh bangsa sendiri tanpa didasari jiwa dan semangat yang

oleh Bung Karno disebut “sosio-nasionalisme”. Para penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan haruslah orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia dan memahami betul nasionalisme berperikemanusiaan, nasionalisme yang berpijak pada keadilan sosial.

Selama ini kita terlena oleh praktik korporatokrasi yang dibungkus oleh istilah-istilah eufemistis, seperti kemitraan, kontrak karya, alih teknologi, dan lain-lain, yang ternyata berisi penggarongan kekayaan. Ujungnya, bukan hanya ketidakadilan bagi rakyat Indonesia hari ini, melainkan pewarisan ketidakadilan kepada rakyat atau generasi akan datang.

Karena itu, aksi menyelamatkan Indonesia harus dipahami sebagai tugas sejarah yang tak pernah selesai. Bukan untuk Indonesia hari ini saja, melainkan Indonesia hari esok. Hal itu didasari oleh pandangan ideologis bahwa hubungan kita dengan tanah air, sebagaimana dijelaskan Bung Karno, bukan hubungan ekonomi semata, tapi hubungan ekologis dan spiritual. Hubungan tersebut membentuk kewajiban etis dan nilai-nilai sebagai landasan moral praktik bernegara.

Saya lalu teringat gagasan “eko-marhaenisme” yang dipromosikan oleh Prof. Arief Hidayat, seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI. Menurut Arief Hidayat, eko-marhaenisme adalah pertemuan antara semangat marhaenisme dengan prinsip ekologi yang berkelanjutan.

Eko-marhaenisme ditawarkan sebagai paradigma untuk menjawab tantangan Indonesia dewasa ini:

bagaimana mengelola kekayaan alam berbasis keadilan sosial tanpa merusak daya dukung lingkungan dan mengorbankan generasi mendatang (*Marhaen.id*, 10/05/2025).

Saya mengamini gagasan eko-marhaenisme. Gagasan itu menggariskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan sosial (demokrasi ekonomi) yang berkelanjutan. Demokrasi Indonesia harus pula menjamin kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, bukan demokrasi yang hanya menjamin hak politik warga negara. Prinsip-prinsip ekologis dipandang relevan dan memperkuat teori marhaenisme untuk menyelamatkan Indonesia.

Namun, gagasan eko-marhaenisme tak cukup diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Tak kalah penting dari bunyi pasal-pasal adalah semangat dan moralitas penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan.

Tanpa semangat dan pijakan moral yang kuat, pasal-pasal yang pro-rakyat pun akan disiasati. Selamatkan Indonesia, sekarang juga!

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/20/06303901/bung-karno-korporatokrasi-dan-eko-marhaenisme>

## Kesaktian Pancasila Menurut AI



Ilustrasi(KOMPAS)

**S**etelah mengikuti upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Universitas Jember, 1 Oktober 2025, saya iseng bertanya kepada Meta AI, apakah Pancasila itu sakti? Jawabannya menarik didiskusikan.

Kata Meta AI, Pancasila bukanlah sesuatu yang sakti dalam arti magis atau supernatural, mengingat Pancasila adalah ideologi negara dan dasar filosofis bagi negara Indonesia.

Dalam konteks ini, "kesaktian" Pancasila lebih merujuk pada kekuatan moral, filosofis, dan ideologisnya dalam membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, serta menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Meta AI, Pancasila memiliki kekuatan dan makna yang mendalam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatannya terletak pada kemampuan Pancasila untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, serta menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara.

Soal kekuatan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam, saya kira, benar adanya. Pancasila mempertemukan keragaman masyarakat Indonesia. Bukan hanya dari sudut nilai-nilai normatif, tapi praksis berkebangsaan. Keragaman Indonesia terlindungi, karena Pancasila memberikan hak hidup kepada keragaman itu. Perihal ini bisa kita klaim sebagai kesaktian Pancasila.

Namun, apakah Pancasila juga sakti sebagai pedoman dalam pemerintahan dan pembangunan negara? Secara retorik-normatif boleh jadi benar, sakti.

Pancasila sering hadir dalam pidato kenegaraan, upacara resmi (kenegaraan), naskah akademik peraturan perundang-undangan, dan kegiatan pemerintahan yang lain. Bahkan, menjadi mata ajar di sekolah/kampus.

Namun, bagaimana secara praksis? Presiden Prabowo pun menyangsikannya. Ia menulis buku berjudul *Paradoks Indonesia dan Solusinya*. Substansinya menggugat kesaktian Pancasila pada tataran praksis.

Kesaktian Pancasila diuji bukan di atas kertas belaka, melainkan di lapangan. Di lapangan inilah Pancasila terseok-seok. Bila Pancasila jaya di lapangan, semestinya tidak timbul paradoks Indonesia. Semestinya

rakyat Indonesia hidup berkemakmuran. Semestinya keadilan sosial juga terdistribusikan secara merata.

Namun, sebagaimana ditulis Presiden Prabowo, yang terjadi justru paradoks. Negeri kaya raya, tapi rakyat hidup kekurangan. Makanan bergizi melimpah di sebagian kecil keluarga, sementara sebagian besar menunggu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian kecil keluarga tak sulit memilih kampus bergengsi dan mahal, tapi sebagian lain menunggu KIP-Kuliah.

Diskusi dengan Meta AI lalu saya lanjutkan dengan pertanyaan, siapa/apa musuh Pancasila sekarang ini?

Meta AI mengidentifikasi musuh Pancasila: komunisme/marxisme-leninisme, ekstremisme agama, liberalisme ekstrem, radikalisme dan terorisme, serta tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Yang menarik, pemetaan Meta AI sudah berkembang dengan memasukkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai musuh Pancasila. Meskipun masih di urutan terbawah.

Hal itu berbeda dengan beberapa bulan lalu, tepatnya awal 2025. Mesin cerdas itu belum memasukkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai musuh Pancasila. Hal itu mengindikasikan bahwa diskusi kritis tentang Pancasila semakin mengisi ruang digital. Kesaktian Pancasila dilihat dalam praksis bernegara.

Dalam perspektif itu, Pancasila ditantang oleh fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang gila-gilaan. Masihkah Pancasila bisa disebut sakti?

## **“Korupsisme” musuh utama**

Secara historis, “isme-isme” yang diidentifikasi Meta AI sebagai musuh Pancasila itu memang pernah mengganggu eksistensi Indonesia. Komunisme, misalnya, melalui Peristiwa Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Ekstremisme agama melalui Negara Islam Indonesia (NII), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan gerakan separatisme lain.

Karena itu, saya maklum bila perspektif tersebut juga mendasari ikrar yang dibaca saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025. Dua alinea (dari lima alinea) ikrar berbunyi:

*“Bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

*“Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara.”*

Kata “rongrongan”, saya kira, merujuk pada komunisme, ekstremisme agama, dan gerakan separatisme lain yang pernah mengganggu Indonesia. Termasuk di dalamnya radikalisme dan terorisme.

Namun, secara faktual “isme-isme” itu tidak meruntuhkan pemerintahan. Sejarah mencatat, “isme” yang meruntuhkan pemerintahan justru yang berasal

dari dalam pemerintahan sendiri, bukan dari luar pemerintahan.

Sebut saja "korupsisme". Ia mengajarkan dan mengabsahkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kelompok dan kroni-kroninya. "Korupsisme" inilah musuh utama Pancasila, baik secara teoritis maupun nyata.

Kita menambahkan "isme" pada fenomena korupsi di Indonesia, mengingat telah menjadi tindakan kolektif yang disadari dan dipikirkann oleh pelaku, baik penyelenggara negara maupun kalangan lain yang berkepentingan.

Karena disadari dan dipikirkan secara kolektif, korupsi menjadi tindakan yang melembaga, sistematis, dan diupayakan untuk dipelihara oleh para pendukungnya. Ada doktrinnya di kalangan pendukung. Ada pula kode-kode, bahasa komunikasi, dan ritualnya.

"Korupsisme" mewujud dalam bentuk pencurian kekayaan negara (anggaran, kekayaan alam, dan kekayaan lain), manipulasi peraturan perundang-undangan untuk menyembunyikan dan melegalkan tindakan korupsi, penormalan "koncoisme" dan nepotisme untuk saling melindungi. Yang tak kalah jahat adalah manipulasi nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila yang semestinya mendasari kehidupan bernegara dan segenap kebijakan serta peraturan perundang-undangan direduksi sebagai etika pergaulan sosial belaka. Praksis Pancasila dalam bernegara yang menjadi inti Pancasila dikaburkan, dilemahkan, dan disembunyikan secara sistematis.

Pancasila sebagai ideologi kritik atas kehidupan bernegara juga mengalami pelemahan. Yang terjadi malah sebaliknya, Pancasila digunakan sebagai alat pemukul terhadap pihak-pihak yang kritis, yang berbeda pandangan dengan penguasa. Mereka dicap anti Pancasila, dikategorikan musuh Pancasila.

Pelan tapi pasti, "korupsisme" menggerogoti daya tahan pemerintahan. Inilah yang paling tepat disebut "rongrongan" dalam ikrar tersebut. Bukan hanya mengancam pemerintahan, melainkan juga eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan.

Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) membuktikannya. Klaimnya sebagai pemerintahan yang mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, terbukti hoaks, omong kosong.

Ternyata, yang meruntuhkan pemerintahan Soeharto bukan komunisme, bukan pula ekstremisme dan radikalisme agama, melainkan "korupsisme". Ibarat orang yang berdiri terendam air sampai ke leher, ombak kecil pun sudah cukup untuk menenggelamkannya. Dan, Soeharto tenggelam setelah dihantam ombak berupa krisis rupiah pada 1997-1998.

Sejarah semestinya menjadi pelajaran penting bagi bangsa. Namun, sungguh ironis, "korupsisme" yang menjadi musuh utama Pancasila dan secara nyata menenggelamkan pemerintahan Soeharto bukan disadari untuk dilawan, sebaliknya justru semakin diakrabi dan ditumbuhkembangkan secara sistematis pada era Reformasi.

Ada sejenis pameo, bila pada zaman Orde Baru korupsi dilakukan di bawah meja, pada era Reformasi mejanya pun ikut dibawa. Korupsi semakin terang-terangan di hampir semua lini kehidupan, baik yang profan maupun sakral.

“Korupsisme” semakin banyak pendukungnya. Ajarannya pun semakin canggih. Kualitasnya juga semakin hebat. Kini angka milyaran sudah dianggap kecil. Triliunan sudah jamak.

Negara sungguh tersandera oleh paham musuh utama Pancasila, “korupsisme”. Pancasila ditendang, “korupsisme” melenggang. Dibutuhkan keberanian dan energi sangat besar, terutama pemimpin puncak pemerintahan. Ujian nyata bagi Presiden Prabowo yang bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan berjanji hendak menjalankan pemerintahan yang bersih serta menyelamatkan kekayaan Indonesia.

AI sudah memetakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai musuh Pancasila. Suatu saat, boleh jadi, mesin cerdas itu menaruh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di urutan teratas sebagai musuh Pancasila.

Kini, Pak Presiden, giliran Anda menjawab, apakah kesaktian Pancasila itu benar-benar nyata, atau “omon-omon” belaka.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/10/02/07415711/kesaktian-pancasila-menurut-ai>

## One Piece dan Paradoks Indonesia



Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTA)

**B**endera One Piece sungguh menyita perhatian publik belakangan ini. Baik bermotif ekonomi maupun politik, momentumnya tepat. Saat bangsa Indonesia hendak memasuki Agustus 2025, bulan kemerdekaan Indonesia.

Di bulan sakral itu seharusnya bendera Merah Putih mengangkasa sebulan penuh tanpa ada tandingan bendera lain. Bukan hanya di kantor-kantor pemerintah dan swasta, melainkan juga di rumah-rumah warga.

Namun, kesakralannya terusik oleh bendera Jolly Roger yang menjadi simbol bajak laut di anime One Piece. Bendera Jolly Roger itu dikibarkan sebagian warga masyarakat menandingi sang saka Merah Putih.

Meski tak jelas mewakili komunitas apa, siapa yang merencanakan dan dengan tujuan apa, pengibaran

bendera One Piece terkesan mengejek, menantang, dan menyaingi Merah Putih. Serupa pengibaran bendera kelompok separatis.

Karena itu pula, beberapa elite pemerintahan menanggapi dengan nada keras. Pengibaran bendera One Piece ditengarai sebagai gerakan perlawanan terhadap negara, bermotif memecah-belah bangsa, sehingga berpotensi pidana.

Namun, Presiden Prabowo rupanya memilih lebih lunak. Ia mengizinkan pengibaran bendera One Piece sebagai ekspresi kreativitas masyarakat dan bukan menggantikan Merah Putih. Prabowo, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak mau bendera One Piece itu disandingkan dengan bendera Merah Putih (*Kompas.com*, 06/08/2025).

Saya lalu teringat era pemerintahan Presiden Gus Dur. Saat itu Gus Dur mengambil langkah berani dengan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Tentu dengan catatan tidak lebih tinggi dari Merah Putih.

Gus Dur menganggap Bintang Kejora sebagai ekspresi budaya dan identitas masyarakat Papua. Ia menyamakan bendera Bintang Kejora dengan bendera-bendera lokal di daerah lain di Indonesia, yang tak selalu mengandung makna politik.

## **Fakta paradoks**

Saya bisa memahami bahwa sejumlah elite pemerintahan tersengat oleh pengibaran bendera One Piece di saat kita seharusnya mengibarkan Merah Putih. Mereka melihat tendensi separatisme. Atau, setidaknya

ada kepentingan politik kekuasaan yang hendak mengacaukan pemerintahan Prabowo.

Pemikiran seperti itu logis. Mengapa? Presiden Prabowo memasuki pemerintahan dengan membawa fakta paradoks tentang Indonesia. Meskipun saat kampanye mengklaim “keberlanjutan” rezim Joko Widodo, Prabowo sejatinya membawa gagasan sendiri. Ia menulis buku berjudul *Paradoks Indonesia dan Solusinya* (2022). Prabowo melihat Indonesia sebagai negeri kaya raya, tapi sebagian besar rakyatnya miskin. Hal itu terjadi, karena pengelolaan kekayaan Indonesia yang salah.

Fakta paradoks itu lalu direproduksi oleh Prabowo di berbagai kesempatan dalam kapasitas sebagai presiden. Ia menyebut korupsi yang gila-gilaan, kebocoran anggaran, pengusaha nakal yang suka mengemplang pajak dan membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri, serta segenap tindakan jahat lain yang mengakibatkan negeri kaya raya tapi sebagian besar rakyatnya miskin.

Prabowo sangat sadar bahwa fakta paradoks itu terjadi dalam konteks sejarah ekonomi-politik Indonesia. Benih penyebabnya sudah tertanam sejak zaman kolonial. Ia mengecam praktik *laissez-faire* yang hanya menciptakan banyak orang miskin, sedikit orang kaya. Di negara dengan sistem kapitalisme, menurut Prabowo, orang kaya memang tumbuh, tetapi orang miskin tumbuh jauh lebih cepat. Indonesia termasuk di dalamnya.

Karena itu, Prabowo mengklaim bahwa pemerintahan yang dipimpinnya hendak memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berazaskan Pancasila. Ia menolak kapitalisme neoliberal yang membuahkan paradoks Indonesia, tapi juga bukan salin-tempel sosialisme. Prabowo meyakini ada sisi positif dari kapitalisme dan sosialisme yang perlu diambil untuk Indonesia.

Fakta paradoks itu bukan retorika belaka di buku dan pidato Prabowo. Ternyata, belum genap sepekan Prabowo memimpin pemerintahan, Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan permufakatan jahat berupa suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus terdakwa Ronald Tannur.

Penangkapan Zarof Ricar sungguh mencengangkan publik. Di kediaman Ricar ditemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kilogram yang nilainya mencapai Rp 996 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

Sungguh absurd. Susah kita membayangkan uang dan emas sebanyak itu disimpan di kediaman pribadi. Pemiliknya pun rupanya kesulitan membelanjakan. Juga ketakutan terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bila disimpan di bank.

Keberadaan harta hampir Rp 1 triliun itu tentu saja tak berdiri sendiri. Jejaknya menyejarah dalam sistem yang mengkultur. Siapa pun bisa terjerat, tak berdaya. Dan, terbukti, Kejaksaan Agung di kemudian hari membongkar korupsi di Pertamina yang nilainya lebih

besar lagi, yang melibatkan "The Gasoline Godfather", Riza Chalid.

Presiden Prabowo tentu saja tahu betul siapa musuh sesungguhnya tatkala pemerintahan yang dipimpinnya memilih ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berazaskan Pancasila. Musuh itu tentu bukan warga negara biasa. Bukan kelas cicak atau kucing, melainkan kelas buaya atau harimau.

Sejarah membuktikan. Presiden Soekarno pernah melawannya melalui kebijakan ekonomi yang nasionalistik, tapi terpental. Indonesia lepas dari mulut harimau (kolonial), masuk ke mulut buaya (Orde Baru). Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut singa (reformasi). Negara dibajak. Kekayaannya dikeruk sedemikian rupa. Bukan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, melainkan untuk kalangan tertentu yang jumlahnya kecil.

Saya yakin Prabowo belajar dari sejarah tersebut. Memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berazaskan Pancasila, merupakan perjuangan besar yang tak mungkin dipimpin oleh pemimpin biasa-biasa saja. Harus dipimpin oleh orang yang tidak takut memaknai jabatannya sebagai perjuangan kepahlawanan, sekaligus memiliki kecerdasan strategi.

### **Kerangka tafsir**

Fakta paradoks itu dengan sendirinya memberi kerangka tafsir, baik bagi pemerintah maupun warga masyarakat. Harus diakui, fakta paradoks itu berpotensi

membangkitkan perlawanan rakyat dalam beragam bentuk.

Dari sudut pemerintah, sebagaimana dijelaskan di atas, fakta paradoks itu merupakan tantangan besar yang membutuhkan perjuangan besar. Musuh datang bukan dari rakyat biasa, melainkan dari kalangan tertentu yang ketamakannya mengeruk kekayaan Indonesia terganggu oleh usaha Prabowo mempromosikan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berazaskan Pancasila.

Namun, kalangan tertentu yang minoritas itu menguasai sumber daya besar, yang berpengaruh besar pula terhadap mayoritas rakyat. Dengan sumber dayanya, kalangan tersebut mampu mengalihkan perlawanannya menjadi perlawanan rakyat. Bertopeng perlawanan rakyat, seolah-olah perlawanan rakyat.

Saya membaca tafsir semacam itu kerap mewarnai pemerintah. Di antaranya terlihat dari pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang menilai aksi Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor.

Tafsir yang sama, saya kira, juga mewarnai pemerintah terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece akhir-akhir ini. Pemerintah mencurigai ada kelompok bersumber daya besar bermain dengan topeng perlawanan rakyat.

Sementara itu, dari sudut warga masyarakat, fakta paradoks Indonesia juga berpotensi membangkitkan perlawanan rakyat, setidaknya kritik keras. Hal ini bisa terjadi tatkala pemerintahan Prabowo dianggap sekadar beretorika, "omon-omon" belaka terkait perjuangan

ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berazaskan Pancasila.

Karena itu, bendera One Piece dihadirkan sebagai ekspresi simbolik yang mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan, solidaritas, dan semangat kebebasan berekspresi. Masyarakat menganggap negara sedang dibajak kalangan tertentu. Indonesia dianggap dalam tawanan kalangan tertentu.

Rakyat kecewa. Prabowo sudah hampir satu tahun berkuasa, tapi belum menunjukkan langkah besar yang nyata, yang terbukti menguntungkan rakyat dan mengakhiri paradoks Indonesia.

Tafsir dari sudut warga masyarakat itu rupanya juga dibaca Presiden Prabowo. Ia rupanya bisa menerima kekecewaan rakyat. Bendera One Piece akhirnya diizinkan berkibar sebagai ekspresi kritis masyarakat, bukan menggantikan Merah Putih.

Saya percaya bahwa pengibaran bendera One Piece pada awal Agustus 2025 itu jauh dari makna pembangkangan, makar, separatisme dan sejenisnya. Namun, juga bukan mustahil bermakna seperti itu tatkala paradoks Indonesia tak segera berakhir. Atau, akan muncul bendera-bendera lain yang terang-terangan menantang bendera Merah Putih.

Presiden Prabowo tak cukup mengizinkan bendera One Piece berkibar sebagai ekspresi kritis warga masyarakat. Yang paling dituntut rakyat adalah perjuangan besarnya, sebagaimana keyakinan yang ditulis pada buku berjudul *Kepemimpinan Militer*:

*Catatan dari Pengalaman (2022):* tak ada perubahan besar tanpa perjuangan besar.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/08/05300031/one-piece-dan-paradoks-indonesia>

## Menguji Prabowo: Indonesia Mau ke Mana?



Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Sumbawa, Kalimantan Timur pada Senin (12/8/2024). (Dok. Sekretariat Presiden )

**P**rabowo Subianto membuat pernyataan menarik saat pidato melalui video pada HUT Ke-3 Partai Buruh. Ia mengklaim akan memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berbasis pada kekeluargaan, ekonomi Pancasila, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal.

"Saudara-saudara sudah mengenal saya bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi, saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," kata Prabowo (*Kompas.com*, 18/09/2024).

Pernyataan Prabowo itu menarik. Mengingat, tak lama lagi, tepatnya 20 Oktober 2024, ia akan dilantik sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo.

Prabowo akan menggenggam kekuasaan yang sangat besar. Bila selama ini gagasan-gagasannya hanya bisa dipidatokan, dengan menduduki jabatan presiden, ia berkesempatan mengeksekusinya. Yang semula hanya bisa diperbincangkan di forum-forum, Prabowo akan berkesempatan membuatnya nyata. Prabowo akan diuji oleh pernyataannya. Publik akan menyaksikan apakah Prabowo bernyali untuk membuktikan pernyataannya.

Saya menemukan artikel lama Prabowo Subianto saat masih menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang berjudul "Indonesia Mau ke Mana?" (*Kompas*, 11 Juli 2008). Saya melihat konsistensi berpikir Prabowo. Klaimnya yang akan memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berasas pada kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal, menjawab pertanyaan pada artikel tersebut.

Di artikel tersebut Prabowo mendalilkan bahwa *laissez-faire* menciptakan sedikit orang kaya, banyak orang miskin. Di negara dengan sistem kapitalisme, orang kaya memang tumbuh, tetapi orang miskin tumbuh jauh lebih cepat. Prabowo menunjuk sejumlah negara sebagai contoh, termasuk Indonesia.

Bahkan, menurut Prabowo, terjadi juga di Amerika Serikat, negeri mapan dengan pendapatan per kapita 50.000 dollar AS (artikel ditulis 2008). Ia merujuk temuan

Paul Krugman, guru besar ekonomi Universitas Princeton dan kolumnis *The New York Times*.

Menurut Krugman, selama tiga dekade kekayaan 0,01 persen orang terkaya AS bertambah 7 kali. Sementara itu, masyarakat lain hampir tak berubah, malah berkurang karena digerogeti inflasi. Tahun 1970-an, eksekutif puncak berpenghasilan 30 kali rata-rata pendapatan pegawainya. Pada dekade awal 2000-an lebih dari 300 kali.

Menurut Prabowo, kecenderungan yang sama terjadi pula di Indonesia. Memerhatikan data UNDP, terlihat koefisien gini Indonesia merambat naik, kata Prabowo, menandakan proses ketimpangan ekonomi sedang terjadi.

Sementara itu, sejumlah negara yang menyingkirkan *laissez-faire* mengalami sukses dalam mengurangi kemiskinan. Lalu, apakah sistem ekonomi pasar salah? Dengan meminjam Patrick J Buchanan, Prabowo berkata, "Tidak. Yang salah kalau kita menyembahnya."

Prabowo menyetujui Buchanan, bahwa sistem apa pun harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Itulah yang dilakukan Bapak Pendiri Amerika (George Washington, Hamilton, dan Madison), yang menyebabkan negeri itu besar, tapi kini dirusak oleh perdagangan bebas.

Lalu, Indonesia mau ke mana? Pertanyaan yang mengakhiri artikel Prabowo tersebut kini (tak lama lagi) harus dijawab sendiri oleh Prabowo dalam bentuk kebijakan nyata, bukan retorika. Masihkan Prabowo

konsisten dengan gagasan dan retorikanya saat memegang kekuasaan besar sebagai presiden?

Rakyat Indonesia bukan hanya menunggu dan menjadi saksi. Tentu saja berharap Prabowo konsisten dengan gagasan dan retorikanya yang hendak memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berasas pada kekeluargaan, dan bukan ekonomi kapitalisme neoliberal.

Prabowo sebagai presiden akan menghadapi tantangan nyata, misalnya, soal korupsi yang sudah menyandera negara. Bukan hanya jumlah uangnya, juga bukan hanya orang yang terlibat, melainkan kandungan masalahnya.

Korupsi di negeri ini sudah bukan jenis korupsi biasa. Korupsi di negeri ini sudah berkembang sedemikian rupa yang sangat membahayakan masa depan negeri, karena sasarannya adalah produk politik. Itulah jenis korupsi yang menjadi bagian dari bahaya "korporatokrasi".

Korporatokrasi adalah kenyataan. Ia terbentuk melalui relasi kekuatan korporasi besar (nasional maupun multinasional), lembaga keuangan (nasional maupun global) dan pemerintahan untuk menyatukan kekuatan finansial dan politik guna memaksa masyarakat mengikuti kehendak mereka. Pada umumnya di wilayah-wilayah basah, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, perdagangan, perbankan, dan sebagainya.

Bibit korporatokrasi itu bisa dilacak sejak zaman kolonial. Lalu, tumbuh subur pada zaman Orde Baru (Orba).

Dilihat dari sudut ekspansi kapitalisme dunia, sebenarnya rezim Orba dan Reformasi berada dalam satu perahu. Keduanya lahir di tengah-tengah krisis ekonomi yang parah, lalu melakukan rehabilitasi ekonomi dengan dana pinjaman luar negeri berdasarkan resep-resep lembaga keuangan dunia. Kedua rezim menjalankan kebijakan ekonomi pintu terbuka.

Kalau kebijakan pintu terbuka rezim Orba dimaksudkan untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam kerangka kerja "dunia melawan komunisme", kebijakan pintu terbuka rezim Reformasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam kerangka kerja "dunia pasca-Perang Dingin".

Kedua dunia sama-sama dikendalikan oleh negeri kapitalis eks kolonialis yang dipimpin Amerika Serikat. Maka, kedua rezim sesungguhnya juga menjadi subordinat kapitalis dunia.

Secara teoritis, pemerintah yang mendapatkan kekuasaan langsung dari rakyat seharusnya jauh lebih kuat dari korporasi. Namun, pemerintah dalam arti luas sekarang ini justru tunduk kepada kepentingan korporasi.

Kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sukarela merunduk hormat, bahkan cenderung takut pada kemauan korporasi. Mereka dapat dengan mudah tertawan oleh korporasi akibat pragmatisme yang sangat kental dalam perpolitikan Indonesia.

Korporatokrasi jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Korporatokrasi bukan hanya mengeruk kekayaan alam yang cenderung menyisihkan rakyat, tapi juga rentan terhadap kejahatan yang bukan lagi korupsi biasa, melainkan korupsi dengan menyandera negara (*state-hijacked corruption*).

Korupsi itu mengejawantah dalam bentuk pembelian dekrit politik, peraturan perundang-undangan, dan kontrak karya oleh kaum kapitalis (korporasi) di bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, perbankan, perdagangan dan bidang-bidang basah lain demi keuntungan mereka belaka.

Korupsi jenis ini melibatkan pemerintah dalam arti luas, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bahkan sampai batas tertentu didukung sebagian media massa dan kaum cerdas-pandai. Korupsi skala giga yang tak tampak sebagai korupsi.

*Laissez-faire*, yang dikritik Prabowo melahirkan banyak orang miskin, sedikit orang kaya, kini telah beranak-cucu. Melawannya demi kemakmuran rakyat dan keadilan sosial tentu saja butuh pemimpin yang tidak takut memaknai jabatannya sebagai perjuangan kepahlawanan.

Apakah Prabowo bernyali mengambil jalan ini? Sejarahlah yang tahu pasti.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/08310721/menguji-prabowo-indonesia-mau-ke-mana>

## Paham “Ngedan”: Penghalang Ideologis Prabowo



Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melambaikan tangan setibanya di kediaman Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024). Prabowo Subianto belum menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar

Pranowo-Mahfud MD. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/wpa.

(ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

**D**ulu, kurang lebih tahun 1860, pujangga besar sastra Jawa, Ranggawarsita, di Serat Kalatidha melukiskan “zaman edan”. Masyarakat Jawa mengenali pula dengan sebutan “zaman gemplung”.

Masyarakat (negara) mengalami kemerosotan tata nilai. Banyak orang meninggalkan norma-norma kehidupan yang dimuliakan. Orang di jalan benar kebingungan, orang di jalan salah bersenang-senang.

Orang yang baik terlunta-lunta, orang yang salah naik pangkat.

Tak ada lagi tauladan dari para pemimpin. Mereka suka ingkar janji. Kaum cerdik pandai pun terbawa arus. Mereka kehilangan keyakinan dan kewaspadaan. Mudah tergiur oleh janji-janji muluk.

Manusia sibuk menumpuk kekayaan material. Tak peduli bahwa cara yang dilakukan itu merampas hak hidup orang lain dan merugikan banyak orang.

Kekayaan material dipuja-puja mengalahkan keluhuran budi. Orang dihormati dan diikuti karena kepemilikannya, bukan perilakunya.

Di “zaman edan”, kata Ranggawarsita, seseorang tak akan mendapatkan bagian bila tak “*ngedan*”, ikut-ikutan gila. “*Ngedan*” lalu menjadi paham (mazhab), bersifat ideologis.

Serupa dengan “zaman edan” di Serat Kalatidha, pada periode sejarah yang hampir sama Prabu Jayabaya juga mengemukakan prediksi yang disebut “zaman kalabendhu”, zaman gonjang-ganjing, carut-marut, penuh keangkaramurkaan. Di masyarakat Jawa karya prediktif Prabu Jayabaya populer disebut “ramalan Jayabaya”.

Prabu Jayabaya di antaranya mengatakan, “*Wong tani ditaleni* (petani dibelenggu), *wong dora padha ura-ura* (pembobong saling bersukaria). *Ratu ora nepati janji* (ratu/raja ingkar janji), *musna kuwasa lan prabawane* (kehilangan kekuasaan dan kewibawaan)”.

Menurut prediksi Jayabaya, “zaman kalabendhu” akan dihentikan oleh Satria Piningit. Dikenal pula

dengan sebutan Ratu Adil. Satria Piningit atau Ratu Adil lah pembawa kebijakan dan keadilan masa depan. Dia lah pemimpin yang kepemimpinannya membuahkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sejumlah pemberontakan petani pada akhir abad ke-19 dipelopori oleh tokoh-tokoh lokal yang mengaku Ratu Adil. Mahaguru sejarah, Sartono Kartodirdjo, menuliskannya dengan gamblang pada buku berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888*.

Di *Indonesia Menggugat*, yang dipidatokan sebagai pembelaan di pengadilan pemerintah kolonial Belanda pada 1930, Soekarno menerjemahkan Ratu Adil secara semiotik. Ratu Adil dibaca Soekarno sebagai bentuk idaman masyarakat jajahan yang hidup sengsara. Masyarakat jajahan mengidam-idamkan sistem kekuasaan (pemerintahan) yang membuahkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Maka, pada pidato 1 Juni 1945 saat sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), Soekarno menawarkan sistem kekuasaan berdasarkan Pancasila untuk Indonesia merdeka. Sistem kekuasaan berdasarkan Pancasila itulah yang kelak mengantarkan rakyat Indonesia memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan.

### **Kenyataan ironis**

Namun, ironis sekali, paham "*ngedan*" malah menggejala pada kepemimpinan Indonesia saat Pancasila secara formal telah ditetapkan sebagai dasar negara.

Bahkan, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sekaligus libur nasional. Paham "*ngedan*" kini malah menjadi tandingan ideologis Pancasila.

Ironis sekali, juga karena "zaman reformasi" pada hakekatnya lahir sebagai antitesis "zaman edan". Pemerintahan Orde Baru dinilai sebagai pengikut paham "*ngedan*".

Maka, berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan sendirinya membangkitkan harapan kepemimpinan dalam pemerintahan yang mewarisi sifat adil Ratu Adil. Pemimpin bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, sejarah memperlihatkan hal lain. Pemimpin rupanya belum mewarisi sifat adil Ratu Adil yang diidam-idamkan rakyat. Pemimpin malahan melanggengkan pandangan kolonial yang melihat Indonesia sebagai ladang subur untuk memperkaya diri.

Pemimpin makin mengukuhkan paham "*ngedan*", menjauhi Pancasila, makin asyik dengan dirinya sendiri, keluarga dan kroninya. Pemimpin kehilangan kepemimpinan yang diidam-idamkan rakyat, kepemimpinan yang menyejahterakan rakyat secara berkeadilan.

Representasi perwujudan paham "*ngedan*" itu sangat tampak bila kita merenungkan peristiwa yang kebetulan lagi menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yakni kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementerian Pertanian.

Siapa tidak mengenal SYL? Ia bukan politikus sembarangan. Telah malang-melintang sebagai kader partai politik (parpol). Sebelum diangkat sebagai

Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi, SYL pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (2008 – 2018).

Kasus SYL ternyata bukan hanya menyeret keluarga sendiri (istri, anak, cucu). Kasus SYL juga menyeret pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui persidangan diketahui ke mana saja uang hasil korupsi itu mengalir. Diduga SYL menggunakan uang hasil korupsi bukan hanya untuk keperluan pribadi, tapi juga istri, anak, bahkan cucunya.

Yang dibiayai pun tergolong “aneh-aneh”. Misalnya, biayaacamata SYL dan istri, khitanan cucu, *skincare* anak dan cucu, biaya dokter kecantikan dan renovasi rumah anak, tagihan kartu kredit, uang bulanan istri, perawatan apartemen pribadi, pembelian mobil untuk anak (*Kompas.com*, 02/05/2024).

Kasus SYL menyeret pula Firli Bahuri. Ia diberhentikan sebagai Ketua KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL.

Aneh, tapi nyata. Pejabat KPK malah menjalani perilaku menyimpang yang seharusnya ditertibkan oleh KPK. Apa namanya kalau bukan menjalani paham “*ngedan*”?

Yang juga mencengangkan publik, BPK kembali menjadi sorotan. Hermanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementerian Pertanian mengungkap adanya setoran untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menyebutkan bahwa oknum auditor BPK meminta uang Rp. 12 miliar. Tetapi, hanya diberi Rp. 5 miliar. Permintaan uang itu terkait status WTP yang terganjal oleh program lumbung pangan nasional, "food estate" (*Kompas.com*, 10/05/2024).

Sebelumnya, pejabat BPK juga tersangkut dugaan korupsi. Sebut saja, Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, yang didakwa menerima uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 40 miliar.

Uang itu disebut untuk mengondisikan temuan BPK dalam proyek penyediaan infrastruktur "base transceiver station" (BTS) 4G yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Kompas.com*, 10/05/2024).

Status WTP ternyata bisa diperjualbelikan. Temuan BPK bisa dikondisikan, disulap. Bukankah persekongkolan jahat itu perwujudan paham "*ngedan*"?

Kasus SYL lalu menambah panjang deret korupsi kelas menteri. Pada pemerintahan Presiden Jokowi di antaranya: Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial), Idrus Marham (mantan Menteri Sosial), Imam Nahrawi (mantan Menpora), Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Johnny Gerard Plate (mantan Menkominfo).

Mereka tentu saja bukan sembarang tokoh. Mereka adalah kader-kader parpol yang dipercaya oleh parpolnya dan presiden untuk memimpin pemerintahan.

Mereka juga bukan orang yang tanpa bekal pendidikan cukup, wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai dasar negara. Kosakata wawasan kebangsaan

dan Pancasila niscaya menjadi bahan pidato mereka dalam berbagai kesempatan. Semestinya menjadi rujukan pula untuk kebijakan dan sumber moral politik bagi kepemimpinannya.

Sebuah kenyataan ironis. Di negara yang berdasarkan Pancasila, di zaman reformasi yang mengoreksi total Orde Baru, paham "ngedan" tumbuh subur sebagai ideologi dan diamini para pemimpin.

Kata Jayabaya, "Ratu ora nepati janji." Praktik ideologisnya akan sangat berbahaya, karena mereka akan membangun jejaring yang menyandera negara untuk mengeruk kekayaan Indonesia demi kesejahteraan dan kemewahan sendiri.

## **Penghalang ideologis**

Saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sempat beredar imajinasi melalui media sosial yang mengaitkan Prabowo dengan Ratu Adil. Beredar foto pecahan uang Rp 20.000 dengan stempel nama Prabowo dicap sebagai "Satria Piningit Heru Cakra Ratu Adil" (*Kompas.com*, 18/11/2023).

Foto-foto uang pecahan berstempel Satria Piningit juga pernah beredar menjelang Pilpres 2014 dan 2019. Memang fenomena kecil, tak berarti, terkesan anakronisme pula. Namun, tak ada yang salah pula mengimajinasikan Ratu Adil melalui perhelatan pilpres. Patut dibaca secara semiotik seperti Soekarno membaca Ratu Adil pada zamannya.

Kini, Prabowo yang diimajinasikan sebagai Ratu Adil telah memenangi Pilpres 2024 dan dinyatakan sebagai

presiden terpilih. Tak lama lagi ia akan membentuk pemerintahan dan memimpin rakyat Indonesia. Akankah mewarisi sifat adil Ratu Adil? Tak ingkar janji?

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering menyatakan akan menyelamatkan kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Ia meyakini kekayaan Indonesia sangat besar dan bisa menyejahterakan rakyat.

Di buku *Paradoks Indonesia dan Solusinya* (PT Media Pandu Bangsa, 2021) Prabowo menguraikan betapa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun, kata Prabowo, kekayaan itu banyak yang mengalir ke luar negeri.

Dulu kekayaan itu hanya dinikmati penjajah, dan sekarang hanya dinikmati segelintir orang saja. Prabowo yakin kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri bisa dihentikan untuk dinikmati rakyat Indonesia pada umumnya.

Pada musim kampanye Pilpres 2024, Prabowo juga menyampaikan tekad dan keyakinannya. Misalnya, saat menghadiri Konsolidasi Tokoh Agama-Masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu, 2 Desember 2023, Prabowo mengatakan:

"Dari sejak dulu, saya selalu mengatakan bahwa kita telah menghitung kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Masalahnya adalah bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat Indonesia," ujarnya (*Kompas.com*, 02/12/2023).

Saya pun, dan banyak kalangan, mengamini pandangan dan keyakinan Prabowo itu. Para pendiri

bangsa pun sama. Mereka memilih berjuang membangun bangsa dan mendirikan negara sendiri berdasarkan Pancasila, karena ingin kekayaan Indonesia yang besar itu dirasakan rakyat Indonesia. Kekayaan itu haruslah sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, mengamankan kekayaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah tuntutan (tugas) sejarah. Hal itu harus secara sadar diterima dan dilakoni oleh siapa pun pemimpin Indonesia.

Di level mana pun pemimpin, baik nasional/pusat maupun daerah, dan dari parpol apa pun. Dipilih melalui sistem elektoral atau melalui mekanisme seleksi yang lain. Apalagi level presiden, yang dipilih rakyat secara langsung.

Pemimpin Indonesia memikul amanat dari sejarah penjajahan, sejarah penderitaan rakyat. Secara tekstual sudah sangat jelas kata-katanya, tertuang pada Pembukaan UUD 1945 yang hampir setiap upacara bendera dibaca setelah pembacaan teks Pancasila.

Pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bukan untuk memenuhi ritual formal upacara kenegaraan, melainkan agar selalu diingat dan dijalankan oleh para pemimpin negara. Amanat itu wajib diingat-ingatkan terus.

Namun, masalahnya selalu berulang. Kata Prabu Jayabaya, "*Ratu ora nepati janji.*" Menurut Ranggawarsita, "*mélu édan nora tahan, yén tan milu anglakoni, boya kaduman mélik, kaliren wekasanipun*"

(ikut gila tidak tahan, tapi bila tidak ikut menjalani, tidak mendapatkan bagian, lalu kelaparan).

Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tak bisa mengelak dari kenyataan ironis tersebut. Paham "*ngedan*" boleh jadi akan menjadi arus besar ideologis yang menghadang dan menghalangi tekadnya saat memimpin pemerintahan. Paham "*ngedan*" bisa menjadi penghalang ideologis Prabowo.

Pengikut paham "*ngedan*" bisa dari golongannya sendiri, bisa pula dari luar golongannya. Prabowo pun mengakuinya.

Saat berbicara pada acara bimtek dan rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Prabowo mengakui bahwa di semua parpol pasti ada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Pun di Partai Gerindra yang dipimpinnya (*Kompas.com*, 09/05/2024).

Maka, hanya ada dua jalan: mengamini atau menyingkirkan penghalang ideologis itu. Dalam bahasa Ranggawarsita, "*mélu édan*" (ikut-ikutan gila) atau "*éling lawan waspada*" (ingat dan waspada).

Di buku *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman* (PT Media Pandu Bangsa, 2022) Prabowo mengatakan, "Saya percaya tak ada perubahan besar yang terjadi tanpa didorong oleh perjuangan yang gigih, perjuangan yang besar."

Perkataan tersebut ditampilkan sebagai "*quote*" pada sampul dalam buku. Jelas perkataan itu penuh makna dan penting bagi Prabowo.

Menyingkirkan paham "*ngedan*" tentu saja membutuhkan perjuangan yang gigih, perjuangan yang besar. Dampak positifnya pun besar bagi Indonesia ke depan.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/07234211/paham-ngedan-penghalang-ideologis-prabowo>

## Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"



Ilustrasi koruptor. (*Kompas.com*)

**M**enteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot (*Kompas.com*, 03/05/2024).

Luhut tak menjelaskan lebih jauh orang-orang "toxic" yang dimaksudkan. Secara populer, istilah *toxic* merujuk pada orang yang "beracun", yang memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Biasanya dikaitkan

dengan sifat egois. Tak mau tahu sekitarnya, yang penting dirinya sendiri, maunya dan menangnya sendiri.

Namun, melihat konteks pesan tersebut yang juga diikuti paparan Luhut tentang sistem digital untuk menekan angka korupsi (*Kompas.com*, 03/05/2024), saya menafsirkan, orang-orang "toxic" yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak suka pemerintah membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya menilai pesan Luhut itu sangat positif untuk Indonesia ke depan. Namun, sungguh tantangan besar buat Prabowo.

### **Politik toxic**

Dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik dibaca dan dipelajari. Ada enam menteri terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Idrus Marham (sewaktu menjabat Menteri Sosial), Imam Nahrawi (sewaktu menjabat Menpora), Edhy Prabowo (sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Juliari Batubara (sewaktu menjabat Menteri Sosial). Dua lagi adalah Johnny G. Plate (sewaktu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Syahrul Yasin Limpo (sewaktu menjabat Menteri Pertanian).

Semua ternyata merupakan kader partai politik (parpol). Tentu saja parpol pendukung pemerintah. Parpol oposisi tak mungkin diberi jatah menteri, sehingga kecil dari kesempatan korupsi. Masalahnya, ada apa dengan parpol dan pemerintahan kita?

Era reformasi sesungguhnya membuka harapan tentang hadirnya pemerintahan demokratis yang bersih

dan bebas dari korupsi. Namun, ternyata ruang politik itu sia-sia.

Sistem dan kelembagaan politik memang berubah. Tapi, perubahannya tak substantif. Sistem dan kelembagaan politik kian rumit, tapi tak ada kemajuan substantif. Produknya ternyata tak mengubah “politik *toxic*” tinggalan penguasa Orde Baru (Orba).

Saya sengaja (terinspirasi) menggunakan istilah *toxic* pula – sebut “politik *toxic*” – untuk menyebut politik “beracun” yang menggerogoti kemampuan sistem dan lembaga politik untuk menghasilkan pemerintahan demokratis yang bersih dan bebas dari korupsi.

Politik jenis itulah yang menggerogoti Orba. Celaka sekali, malah kita pelihara terus, sehingga membuat reformasi terkesan jalan di tempat, “involusi” (istilah Geertz). Pemerintahan bukan bersih dari korupsi, malahan kian menggila, baik nilai maupun caranya.

Pemerintahan Orba selama tiga dasawarsa memang tidak memberi ruang buat parpol supaya berfungsi optimal. Parpol diintervensi, dibatasi gerakannya, dijauhkan dari fungsi yang semestinya dalam negara demokrasi.

Implikasinya sangat serius. Kaderisasi kepemimpinan politik tidak terurus. Parpol tidak merasa butuh kader pemimpin politik yang benar-benar memahami fungsinya dalam negara demokrasi. Orba tidak menghendaki, karena kepemimpinan politik disiapkan dari jalur lain.

Politik lalu raib hakekat, menjauh dari substansinya. Politik berlangsung tanpa nilai, menjauh dari akal sehat

dan hati nurani yang seharusnya mendasari dan menyemangatnya.

Pemilu pun sekadar ritual mencoblos gambar tanpa makna. Pemilu telah didesain sekadar ritual untuk melanggengkan kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela.

Praktik “politik *toxic*” itulah yang menggerogoti Orba. Sejarah lalu mencatat pemerintah Orba runtuh lantaran korupsi, kolusi, dan nepotisme dibiarkan merajalela.

Reformasi boleh dikatakan memberi ruang yang sangat cukup untuk mengoreksi total praktik “politik *toxic*”. Parpol mendapatkan kepercayaan besar untuk menyiapkan pemimpin politik, bukan pejabat politik.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, para pendiri bangsa Indonesia memilih demokrasi agar kekuasaan dapat diwajibkan terbuka dan bertanggung jawab. Agar kekuasaan sebesar-besarnya diselenggarakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut parpol adalah sokoguru, pilar utama. Lewat parpol lah rakyat berhimpun secara politik. Lewat parpol pula rakyat memberikan suara dalam pemilu untuk memilih pemimpinnya.

Lewat kader-kader parpol di legislatif pula rakyat mewakilkan aspirasi. Melalui kader-kader parpol di pemerintahan pula kebijakan publik dibuat dan diputuskan.

Karena itu, kita sangat prihatin terhadap kinerja sistem dan lembaga politik reformasi yang ternyata

mengulang praktik “politik *toxic*” yang hanya melahirkan pejabat politik, bukan pemimpin politik.

Kekuasaan bukan didayagunakan untuk menjejahterakan rakyat. Kekuasaan dinikmati sendiri, keluarga dan kroninya.

Seorang kader parpol ditunjuk sebagai menteri tentu saja bukan sembarang kader. Ia merupakan kader pilihan di antara kader-kader lain.

Sudah sedemikian parahkah “politik *toxic*” menggerogoti sistem dan kelembagaan politik kita hari ini, sehingga keteladanan para pendiri bangsa terkesan tak berjejak sama sekali?

Para pendiri bangsa jelas bukan golongan rakyat biasa. Mereka memiliki akses untuk menikmati kelezatan zaman kolonial yang diberikan oleh pemerintah negara kolonial.

Namun, akses itu bukan untuk kenikmatan sendiri, keluarga dan golongannya, melainkan untuk memerdekakan orang-orang yang terpinggirkan, terkalahkan, dan teraniaya oleh sistem negara kolonial. Mereka memilih dikutuk pemerintah kolonial daripada dikutuk rakyat.

Begitulah pemimpin politik. Ia bekerja dengan natur kepemimpinannya. Dalam konteks Indonesia, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

## **Tantangan dilematis**

Pesan Luhut sangat positif. Namun, tantangan dilematis buat Prabowo. Pemerintahan Prabowo,

meskipun dipilih 58,59 persen pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tak mungkin meninggalkan parpol pengusung. Faktanya, Prabowo dicalonkan oleh gabungan parpol.

Bahkan, gabungan parpol pengusung itu dianggap belum cukup untuk membentuk pemerintahan yang diinginkan. Prabowo masih merasa butuh merangkul parpol yang semula menjadi kompetitornya pada Pilpres 2024.

Cara Jokowi rupanya menginspirasi Prabowo. Tak ada yang salah sebagai strategi untuk memperoleh dukungan mayoritas dari Senayan. Karena itu, pemerintahan Prabowo diprediksi bakal mirip pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Prabowo mengajak hampir semua parpol. Masalahnya, adakah sistem yang memastikan bahwa kader-kader parpol yang diajukan nanti bukan orang-orang *"toxic"*?

Sebagai presiden terpilih, Prabowo punya kewenangan memilih orang-orang yang kelak mengisi kabinetnya. Tentu saja termasuk yang diajukan parpol. Namun, seberapa hebat *"deteksi"* Prabowo untuk mengamankan pemerintahannya dari orang-orang *"toxic"*? Di sinilah tantangan dilematisnya.

Pada satu sisi pemerintahan Prabowo sangat butuh dukungan politik, terutama dari parpol. Namun, pada sisi lain, sistem dan kelembagaan politik masih memberikan tempat bagi orang-orang *"toxic"*.

Mereka berkelindan di parpol dan lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan, berkelindan pula di lembaga lain yang

urusannya dengan parpol dan lembaga-lembaga negara.

Suatu ironi, era reformasi justru ditandai menguatkan korupsi. Yang dicuri dan diselewengkan bukan lagi recehan, skala kecil-kecilan. Yang dikorupsi sudah skala "giga".

Caranya pun super canggih. Tak lagi dilakukan dengan cara konvensional yang mudah ditemukan oleh penegak hukum.

Korupsi super canggih dewasa ini dilakukan dengan persekongkolan untuk menyandera lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di kalangan ilmuwan sosial disebut *state-hijacked corruption*.

Korupsi super canggih itu mengejawantah dalam bentuk pembelian dekrit politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan kontrak karya oleh korporasi besar. Bidangnya pun berkategori "basah", seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perbankan, perdagangan dan bidang-bidang lain.

Singkat kata, negara diperalat demi kepentingan mereka tanpa bisa disebut dan dibuktikan sebagai korupsi.

Orang "toxic" bisa jadi bertampang loyalis kepada negara, tapi sejatinya memeralatnya untuk kepentingan sendiri, keluarga dan kroninya. Tanpa peduli nasib orang lain, nasib rakyat Indonesia ke depan. Yang penting mau dan menangnya sendiri.

Prabowo tak bisa cuek dengan tantangan dilematis tersebut. Tak ada pilihan tanpa resiko. Siapapun

presiden terpilih akan berhadapan dengan tantangan dilematis itu.

Di Serat Kalatidha, pujangga besar sastra Jawa, Ronggowarsito, mengingatkan: "*begja-begjaning kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada*" (betapapun beruntung orang yang lupa, masih beruntung yang masih sadar dan waspada).

Begitulah "zaman edan", tatkala manusia sibuk menumpuk kekayaan material, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Kekayaan material dipuja-puja mengalahkan keluhuran budi. Bila tak "*ngedan*", seseorang tak akan mendapatkan bagian.

Ujian buat Prabowo, memilih "*eling lawan waspada*" (sadar dan waspada) atau "*ngedan*" (ikut-ikutan gila). Apakah Prabowo akan menempuh perjuangan besar untuk perubahan besar Indonesia?

"Perubahan besar membutuhkan perjuangan besar," demikian Prabowo menorehkan keyakinan itu pada buku berjudul *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman* (PT Media Pandu Bangsa, 2022).

Rakyat menunggu perjuangan besarnya.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/06/09373901/dilema-prabowo-membawa-orang-toxic>

## Noel, Mentalitas Korup, dan Indonesia Sold Out



Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat dihadirkan sebagai tersangka usai terjaring OTT KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasa pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. (ANTARA FOTO / BAYU PRATAMA S)

**S**iapa tidak kenal Immanuel Ebenezer Gerungan? Pria kelahiran Riau yang populer dengan sapaan Noel adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Kabinet Merah-Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Noel dikenal sebagai aktivis 98 yang mengklaim punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Suaranya menggelegar, tegas, berwibawa. Ucapannya penuh dengan kata-kata yang mengekspresikan idealisme.

"Kami tidak mau pemerintahan awal Prabowo dirusak oleh brutus, para klepto. Dalam pidato Pak Prabowo disampaikan, jangan kirim orang yang mau *nyopet* anggaran APBN dan APBD. Pidato itu cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen dengan demokrasi dan pemberantasan korupsi," kata Noel sesuai dipanggil Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2024 menjelang pelantikan presiden (*Kompas.id*, 21/08/2025).

Ucapan yang penuh idealism itu dibatalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). KPK menyita berbagai mobil dan motor mewah.

Noel adalah pejabat kelas menteri pertama pada pemerintahan Presiden Prabowo yang tersangkut korupsi. Noel menambah panjang deret pejabat kelas menteri sejak era reformasi yang meringkuk di penjara akibat korupsi. Belum pejabat lain di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Siapa akan menyusul? Apakah kita yakin bahwa tak akan ada lagi pejabat kelas menteri pada pemerintahan Prabowo yang tersangkut korupsi, kendati sang presiden selalu bicara keras tentang korupsi?

## **Mentalitas**

Dulu saya mengira bahwa korupsi hanya dilakukan oleh kalangan tak berpunya. Tak berpunya secara ekonomi, pun tak berpunya secara kekuasaan. Bila pendapatan naik, kesejahteraan meningkat, korupsi hilang dengan sendirinya. Ternyata, hal itu ilusi belaka.

Ternyata, ada gaya korupsi kelas kakap, korupsi kaum atasan. Mereka golongan berpunya secara ekonomi, sekaligus berpunya secara kekuasaan. Yang terakhir, berpunya secara kekuasaan, justru kategori yang melipatgandakan nilai yang dikorupsi, pola/modus, dan komplotannya.

Di tangan mereka, korupsi dilakukan dengan menggunakan ilmu. Bukan sekadar ilmu memanfaatkan celah di dalam sistem, melainkan ilmu menyusun celah di dalam sistem.

Untuk kasus Noel, ternyata, pengurusan sertifikat K3 memberikan ruang bagi pemegang kekuasaan untuk “mengambil keuntungan” berlipat-lipat yang dilarang oleh peraturan dan berakibat pidana korupsi. Nilainya tentu sangat besar dilihat dari barang bukti yang disita KPK.

Saya lalu teringat teori budaya kemiskinan yang ditemukan Oscar Lewis. Kemiskinan ternyata bukan soal struktural belaka. Bukan urusan sistem distribusi kue pembangunan saja.

Menurut Lewis, kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Kemiskinan ternyata bisa membentuk nilai-nilai, etos, dan mentalitas tertentu yang membuat

kaum miskin sulit keluar dari kubangan kemiskinan. Nilai-nilai, etos, dan mentalitas produk kemiskinan itu sebut saja "mentalitas miskin". Perubahan sistem distribusi kue pembangunan tidak dengan sendirinya mengubah mentalitas miskin itu.

Saya melihat, realitas korupsi di negeri menyerupai kemiskinan dan membentuk "mentalitas korup". Perubahan dari pemerintahan Soeharto ke pemerintahan reformasi terbukti tak membuat kita keluar dari kubangan korupsi. Meski disediakan lembaga dan perangkat hukum untuk memberantas korupsi.

Bourdieu menyebutnya habitus. Ia bukan sekadar kebiasaan atau kecenderungan, melainkan sistem disposisi yang tertanam di dalam diri individu. Siapapun bisa terjangkau. Tinggal ada kesempatan atau tidak. Tak mudah melawannya, karena mentalitas korup yang menjadi habitus akan membuat seseorang kehilangan kepekaan dan daya tolak, alias kebal. Bahasa awamnya, "mendarah daging".

Mereka tahu tindakannya melanggar hukum, korup, dan merugikan negara dalam jumlah yang tidak kecil, tapi tak cukup berdaya untuk menghindarinya. Bahkan, secara sadar dijalaninya. Muncullah pola atau modus secara berulang.

Saya melihat, mentalitas korup itu terkesan diamini di zaman komodifikasi yang digerakkan kapitalisme pasar. Di zaman pasar, nyaris tak ada hal yang tak bisa diujakan, dikapitalisasi. Tentu saja demi keuntungan material. Sebagaimana hukum pasar, bukan sekadar

keuntungan, tapi keuntungan yang berlipat-lipat. Tak peduli urusan sakral, sosial, dan kemanusiaan.

Apa yang bisa menjelaskan korupsi di urusan haji, bantuan sosial, covid-19, dan sejenisnya kalau bukan mentalitas korup? Ternyata, ucapan Noel yang penuh idealisme tak mampu menyelamatkannya. Habitus itu membuat jurang antara ucapan dan tindakan, memproduksi perilaku hipokrit.

Noel seharusnya mendekonstruksi sistem pengurusan sertifikat K3 yang korup, tapi malah terjerembab di dalamnya. Air matanya yang meleleh saat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol bukan lagi ekspresi kesedihan, melainkan olok-olok terhadap diri sendiri.

Kita sudah melampaui vampir. Bila vampir menghisap darah orang lain untuk bertahan hidup, kita menghisap darah untuk kemewahan.

### **“Indonesia Sold Out”**

Yang menarik, meski kebetulan saja, pada hari itu juga sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) membentangkan spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” di depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI (*Kompas.com*, 21/08/2025).

Bertambahlah kosakata yang menjadi antitesis “Indonesia Emas”. Sebelumnya ada “Indonesia Gelap” dan “Indonesia Cemas”, kini bertambah “Indonesia Sold Out”. Tak sulit membaca nalarnya. Kaum muda membaca bahwa negeri ini telah habis terjual. Harta kekayaannya dikeruk dan digadaikan kepada rentenir.

Kaum muda itu melihat Ibu Pertiwi bersedih hati. Ternyata, putra-putrinya tak setia menjaga harta pusaka. Mereka lah yang akan menanggung akibatnya. Karena itu, sangat logis bila mereka berteriak keras.

Nalarnya sama dengan Prabowo saat presiden kita itu menulis buku berjudul *Paradoks Indonesia dan Solusinya*. Negeri yang kaya raya, tapi sebagian besar rakyatnya miskin. Penyebabnya adalah "serakahnomics".

Mentalitas korup dan serakahnomics bagaikan dua sisi pada mata uang yang sama. Saling melengkapi, saling mengondisikan. Keduanya menjelma sebagai habitus. Membutakan mata hati dan menumpulkan ketajaman akal sehat. Kita lalu tak mampu merasakan dan mencerna secara kritis bahwa tata kelola negeri ini sungguh bobrok, yang kebobrokannya mengancam eksistensi Indonesia. Inilah sesungguhnya musuh utama bangsa Indonesia.

Siapa yang akan kebal di kubangan semacam itu? Barangkali hanya "kegilaan" dalam bentuk lain. Tesis hanya bisa dilawan dengan antitesis yang setara. Bila mentalitas korup dan serakahnomics dianggap kegilaan, maka hanya bisa ditandingi oleh kegilaan yang lain.

Sejarah membuktikan. Indonesia pun lahir dari kegilaan lain pada zamannya. Perubahan besar di dunia ini selalu muncul dari kegilaan lain. Kini, sejarah Indonesia menuntut kegilaan lain.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/23/10313271/noel-mentalitas-korup-dan-indonesia-sold-out>

## Nadiem Terjerembap



Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022, Kamis (4/9/2025)(PUSPENKUM KEJAGUNG)

Saat Nadiem Makarim diamanahi Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), saya menulis esai dengan judul "Nadiem, Sabarlah..." (*Jawa Pos, Radar Banyuwangi*, 28 Oktober 2019). Saat itu di media banyak komentar nyinyir terhadap pengangkatan Nadiem.

Maklum, usia Nadiem saat itu baru 35 tahun. Dipandang terlalu muda untuk memangku jabatan tersebut. Meski namanya sudah sangat terkenal sebagai bos GoJek, Nadiem tak punya pengalaman mengelola dunia pendidikan.

Namun, saya berusaha membaca sisi kekuatan Nadiem. Saat itu saya teringat diskusi dengan Pak Tua yang duduk sebangku di Probowangi, kereta api lokal Jember – Banyuwangi yang menjadi langganan saya.

Pak Tua membantah nyinyiran sebagian publik. Kata Pak Tua, “Nadiem itu usianya kan sudah 35 tahun. Sudah cukup siap untuk mengurus pendidikan.”

Saya mengerutkan dahi. Bukankah menteri lain usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Apalagi Nadiem akan mengurus soal pendidikan. Bukan hanya mencetak orang pintar dan terampil, tapi juga berkarakter.

Pak Tua tetap bersemangat meyakinkan saya. “Bayangkan, Mas,” lanjut Pak Tua, “Dibanding anak-anak muda yang merumuskan Sumpah Pemuda, yang amat sangat hebat itu, mereka rata-rata baru belasan dan dua puluhan tahun.” Agak aneh komparasinya. Tapi, menarik sekali.

Sumpah Pemuda adalah ide, jiwa, tekad, dan tindakan untuk masa depan. Karya dan milik anak-anak muda. Karena itu, anak-anak mudalah yang paling punya hak bicara. Merekalah pemilik masa depan.

Lalu, apa hak saya waktu itu meragukan Nadiem? Karena usia? Karena Nadiem bukan orang yang sehari-hari menggeluti pendidikan? Bukankah jabatan menteri di Kemendikbud selama ini selalu diisi orang-orang perguruan tinggi yang usianya bisa dibilang tua?

Salahkah bila ada mimpi lain? Misal, agarantisipasi dunia pendidikan lebih cepat lagi terhadap dunia baru, yang diprediksi penuh disrupsi. Saat itu, terkait dunia baru itu, kita baru tahap bingung. Baru belajar

mengenali dunia yang diperkirakan penuh disrupsi, penuh perubahan mendasar.

Itu pun baru sebagian kecil. Selebihnya tenang-tenang saja, belum menyadarinya. Meski sehari-hari ke kantor naik GoJek. Meski suka belanja di Tokopedia. Meski putra-putrinya pelanggan Ruangguru. Dan, saya kira, percepatan antisipasi pada tataran aksi ada pada Nadiem.

Karena itu, mempercayakan pengelolaan Kemendikbud pada Nadiem jelas penuh pertaruhan. Tapi, bukankah jabatan politik selalu berisi pertaruhan, besar ataupun kecil?

Dan, Nadiem pun dipertaruhkan. Siapa tahu, kemampuan antisipasi, kecepatan dan keberanian eksekusinya berhasil mengubah lingkungan Kemendikbud dan dunia pendidikan pada umumnya.

Sebagaimana kemampuan Nadiem menyulap sumber daya pasif menjadi sumber daya aktif melalui GoJek. Di sana Nadiem mempertontonkan kedahsyatan kata "kolaborasi" berbasis teknologi digital. Dan, hasilnya spektakuler. Nadiem muncul sebagai sosok profesional muda nan kaya.

Tak bisa dipungkiri bahwa generasi yang kini berada di bangku sekolah adalah generasi ber-DNA digital. Denyut nadinya menyatu dengan gawai. Mereka mulai meninggalkan tradisi literasi produk mesin cetak. Juga memindahkan sebagian memorinya dari otak ke "chip", ke sistem penyimpanan digital. Tentu dengan segenap karakter dan gaya hidup bentukannya.

Itu pula dunia yang digeluti Nadiem. Ia tentu tahu seluk-beluknya. Pun tahu sumber daya yang dibutuhkan.

Namun, saya juga membaca sisi lain, yang boleh jadi hal baru buat Nadiem, dan tak mudah ditaklukkan. Apa itu? Yakni, "sosok" percumbuan antara politik birokrasi, pasar, dan feodalisme.

Sosok itu, di mata saya, sudah bagaikan zombie. Serba menakutkan. Sosok itu terbentuk melalui proses panjang pascakolonial. Dan, di dalam percumbuan itu korupsi senantiasa mengintip. Korupsi siap menyergap siapapun pejabatnya.

Percumbuan antara politik birokrasi, pasar dan feodalisme itulah yang membuat sekolah serba menakutkan. Bukan menggembirakan dan menggairahkan, sehingga potensi anak didik tumbuh optimal.

Simaklah anak-anak kita. Mereka belajar dari pagi hingga sore. Pulang sekolah, bagi yang berduit, harus les pelajaran ini-itu. Malam hari mengerjakan PR (pekerjaan rumah). Karena kelelahan, mereka ketiduran. Lalu, tak jarang orang tua merampungkan PR anaknya, agar sang anak tak kena hukuman di sekolah. Orang tua ikut-ikutan sekolah.

Berangkat ke sekolah tak jarang murung. Di sekolah pun kerap murung. Pulang sekolah masih murung. Banyak hal menakutkan: materi ajar dan bebannya, orang-orang dengan jiwa feodalnya.

Di rumah pun ketakutan. Orang tua ikut-ikutan menjadi zombie.

Tentu banyak pihak berharap Nadiem berani menghancurkan sosok zombie itu. Saya pun waktu itu berharap ia berani dan mampu melawan percumbuan antara politik birokrasi, pasar dan kultur feodal yang mencengkeram pendidikan kita.

Gagasan brilian tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan pembelajaran kreatif yang lain tak akan mengubah apa-apa bila sosok zombie yang terbentuk dari percumbuan antara politik birokrasi, pasar dan feodalisme masih perkasa.

Dan, kita prihatin ternyata Nadiem turut menjadi korban zombie. Alih-alih menghancurkan kepala zombie, Nadiem akhirnya malah terjerembap di kubangan korupsi pengadaan Chromebook yang memang mengintip dan siap menyergapnya. Ketenaran Nadiem sebagai profesional muda, cerdas, berintegritas, runtuh seketika. Sungguh memprihatinkan!

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/09144311/nadiem-terjerembap>

## Kode(logi) Korupsi



Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (ketiga kanan) bersama tersangka lainnya berjalan menuju ruang konferensi pers usai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

**S** iapa bilang mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang populer disapa Noel meminta motor besar kepada bawahannya? Tidak ada ucapan permintaan. Yang ada ucapan pertanyaan. Noel hanya bertanya, tapi mengapa bawahannya menindaklanjuti dengan pemberian?

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Noel ditangkap, karena berhubungan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemenaker. Noel

dianggap mengetahui kasus tersebut, dan sekaligus ikut menikmati hasil kejahatan itu.

Menurut KPK, bawahan Noel, Irvian Bobby Mahendro yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, membongkar percakapan antara dirinya dengan Noel sebagai atasannya. Awalnya, Noel menyinggung hobi Irvian soal motor besar.

“Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya, cocoknya motor apa?” kata Irvian menirukan Noel. Pertanyaan itu berbuah satu motor Ducati untuk Noel. Pembelian dilakukan secara *off the road* atau tanpa surat-surat. KPK menduga cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan transaksi (*Kompas.com*, 24/08/2025).

Noel memang tidak meminta. Ia hanya bertanya. Namun, Irvian sebagai bawahannya mengerti apa yang ada di balik pertanyaan tersebut.

Itulah kode(logi) korupsi. Menurut teori tindak tutur (*speech act*) Austin, setiap tuturan performatif senantiasa mengandung tiga daya, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Daya lokusi suatu tuturan adalah makna dasar dan referensi (makna yang diacu) tuturan itu. Misalnya, seseorang berujar, “Anda cantik sekali.” Lokusi tuturan itu menggambarkan keadaan seorang perempuan yang cantik sekali.

Daya ilokusi adalah daya yang ditimbulkan oleh penggunaan tuturan. Misalnya, perintah, ejekan, keluhan, janji, pujian, dan sebagainya. Dari sudut ilokusi,

tuturan “Anda cantik sekali” bisa merupakan pujian, tapi bisa pula ejekan.

Berdaya pujian, bila memang benar-benar cantik, karena mungkin berdandan. Sebaliknya, bisa ejekan atau sindiran, bila ternyata tidak cantik, karena mungkin lagi malas berdandan.

Sementara itu, daya perlokusi adalah hasil atau efek tuturan terhadap pendengar, baik yang nyata maupun yang diharapkan. Bila ilokusi tuturan “Anda cantik sekali” adalah pujian, perlokusinya membuat pendengar gembira. Tapi, bila ilokusinya ejekan, perlokusinya membuat pendengar malu, terhina, atau marah.

Dari sudut teori tindak tutur, tentu saja Noel tidak menekankan daya lokusi. Ia tidak sedang bertanya kepada bawahannya perihal motor besar yang cocok buat dirinya. Noel juga tidak sedang memberi tahu bahwa dirinya mengetahui kesenangan bawahannya itu.

Pertanyaan Noel lebih kuat diarahkan pada daya ilokusi dan perlokusi. Dalam konteks relasi kuasa, Noel sebagai atasan tentu saja tahu bahwa pertanyaannya akan berdaya ilokusi bagi bawahannya. Ilokusi yang dimaksud adalah ancaman sekaligus perintah.

Tanpa menggunakan kalimat ancaman dan perintah, bawahan akan menafsirkan dengan sendirinya. Irvian menafsirkan bahwa atasannya itu menyukai motor besar sebagaimana dirinya. Ia juga menafsirkan bahwa Noel sebagai atasannya mengetahui tindakan jahatnya sehubungan dengan pengurusan sertifikat K3.

Tafsir tersebut sekaligus berisi ancaman dan perintah kepada dirinya. Irvian merasa terancam, bila

tidak memenuhi keinginan Noel sebagai atasan. Karena itu, ia harus memenuhi keinginan atasannya. Dari mana uangnya? Tentu saja dari hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. Dan, benar, Irvian membelikan motor Ducati buat Noel.

Sebagaimana bahasa pada umumnya, kode(logi) korupsi bersifat konvensional. Disepakati di kalangan penggunaannya. Orang luar harus “belajar” untuk memahaminya, sebagaimana belajar bahasa pada umumnya.

Tak ada peristiwa berlangsung di luar kata. Kita menemui Tuhan melalui doa-doa. Tak sembarang kata diucapkan. Setiap agama memiliki, dan berbeda satu dengan lainnya.

Demikian pula tindakan korupsi. Tak sembarang kata dipakai. Ternyata ada kode-kode tertentu dan kata-kata tertentu pada bahasa program/kebijakan dan peraturan yang tafsirnya potensial diperalat untuk korupsi.

Kode-kode tertentu beroperasi pada wilayah praktis. Sementara itu, kata-kata tertentu pada kebijakan dan peraturan beroperasi pada wilayah normatif.

Publik tentu belum lupa. Kata “THR” (Tunjangan Hari Raya) pernah membawa Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas, divonis korupsi pada tahun 2014. Kata “apel malang” dan “apel washington” menyeret Angelina Sondakh mendekam di penjara.

Empek-empek, makanan khas Palembang, pernah tercoreng gara-gara digunakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai kode

korupsi. Akil Mochtar menggunakannya ketika mengisyaratkan permintaan imbalan uang dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang (*Kompas*, 27/7/2015).

Setahun lalu juga heboh kode korupsi seperti "lurah", "korting", "kandang burung", "jagung", "banjir". Kode-kode itu muncul dalam perkara pemerasan di lingkungan rutan KPK.

Istilah-istilah tersebut tidak mengacu makna leksikal. Maknanya hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri sebagai cara menyamarkan tindakannya.

Itulah kode(logi) korupsi. Ia semakin membahayakan, dan butuh kejelian membacanya, ketika memasuki bahasa regulasi. Bukankah penyelenggaraan negara selalu membutuhkan regulasi?

Tidak ada regulasi yang berlangsung tanpa bahasa. Tentu ini bukan pekerjaan sembarangan yang bisa dilakukan oleh kalangan awam. Penyusun regulasi hanyalah para elite. Bisa dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, kaum cerdas pandai, pemodal, dan elite lain yang berkepentingan.

Mereka bisa bersekongkol untuk satu tujuan: rumusan regulasi yang memberi peluang kalangan mereka menggarong kekayaan negara, sekaligus menyembunyikan kepentingan tersebut. Karena berbentuk regulasi, tindakan jahat mereka tak bisa dijerat oleh penegak hukum. Itulah korupsi yang dilegalkan, kejahatan yang diabsahkan melalui regulasi.

Dalam catatan saya, regulasi yang didesain dengan kata-kata populis rentan dibajak untuk tujuan jahat.

Beragam kata-kata populis, antara lain: “bantuan”, “penyesuaian”, “pemberdayaan”, “rehabilitasi”, “revitalisasi”, “percepatan”, “penguatan”, “penyelamatan”, dan sebagainya.

Namun, kenyataannya tidak sedikit regulasi dengan kata-kata populis itu justru dimanfaatkan oleh para petinggi negara dan sejumlah elite untuk kepentingannya. Sudah banyak petinggi negara masuk penjara gara-gara korupsi program-program populis.

Kode(logi) korupsi kini menyelinap semakin mendalam dan halus dalam bahasa program, kebijakan, dan regulasi. Di permukaan terkesan populis, pro-kerakyatan, tapi terdapat tafsir yang samar dan gampang diboncengi kepentingan lain yang justru bertentangan.

Korupsi memang memiliki daya mimikri yang hebat dan menyukai yang samar-samar. Dan, kode(logi) korupsi berfungsi sebagai sarana mimikri sekaligus menyamarkan sesuatu yang semestinya terang benderang.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/26/08465421/kodelogi-korupsi>

## MBG Makin Horor



Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (22/9/2025), terus bertambah hingga mencapai 63 orang.(KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN)

**A**pa satu kata yang tepat, ketika kita membaca berita ada pihak yang meminta merahasiakan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)? “Gila”, atau “edan” dalam bahasa Jawa. Merahasiakan keracunan MBG bagaikan menyembunyikan bangkai di bawah karpet. MBG makin horor.

Sudah sedemikian gilakah bangsa kita, bangsa yang sering menyebut berperadaban tinggi (halus), *adiluhung*? Senandung Ranggawarsita tentang “zaman edan” di Serat Kalatida (1860) kembali terdengar nyaring.

Diberitakan sejumlah media, beredar foto surat perjanjian agar penerima manfaat MBG merahasiakan

informasi jika terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan.

Surat tersebut palsu? Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Mustadi, mengamini beredarnya surat tersebut di sekolah- sekolah. Bahkan, sekolah yang telah menerima MBG, diharuskan membuat perjanjian itu (*Kompas.com* (20/09/2025)). Ternyata hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Blora dan Brebes (Jawa Tengah), Pamekasan (Jawa Timur), meskipun dibantah Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, instansinya tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak penerima manfaat untuk merahasiakan kasus keracunan MBG.

## **Relasi negara – warga negara**

Sulit ditemukan rasionalitasnya. Untuk apa ada perjanjian merahasiakan hal yang tidak sepatutnya dirahasiakan dalam relasi antara negara dan warga negara?

MBG tidak sebangun dengan Jumat Berkah dalam bentuk pemberian makan pagi/siang pada hari Jumat yang kini marak di banyak tempat. Relasi antara pemberi dan penerima pada Jumat Berkah bersifat sosial atas perintah agama. Sama sekali tak melibatkan entitas negara.

Sementara itu, MBG jelas-jelas melibatkan negara. MBG memang “gratis”, karena penerima manfaat tak

perlu merogoh kantong. Namun, sesungguhnya tidak tepat disebut “gratis”. Tak ada relasi komersial di sana.

MBG diadakan oleh negara sebagai perintah konstitusi. Presiden memprogramkan MBG, karena membaca konstitusi. Relasi antara pemberi dan penerima MBG merefleksikan relasi antara negara dan warga negara.

Dalam konteks MBG, negara dan warga negara terikat hubungan kewajiban dan hak. Dari sudut negara, MBG adalah kewajiban. Negara wajib menyediakan. Tentu dengan kualitas terbaik dari semua aspek. Meskipun kualitas terbaik itu kondisional sifatnya.

Dari sisi warga negara, MBG adalah hak. Seharusnya memang tak semua warga negara berhak. Penerima manfaat seharusnya adalah warga negara yang berdasarkan kriteria tertentu dinilai berhak.

Jadi, tak ada untung-rugi. MBG dibiayai dari sumber keuangan negara. Di antaranya pajak yang dibayar oleh warga negara. Karena hak, penerima manfaat memiliki hak pula untuk menilai apakah hak tersebut telah diberikan. Mereka punya hak beropini: MBG memang top, atau MBG makin horor.

Kejadian keracunan, misalnya, berarti negara belum melunasi kewajibannya. Penerima manfaat belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Tak aneh, bahkan justru waras, bila penerima manfaat melaporkan kepada petugas, atau bercerita di ruang publik melalui media yang ada, sekaligus sebagai koreksi dan masukan dari publik. Keracunan MBG dengan jelas merupakan persoalan publik.

Yang tak waras, bila kejadian semacam itu justru disembunyikan, dijauhkan dari publik. Apalagi terus berulang, tak ada perbaikan, penerima manfaat dilarang bersuara.

Sementara itu, pada sisi lain media sosial kini terus menguntit setiap kejadian yang ada di masyarakat. Apa mungkin kejadian keracunan MBG yang massal itu dirahasiakan? Sangat tidak mungkin.

## **Birokratisme**

Di Indonesia cukup banyak program/kebijakan yang tampak mulia dan gagah di atas kertas, tapi belepotan di lapangan. MBG, di mata saya, termasuk di dalamnya. MBG jelas program/kebijakan populis yang ditunggu sebagian warga negara yang membutuhkan (berhak). Dasar filosofisnya jelas dan kuat.

MBG merefleksikan nilai keadilan sosial. Siapapun presiden Indonesia, ia terikat dan dibebani soal keadilan sosial. Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara, karena hendak mendistribusikan keadilan sosial.

Saya membaca, MBG menjadi program unggulan Presiden Prabowo, karena sangat tinggi kadar sosialistiknya. MBG disiapkan Prabowo sebagai salah satu jawaban ideologis atas persoalan keadilan sosial. Karena itu, semestinya negara benar-benar mengawal pelaksanaan dan memastikan kesuksesannya.

Namun, sudah jamak program/kebijakan yang mulia dan gagah di atas kertas, tapi implementasinya terseok-seok. Misi ideologis MBG yang mulia dan gagah

itu mengalami pengerdilan, karena ideologi “birokratisme”.

Program/kebijakan diterjemahkan melalui sudut pandang birokrasi. Secara teknis tentu muncul hal-hal dan kebutuhan-kebutuhan birokratis. Ideologi “birokratisme” itu pula yang membuat MBG hingga hari ini lebih menonjol horornya daripada misi ideologisnya.

Keracunan MBG terus berulang dengan jumlah yang tidak kecil, sehingga banyak pihak mendesak Presiden Prabowo melakukan moratorium atau penghentian sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh.

Data yang diungkap Istana, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, ada 60 kasus dengan 5.207 penderita (per 16 September). Sementara laporan BPOM, ada 55 kasus dengan 5.320 penderita.

Belum lagi jebakan korupsi yang selalu membayangi program/kebijakan populis di Indonesia. Kita punya banyak pengalaman getir yang membuat kita was-was, bahwa program populis justru sering dibajak elite untuk dikorupsi.

Ideologi “birokratisme” yang bertemu dengan mentalitas korup tentu saja bisa menjebak MBG sebagai ladang korupsi. Anggaran MBG yang tidak sedikit, yang mencapai ratusan triliun, merangsang orang-orang bermentalitas korup menyusun siasat korupsi.

Bila hal itu yang terjadi, MBG akan semakin jauh dari niat dan misi ideologisnya. Sejarah akan mencatat bangsa ini sungguh tolol, bagaikan keledai yang berkali-kali terperosok pada lubang yang sama.

Buat saya, MBG akan lebih sesuai dengan niat dan misi ideologisnya bila dilaksanakan dengan memanfaatkan modal sosial-budaya, yakni gotong royong.

Asal anggarannya tersedia, saya kira, tak sulit dikolaborasikan dengan pihak sekolah sekaligus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Negara tinggal menyiapkan sistem penjaminan mutu dan pengawasan.

Setiap sekolah pada umumnya memiliki kantin atau unit khusus yang setiap hari melayani kebutuhan jajan murid-murid. Saya kira, kantin sekolah lebih siap, tahu persis kondisi sekolah, dan punya keunggulan dari sisi pemberdayaan ekonomi rakyat. Kantin sekolah tentu akan menggandeng UMKM di sekitarnya.

Namun, pemerintah lebih memilih membentuk institusi dapur umum semacam SPPG yang berpotensi terjebak birokratisme, kolusi dan nepotisme.

Tak pelak, isu miring pun akhirnya berhembus kencang. Di samping isu dapur fiktif yang jumlahnya ribuan, dapur MBG juga dituding dikuasai kalangan dekat kekuasaan yang membuat peluang UMKM mengecil.

Awas, korupsi pun siap menyergap. Sejarah membuktikan bahwa birokratisme, kolusi dan nepotisme berkerabat dekat dengan korupsi.

Kembalikan MBG pada mandat negara. Mandat utama presiden adalah melindungi dan mewujudkan kesejahteraan warga negara.

Dengan demikian, MBG wajib berkualitas, menyehatkan, dan berdampak pada kesejahteraan umum. Bukan makin horor.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/23/10482511/mbg-makin-horor>

## Catatan Penutup: Saatnya Memuliakan Pokok, Bukan Tokoh



Suara dan keinginan masyarakat agar korupsi bisa diberantas tercermin dalam mural yang menghiasi tembok di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (27/8/2023). (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

**S**etelah seperempat abad lebih Reformasi, mengapa praktik bernegara yang dahulu dikutuk dan meruntuhkan rezim Orde Baru justru kembali dinormalisasi? Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali dipuja, bahkan dirayakan secara masif. Bersamaan dengan itu suara kritis dibungkam.

Hal tersebut di antaranya ditunjukkan oleh skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 yang turun dibandingkan periode sebelumnya.

Pada 2024, skor Indonesia adalah 37, tetapi pada tahun 2025 angkanya turun menjadi 34, lebih buruk ketimbang Etiopia (38), Suriname (38), dan Sri Lanka (35).

Menurut Transparency International, skor rendah yang terjadi terus-menerus biasanya selaras dengan terkikisnya demokrasi dan buruknya mekanisme pengawasan (akuntabilitas). Skor yang rendah berkorelasi pula dengan politisasi sistem peradilan, selain mengecilnya ruang kebebasan sipil.

Reformasi ternyata gagal membuahkan peradaban politik baru yang merefleksikan karakter bangsa yang moyangnya pernah gilang-gemilang. Kita seolah tak mampu belajar dari kesalahan masa lalu. Kita kembali terperosok pada lubang yang sama.

Praktik bernegara kita mengalami paradoks. Di satu sisi, prosedur elektoral berjalan relatif baik. Pemilu anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah langsung berjalan tertib dan aman. Kelembagaan demokrasi yang lain sebagai hasil perjuangan Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bekerja. Namun, di sisi lain, praktik KKN tetap marak dalam berbagai bentuk baru, bahkan makin masif dan terang-terangan. Akibatnya, negara pun kesulitan memenuhi kewajiban konstitusi. Untuk sekadar memberikan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas saja, negara tak mampu. Kekayaan negara yang semestinya buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengalir ke kantong sedikit orang. Kemakmuran hanya dinikmati sedikit orang.

Apa masalahnya? Salah satu persoalan mendasar Indonesia sebagai bangsa pascakolonial adalah apa yang oleh Yudi Latif (*Kompas*, 9 Februari 2026) disebut “jebakan mesianisme”: kecenderungan menggantungkan harapan pada figur penyelamat.

Politik direduksi sekadar urusan tokoh. Seolah-olah, dengan hadirnya seorang pemimpin tertentu, segala persoalan akan otomatis selesai. Sistem, tata kelola, dan partisipasi warga menjadi urusan kedua.

### **Distingsi tokoh dan pokok**

Kecenderungan mesianistik sesungguhnya bukan gejala baru. Dalam konteks era kolonial, imajinasi tentang Ratu Adil berfungsi sebagai simbol pembebasan dari penindasan. Narasi tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh Sartono Kartodirdjo dalam studinya mengenai pemberontakan petani abad ke-19, memiliki daya mobilisasi yang kuat. Narasi Ratu Adil menawarkan harapan kolektif di tengah ketidakadilan struktural.

Namun, pembacaan yang lebih reflektif atas narasi Ratu Adil menunjukkan bahwa yang dirindukan rakyat bukan semata figur personal, melainkan suatu tatanan sosial yang adil. Dalam pidato pembelaan yang berjudul “Indonesia Menggugat” (1930) dan terutama dalam pidato 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Soekarno menafsirkan kerinduan itu sebagai aspirasi terhadap *sociale rechtvaardigheid*—keadilan sosial sebagai sistem kehidupan. Dengan demikian, Ratu Adil dapat dipahami sebagai metafora bagi tatanan, bukan sekadar tokoh.

Di sinilah penting membedakan antara tokoh dan pokok. Tokoh adalah representasi, bersifat kontingen dan temporal; pokok adalah sistem dan nilai yang menopang kehidupan bersama, bersifat struktural dan berkelanjutan.

Tanpa sistem yang sehat, tokoh terbaik pun akan terjebak dalam jejaring kepentingan jahat dan berpotensi menggelincirkannya. Sebaliknya, dalam sistem yang transparan dan akuntabel, pemimpin yang biasa saja pun dapat bekerja efektif karena dikawal oleh mekanisme yang kuat.

Dengan demikian, praktik bernegara yang terlalu bertumpu pada tokoh berisiko terjebak dalam personalisasi kekuasaan dan melemahkan institusi. Bertahun-tahun kita terjebak pada praktik semacam itu.

## **Personalisasi Kekuasaan**

Era Reformasi sesungguhnya membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, tetapi ternyata tidak serta-merta menghapus kultur patronase. Personalisasi kekuasaan tetap hadir melalui politik dinasti, oligarki ekonomi-politik, dan kultus figur dalam kontestasi elektoral.

Dalam konteks ini, kritik Yudi Latif mengenai “demokrasi mesianisme” sangat relevan: demokrasi dapat terdistorsi ketika publik lebih terpesona pada figur ketimbang pada tata kelola.

Konsekuensinya adalah pelemahan akuntabilitas. Ketika legitimasi politik bertumpu pada karisma personal, kritik terhadap kebijakan kerap dipersepsikan

sebagai serangan terhadap individu, bukan sebagai mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi. Ruang deliberasi menyempit, sementara loyalitas personal menguat.

Dalam negara demokrasi, kebijakan memang harus terbuka untuk diuji. Tokoh, sebagai artikulator dan eksekutor kebijakan, dengan sendirinya menjadi sasaran evaluasi. Namun, kritik kebijakan bukan ancaman personal, melainkan mekanisme koreksi agar kebijakan dan sistem bekerja pada jalur yang tepat.

Tokoh yang alergi kritik bagaikan raja bodoh yang dibohongi penata busana pada karya fiksi pengarang Denmark, Hans Christian Andersen. Raja menyembunyikan realitas dengan berbagai cara, termasuk dengan kepura-puraan. Ujungnya ada pula yang berani jujur mengatakan bahwa raja tak berbusana.

Hingga hari ini kita berada pada situasi dan kondisi semacam itu. Kritik kebijakan segera ditanggapi sebagai persoalan individu. Ujungnya berupa pembungkaman terhadap suara kritis dengan beragam cara.

## **Memperluas ruang publik**

Perubahan politik adalah keniscayaan, tetapi perubahan itu juga bukan tiba-tiba. Perubahan tetaplah membutuhkan kekuatan objektif yang berasal dari dinamika material.

Namun, juga tak mengabaikan kekuatan subjektif berupa kesadaran warga. Sejarah tetaplah proses menjadi dan bergerak terbuka, yang di dalamnya berisi jalinan rumit antara yang objektif dan subjektif.

Kini harapan perubahan itu meluap bersama hadirnya generasi baru dengan lanskap teknologi baru pula. Perkembangan teknologi digital beberapa tahun terakhir ini harus diakui telah memperluas ruang publik.

Anak-anak muda dari generasi milenial dan generasi Z memanfaatkan media sosial sebagai arena artikulasi politik melalui tagar seperti *#ReformasiDikorupsi*, *#KawalKeputusanMK*, *#IndonesiaGelap*, meme, kampanye daring, dan advokasi kebijakan. Mereka tidak lagi berbicara tentang siapa yang memimpin (tokoh), tetapi tentang apa yang harus diperbaiki (pokok).

Di akhir Agustus 2025 kita menyaksikan gerakan sosial yang lahir dari jaringan digital. Kita juga menyaksikan bahwa gerakan sosial itu kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan kolektif-politik di ruang publik, meski tanpa tokoh. Mereka dengan sigap merumuskan: "17+8 Tuntutan Rakyat: Transformasi, Reformasi, Empati".

Dalam perspektif teori ruang publik ala Habermas, dinamika tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat rasionalitas komunikatif dalam demokrasi. Namun, apakah partisipasi digital yang meluas itu sungguh memperkuat demokratisasi?

Saya kira, hal itu peluang, sekaligus tantangan. Energi kritis dalam lanskap digital hari ini perlu diarahkan pada penguatan sistem. Partisipasi digital niscaya efektif dan bermakna jika terhubung dengan agenda institusional, di antaranya pengawasan kebijakan, advokasi legislasi, dan penguatan masyarakat

sipil. Tanpa orientasi sistemik, ekspresi digital mudah tereduksi menjadi mobilisasi sesaat.

Saatnya kita memuliakan pokok (bukan tokoh), yang berarti menempatkan nilai, aturan, dan tata kelola sebagai prioritas utama dalam praktik bernegara. Tokoh tetap penting sebagai representasi, tetapi ia harus tunduk pada sistem yang transparan dan akuntabel. Sejarah mengajarkan bahwa tokoh dapat menginspirasi, tetapi hanya sistem yang mampu menjamin keberlanjutan keadilan.

Konsolidasi demokrasi mensyaratkan institusi yang bekerja secara impersonal: penegakan hukum yang setara, birokrasi berbasis merit, transparansi anggaran, serta mekanisme *checks and balances* yang efektif. Tanpa penguatan institusional, pergantian kepemimpinan tidak otomatis menghasilkan perubahan substantif.

Dengan demikian, agenda konsolidasi demokrasi Indonesia menuntut pergeseran orientasi: dari kultus tokoh menuju penguatan institusi; dari euforia elektoral menuju kerja panjang membangun tata kelola; dari pengharapan mesianistik menuju partisipasi kritis.

Politik semestilah merayakan percakapan (pokok), bukan sekadar tepuk tangan (tokoh). Hanya dengan memuliakan pokok, cita-cita keadilan sosial dapat bergerak dari retorika menuju realitas.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2026/02/22/06000071/saatnya-memuliakan-pokok-bukan-tokoh>

## Biodata Penulis



**ANDANG SUBAHARIANTO**, lahir di Blitar, 17 April 1965. Lulus dari Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember, pada tahun 1988 dengan keahlian bidang linguistik. Pendidikan Pascasarjana (S2) bidang antropologi diselesaikan pada tahun 2001 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sejak tahun 1992 aktif sebagai dosen di almamaternya (kini Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Jember. Pada tahun 2002 – 2004 dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian Budaya Jawa & Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2004 – 2008 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2008 – 2012 dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember. Tahun 2016 hingga 2024 dipercaya sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Sejak 2023 hingga sekarang dipercaya sebagai Ketua Senat Universitas Jember.

Di samping sebagai pengajar di almamaternya, aktif menjadi peneliti kebudayaan dan penulis lepas di sejumlah media massa. Hasil penelitiannya bersama kolega dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Sebagian diterbitkan dalam bentuk buku bersama kolega, di antaranya: *Membentur Kultur*

*Menjunjung Leluhur: Tantangan Industrialisasi Madura* (Malang: Bayumedia, 2004); *Madura Bicara PLTN* (Jember: Penerbit Universitas Jember, 2004); *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Yogyakarta: Galangpress, 2011); *Lokalitas dalam Musik Banyuwangian dan Campursari: Transformasi Diskursif dalam Postkolonialitas Kultural* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017); *Merawat Budaya/Merajut Kuasa: Identitas Using dalam Kontestasi Kepentingan* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017); *Banyuwangi Rebound* (Banyuwangi: Untag B. Press, 2022).

Di samping karya kelompok yang telah terbit, sejumlah buku karya individu juga telah terbit, baik sebagai kumpulan artikel di media massa maupun hasil penelitian: *Merajut Persatuan Merawat Kebangsaan* (Kumpulan Artikel, Untag B. Press, 2018); *Membalik Arus Balik* (Kumpulan Artikel, Untag B. Press, 2020); dan *Jalan Terjal Etika Politik: Catatan Pilu Pemilu 2024* (Kumpulan Artikel, Unej Press, 2025); dan *Api di Tanah Raja, Radikalisme Petani Jenggawah 1995* (Hasil Penelitian, Pustaka Indis, 2025).

# #MegatRuh INDONESIA

Refleksi 25 Tahun Reformasi



Berisi pernak-pernik perjalanan historis bangsa ini, yang penuh dinamika; dituliskan secara apik dengan judul dan bahasa yang khas penulis kolom. (Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.)

Menjadi pengingat penting bahwa harapan bagi masa depan Indonesia tetap harus diperjuangkan secara kritis dan bertanggung jawab. (Dr. J. Haryatmoko, SJ)

Buku ini berangkat dari perpaduan yang seimbang antara kritisisme dalam nalar dan optimisme dalam kehendak tentang republik kita. (Airlangga Pribadi Kusuma, Ph.D.)

Kehadirannya memperkaya khazanah literasi publik sekaligus menghidupkan tradisi refleksi kritis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi kita. (Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng.)

Tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyalakan harapan bahwa masa depan Indonesia tetap layak diperjuangkan, dengan akal sehat, keberanian moral, dan kesetiaan pada cita-cita kemerdekaan. (Prof. Agus Trihartono, Ph.D.)

Menghadirkan perspektif segar, yang tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga menggugah pikiran dan harapan akan Indonesia yang lebih baik. (Prof. Drs. Nawiyanto, Ph.D.)



**UNEJ PRESS**

Gedung Kewirausahaan Lantai 1  
Kampus Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

Telepon: 0331-330224, Voip. 00319  
Email: [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

ISBN 978-623-477-328-6



9

786234

773286